

**POLA TATA RUANG VERNAKULAR DESA ADAT
PADA KAWASAN PARIWISATA LOVINA – SINGARAJA – BALI**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh :

I NENGAH BUDIARTA
L4D 000 187



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

POLA TATA RUANG VERNAKULAR DESA ADAT PADA KAWASAN PARIWISATA LOVINA – SINGARAJA – BALI

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

I NENGAH BUDIARTA
L4D 000 187

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 30 September 2002

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Oktober 2002

Pembimbing Pendamping



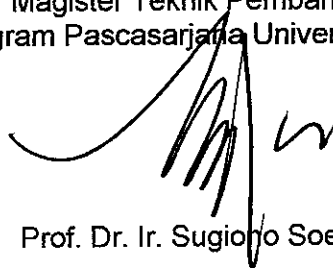
Samsul Ma'rif, SP, MT

Pembimbing Utama



Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, September 2002



I NENGAH BUDIARTA

L4D 000 187

Na hi Jnanena Sadrisam Pawitram Iha Widgate,
Tat Swayam Yogasamsiddhah Kalena 'tmani Windati
(Bhagawadgita, Bab IV, sair 38)

Tidak Ada Sesuatu di Dunia ini yang Dapat Menyamai Kesucian Ilmu Pengetahuan,
Mereka yang Sempurna dalam Yoga akan Menemui Dirinya Sendiri
dalam Jiwanya pada Waktunya

Tesis ini dipersembahkan kepada
Yang Terhormat
Bapak I Made Sumarta dan Ibu Ni nyoman jempiring
Terima Kasih atas Dukungan dan Kasih Sayangnya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), atas tersusunnya Tesis dengan judul **Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Pada Kawasan Pariwisata Lovina – Singaraja – Bali**, sebagai persyaratan Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro - Semarang.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiardjo, MSc selaku Pembimbing yang banyak memberikan masukan, arahan, dan bimbingan sejak proses awal penyusunan Tesis sampai memenuhi kriteria yang ditetapkan di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai Rektor.
2. Bapak Samsul Ma'rif, SP, MT selaku Co-Pembimbing, yang banyak memberikan masukan, arahan, dan bimbingan sejak proses awal penyusunan Tesis sampai memenuhi kriteria yang ditetapkan.
3. Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA selaku Pembahas pada sidang ujian tesis yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam memantapkan isi Tesis ini.
4. Bapak Ir. Parfi Khadiyanto, MSL selaku Pembahas pada sidang pembahasan tesis yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam memantapkan isi Tesis ini.
5. Bapak Ir. Djoko Suwandono, MSP selaku Penguji yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam upaya memantapkan isi Tesis ini.
6. Gubernur Bali, Bupati Buleleng dan Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, atas kesempatan yang diberikan.
7. Mr. George Soraya selaku perwakilan Bank Dunia di Indonesia dan Konsultan UMT-BUIP, Bapak Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc, Acwin Dwijendra, ST, MA, Komang Ariawan, SE dan kawan-kawan yang telah membantu kelancaran proses studi.
8. Pimpinan dan staf Kantor PHRI Kabupaten Buleleng, Kelian Desa Adat beserta para responden dalam Kawasan Pariwisata Lovina, atas waktu dan data yang diberikan.
9. Bapak dan Ibu beserta Keluarga Besar di Bali; yang selalu mendampingi dengan doa.
10. Teman-teman Angkatan Reguler V yang ikut memberikan dorongan sehingga selesainya proses penulisan Tesis ini.
11. Teman-teman Kos yang ikut memberikan dorongan sehingga selesainya Tesis ini.
12. Ir. Nyoman Genep, MT, yang telah banyak membantu dalam penelitian.
13. Staf administrasi dan pengelola MTPK, Mas Janu, Mbak Lulu, Didin, Ratih, Linda, Prie; yang telah mempersiapkan pelaksanaan sidang Tesis

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian tetap berharap agar bermanfaat dan memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan pembangunan.

Semarang, September 2002
Penulis

I Nengah Budiarta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAKSI	xv
ABSTRACT	xvi
DAFTAR ISTILAH	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi	9
1.3.1. Tujuan Studi	9
1.3.2. Sasaran Studi	9
1.3.3. Manfaat Studi	10
1.4. Ruang Lingkup Studi	10
1.4.1. Lingkup Substansial	10
1.4.2. Lingkup Spasial	11
1.5. Kerangka Pemikiran Studi	13
1.6. Pendekatan dan Metoda Pelaksanaan Studi.....	15
1.6.1. Pendekatan Studi	15
1.6.2. Metode Analisis	16
1.6.3. Data dan Cara Mendapatkannya	20
1.7. Sistematika Penulisan	23

BAB II. KAJIAN TEORETIK PARIWISATA, TATA RUANG

VERNAKULAR DAN TATA RUANG TRADISIONAL BALI	25
2.1. Konsepsi Umum Pariwisata dan Studi Dampaknya	25
2.1.1. Pengertian Pariwisata	25
2.1.2. Klasifikasi dan Aspek Tata Ruang Pariwisata	26
2.1.3. Perkembangan Teori dan Konsep Pariwisata	30
2.1.4. Dampak Perkembangan Pariwisata	32
2.1.5. Akomodasi Pariwisata	38
2.1.6. Pemasaran/Promosi Pariwisata	41
2.1.7. Pendekatan Analisa Dampak Pariwisata	43
2.2. Tata Ruang Vernakular	44
2.2.1. Pengertian Tata Ruang Vernakular	44
2.2.2. Faktor – Faktor Tata Ruang Vernakular	46
2.3. Konsep Umum Tata Ruang Tradisional	47
2.4. Tata Ruang Tradisional Bali	49
2.4.1. Konsep Tata Ruang Tradisional Bali	49
2.4.2. Aspek – Aspek Tata Ruang Tradisional Bali	54
2.5. Kerangka Teori dan Pertanyaan Penelitian	67
2.5.1. Kerangka Teori	67
2.5.2. Pertanyaan Penelitian	68

BAB III. GAMBARAN UMUM KAWASAN PARIWISATA LOVINA

3.1. Letak Geografis dan Batas Administrasi	70
3.2. Kependudukan	73
3.2.1. Distribusi dan Kepadatan Penduduk	73
3.2.2. Jumlah Warga Inti Desa Adat	74
3.2.3. Mata Pencaharian	75
3.3. Kunjungan Wisatawan	76
3.4. Akomodasi Pariwisata	77

3.5. Tata Guna Lahan (land use) pada Kawasan Pariwisata Lovina	79
3.6. Pola Desa Tradisional pada Kawasan Pariwisata Lovina	90

BAB IV. POLA TATA RUANG VERNAKULAR DESA ADAT

KAWASAN PARIWISATA LOVINA	98
4.1. Analisis Zonasi Kawasan Masing-Masing Desa Adat	98
4.2. Analisis Persepsi Masyarakat Desa Adat	103
4.2.1. Atribut Desa Adat	103
4.2.2. Akomodasi Pariwisata	105
4.3. Analisis Persepsi Wisatawan dan Persepsi Pengusaha	130
4.3.1. Analisis Persepsi Wisatawan	130
4.3.2. Analisis Persepsi Pengusaha	133
4.4. Analisis Kesepakatan Masyarakat, Wisatawan dan Pengusaha	136
4.5. Analisis Rancang Pola Tata Ruang Vernakular	142
4.5.1. Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Pemaron	142
4.5.2. Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Tukad Mungga	144
4.5.3. Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Anturan	145
4.5.4. Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Banyualit	146
4.5.5. Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Kalibukbuk	147
4.5.6. Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Kaliasem	148
4.5.7. Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Temukus	149
4.5.8. Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Tigawasa	150

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan	153
5.2. Rekomendasi	154

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Kawasan Pariwisata Lovina Tahun 1996 – 2000	3
Tabel I.2	Penentuan Zonasi Desa Adat	17
Tabel I.3	Penentuan Range Pendapat Responden	19
Tabel II.1	Tipe, Jumlah Wisatawan dan Adaptasinya Terhadap Norma Budaya Setempat	37
Tabel II.2	Konsep Tri Angga Sebagai Konsep Hirarki Ruang	51
Tabel III.1	Desa – Desa di Kawasan Pariwisata Lovina	72
Tabel III.2	Distribusi dan Perkembangan Penduduk di Kawasan Pariwisata Lovina	73
Tabel III.3	Kepadatan Penduduk di Kawasan Pariwisata Lovina	74
Tabel III.4	Jumlah Warga Inti Desa Adat di Kawasan Pariwisata Lovina	75
Tabel III.5	Mata Pencaharian Penduduk di Kawasan Pariwisata Lovina Tahun 2000	75
Tabel III.6	Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Kawasan Pariwisata Lovina Tahun 1996 – 2001	76
Tabel III.7	Jumlah Fasilitas Wisata di Kawasan Pariwisata Lovina Tahun 2000	77
Tabel III.8	Penggunaan Lahan di Kawasan Pariwisata Lovina Tahun 2000	79
Tabel IV.1	Pendapat Tokoh Desa Adat Tentang Zonasi Desa Adat	99
Tabel IV.2	Pendapat Tokoh Desa Adat Tentang Batas Zonasi	100
Tabel IV.3	Pendapat Tokoh Desa Adat Tentang Radius Kesucian Pura	101
Tabel IV.4	Pendapat Tokoh Desa Adat Tentang Penerapan Jarak <i>Apenimpug</i> dan <i>Apenyenger</i>	102
Tabel IV.5	Pendapat Tokoh Desa Adat Tentang Boleh Tidaknya Perubahan Lokasi Atribut Desa Adat	104
Tabel IV.6	Pendapat Tokoh Desa Adat Tentang Lokasi Akomodasi Pariwisata pada Masing – Masing Zona Desa Adat	105

Tabel IV.7	Pendapat Wisatawan Tentang Pertimbangan Lokasi dalam Memilih Akomodasi Pariwisata	131
Tabel IV.8	Pendapat Wisatawan Tentang Lokasi Akomodasi Pariwisata	131
Tabel IV.9	Urutan Lokasi Akomodasi Pariwisata yang Bisa Diterima oleh Wisatawan pada Tiap Zona	133
Tabel IV.10	Pendapat Pengusaha Tentang Lokasi Akomodasi Pariwisata	134
Tabel IV.11	Urutan Lokasi Akomodasi Pariwisata yang Bisa Diterima oleh Pengusaha Pada Tiap Zona	136
Tabel IV.12	Nilai Masing – Masing Persepsi Responden	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Pulau Bali	2
Gambar 1.2	Restoran dengan Penampilan Arsitektur Tradisional Bali pada Kawasan Pariwisata Lovina.....	5
Gambar 1.3	<i>Art Shop</i> pada Kawasan Pariwisata Lovina	6
Gambar 1.4	Lokasi Hotel yang Berdekatan dengan Pura	7
Gambar 1.5	Wilayah Kabupaten Buleleng	12
Gambar 1.6	Kerangka Pemikiran Studi	14
Gambar 1.7	Kerangka Pikir Analisis	16
Gambar 1.8	Grafik Kesepakatan Persepsi Responden	19
Gambar 2.1	Konsep Nawa Sanga Sebagai Orientasi Kosmologis	50
Gambar 2.2	Konsepsi Tata Ruang Tradisional Bali	52
Gambar 2.3	Beberapa Tipe Konsep Tata Ruang Tradisional Bali	53
Gambar 2.4	Variasi Hubungan Antara Desa Adat Dengan Desa Dinas	56
Gambar 2.5	Morphologi Permukiman Tradisional Bali	62
Gambar 2.6	Pola Pempatan Tata Ruang Tradisional Bali	64
Gambar 2.7	Pola Linier Tata Ruang Tradisional Bali	64
Gambar 2.8	Pola Kombinasi Tata Ruang Tradisional Bali	65
Gambar 3.1	Desa Dinas pada Kawasan Pariwisata Lovina	70
Gambar 3.2	Desa Adat pada Kawasan Pariwisata Lovina	71
Gambar 3.3	Pie Chart Luas Desa – Desa di Kawasan Pariwisata Lovina	72
Gambar 3.4	Grafik Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Kawasan Pariwisata Lovina Tahun 1996 – 2001	76
Gambar 3.5	Pie Chart Jumlah Fasilitas Wisata di kawasan Pariwisata Lovina, Tahun 2000	78
Gambar 3.6	Pie Chart Penggunaan Lahan di kawasan Pariwisata Lovina Tahun 2000	80
Gambar 3.7	Penggunaan Lahan Kawasan Pariwisata Lovina	81

Gambar 3.8	Penggunaan Lahan Desa Adat Pamaron	82
Gambar 3.9	Penggunaan Lahan Desa Adat Tukad Mungga	83
Gambar 3.10	Penggunaan Lahan Desa Adat Anturan	84
Gambar 3.11	Penggunaan Lahan Desa Adat Banyualit	85
Gambar 3.12	Penggunaan Lahan Desa Adat Kalibukbuk	86
Gambar 3.13	Penggunaan Lahan Desa Adat Kaliasem	87
Gambar 3.14	Penggunaan Lahan Desa Adat Temukus	88
Gambar 3.15	Penggunaan Lahan Desa Adat Tigawasa	89
Gambar 3.16	Pola Desa Adat Pamaron	90
Gambar 3.17	Pola Desa Adat Tukad Mungga	91
Gambar 3.18	Pola Desa Adat Anturan	92
Gambar 3.19	Pola Desa Adat Banyualit	93
Gambar 3.20	Pola Desa Adat Kalibukbuk	94
Gambar 3.21	Pola Desa Adat Kaliasem	95
Gambar 3.22	Pola Desa Adat Temukus	96
Gambar 3.23	Pola Desa Adat Tigawasa	97
Gambar 4.1	Arah Kosmologi dan Atribut Desa Adat Pamaron	113
Gambar 4.2	Zonasi Desa Adat Pamaron	114
Gambar 4.3	Arah Kosmologi dan Atribut Desa Adat Tukad Mungga	115
Gambar 4.4	Zonasi Desa Adat Tukad Mungga	116
Gambar 4.5	Arah Kosmologi dan Atribut Desa Adat Anturan	117
Gambar 4.6	Zonasi Desa Adat Anturan	118
Gambar 4.7	Arah Kosmologi dan Atribut Desa Adat Banyualit	119
Gambar 4.8	Zonasi Desa Adat Banyualit	120
Gambar 4.9	Arah Kosmologi dan Atribut Desa Adat Kalibukbuk	121
Gambar 4.10	Zonasi Desa Adat Kalibukbuk	122
Gambar 4.11	Arah Kosmologi dan Atribut Desa Adat Kaliasem	123
Gambar 4.12	Zonasi Desa Adat Kaliasem	124
Gambar 4.13	Arah Kosmologi dan Atribut Desa Adat Temukus	125
Gambar 4.14	Zonasi Desa Adat Temukus	126
Gambar 4.15	Arah Kosmologi dan Atribut Desa Adat Tigawasa	127

Gambar 4.16	Zonasi Desa Adat Tigawasa	128
Gambar 4.17	Zonasi Desa Adat Pada Kawasan Pariwisata Lovina	129
Gambar 4.18	Grafik Kesepakatan Masyarakat, Wisatawan dan Pengusaha Pada Zona Utama	138
Gambar 4.19	Grafik Kesepakatan Masyarakat, Wisatawan dan Pengusaha Pada Zona Madya	139
Gambar 4.20	Grafik Kesepakatan Masyarakat, Wisatawan dan Pengusaha Pada Zona Nista	140
Gambar 4.21	Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Pemaron	143
Gambar 4.22	Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Tukad Mungga	144
Gambar 4.23	Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Anturan	145
Gambar 4.24	Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Banyualit	146
Gambar 4.25	Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Kalibukbuk	147
Gambar 4.26	Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Kaliasem	148
Gambar 4.27	Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Temukus	149
Gambar 4.28	Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Tigawasa	150
Gambar 4.29	Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat pada Kawasan Pariwisata Lovina	151

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	: Lembar Kuesioner Untuk Tokoh Desa Adat	156
Lampiran B	: Lembar Kuesioner Untuk Masyarakat Desa Adat	160
Lampiran C	: Lembar Kuesioner Untuk Wisatawan	164
Lampiran D	: Lembar Kuesioner Untuk Pengusaha	167
Lampiran E	: Tabulasi Data	170
Tabel E.1	: Tabulasi Data Persepsi Tokoh Desa Adat	170
Tabel E.2	: Tabulasi Data Persepsi Warga Desa Adat Banyualit	171
Tabel E.3	: Tabulasi Data Persepsi Warga Desa Adat Kalibukbuk	172
Tabel E.4	: Tabulasi Data Persepsi Warga Desa Adat Anturan	173
Tabel E.5	: Tabulasi Data Persepsi Warga Desa Adat Tukad Mungga	174
Tabel E.6	: Tabulasi Data Persepsi Warga Desa Adat Pamaron	175
Tabel E.7	: Tabulasi Data Persepsi Warga Desa Adat Kaliasem	176
Tabel E.8	: Tabulasi Data Persepsi Warga Desa Adat Tigawasa	177
Tabel E.9	: Tabulasi Data Persepsi Warga Desa Adat Temukus	178
Tabel E.10	: Tabulasi Data Persepsi Wisatawan	179
Tabel E.11	: Tabulasi Data Persepsi Pengusaha	180

ABSTRAKSI

Salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Indonesia yang mendapat prioritas utama sebagai primadona dalam pengembangan pariwisata adalah pulau Bali karena pulau Bali mempunyai potensi berupa keindahan alam dan budaya dari masyarakat Bali yang sangat unik. Salah satu kawasan pariwisata yang sedang berkembang adalah Kawasan Pariwisata Lovina yang terletak di Kabupaten Buleleng. Dengan meningkatnya arus wisatawan ke Lovina, menjadikan adanya peningkatan aktivitas pariwisata baik aktivitas dari wisatawan, pengusaha maupun aktivitas dari masyarakat Lovina. Perkembangan kegiatan pariwisata yang semakin pesat akan menuntut peningkatan penyediaan fasilitas akomodasi pariwisata, yang akan membawa implikasi yang meluas keseluruh sektor kehidupan masyarakat, sehingga akan terjadi perkawinan fungsi antara fungsi sosial budaya dengan fungsi ekonomi yang tidak selalu dapat berlangsung secara serasi. Untuk dapat mengakomodasikan kepentingan wisatawan dan kepentingan masyarakat lokal (masyarakat Bali), perlu kiranya diketahui batas – batas toleransi antara kedua kepentingan tersebut sehingga dengan demikian akan bisa dimunculkan suatu konsep pola tata ruang yang dapat mengakomodasikan kedua kepentingan yang berbeda tersebut, yang dikenal dengan pola tata ruang vernakular.

Dari rumusan masalah tersebut dapat dimunculkan suatu pertanyaan penelitian (research question) yaitu : Bagaimana bentuk pola tata ruang vernakular pada kawasan pariwisata Lovina. Sedangkan tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji pola tata ruang vernakular pada kawasan pariwisata Lovina. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang harus dicapai adalah : (1) mengidentifikasi zonasi dari masing – masing Desa Adat di kawasan pariwisata Lovina berdasarkan zona utama, madya dan nista, (2) menentukan parameter yang mempengaruhi perubahan pola tata ruang tradisional Ba'i dari sisi wisatawan dan pengusaha, pada masing – masing Desa Adat di kawasan pariwisata Lovina yang terkena pengaruh pariwisata, (3) menentukan parameter yang mempengaruhi keberadaan pola tata ruang tradisional Bali dari sisi masyarakat pada masing – masing Desa Adat di kawasan pariwisata Lovina, (4) menentukan arahan pengembangan kawasan dengan menetapkan standar pola tata ruang vernakular pada kawasan pariwisata Lovina

Dari sasaran-sasaran tersebut untuk sampai kepada hasil akhir penelitian, dilakukan 5 jenis analisis yaitu (1). Analisis zonasi kawasan desa adat, (2). Analisis persepsi masyarakat, (3) Analisis persepsi wisatawan dan persepsi pengusaha, (4). Analisis Kesepakatan Masyarakat, Wisatawan dan Pengusaha dan (5). Analisis rancang pola tata ruang vernakular.

Hasil akhir dari studi yang dilakukan adalah berupa suatu konsep pola tata ruang vernakular pada masing – masing desa adat yang ada di Kawasan Pariwisata Lovina yang sudah mengakomodasikan kepentingan dari kegiatan pariwisata yaitu kepentingan dari wisatawan dan pengusaha dibidang pariwisata serta kepentingan dari masyarakat lokal.

ABSTRACT

One of the Tourism Destination Objects in Indonesia that get the top priority as favorite in tourism development is Bali Island because Bali Island had the potential such as beautiful scenery and unique culture of the Balinese. One of the developing tourism objects is Lovina tourism object located at Buleleng Regency. Due to the increasing wave of tourists in Lovina, there is a strong tendency of the increasing tourism activities from the tourists, the industrialists and activity from Lovina society. The rapid growing in tourism activity will demand the increasing tourism accommodation facilities, that will bring large implication to all society's live sector, until there will be the mix between socio cultural function and economic function that is not always compatible. To accommodate tourists interests and local society's interests the Balinese people, we should know the tolerance limits between the two kind of interests which will able to create a concept of layout pattern that can accommodate two different interests known as vernacular layout pattern.

From that problem's pattern can be appeared a research question, that is: How is the shape of vernacular layout pattern in Lovina tourism object. The goal of this study is to examine vernacular layout pattern in Lovina tourism object. To achieve that goal, the targets are: (1) identify the zone of each Desa Adat (Culture Village) in Lovina tourism object based on the prime zone, medium zone and uninteresting zone. (2) Determine the parameter that influencing the change of Bali tradition's layout pattern from tourist and industrialist in each Desa Adat area which influence by tourism. (3) Determine the parameter that influencing the existence of Bali tradition's layout pattern from society in each Desa Adat in Lovina tourism object. (4) Determine the directive of object's development by standardize vernacular layout pattern concept in Lovina tourism object.

To get the result of the research from that targets, there are 5 kind of analysis: (1) Desa Adat area zone analysis, (2) Society's perception analysis, (3) Tourist's and industrialist's perception analysis, (4) Public agreement, tourist and industrialist analysis, (5) The frame of vernacular layout pattern's concept analysis.

The result from the study is a vernacular layout pattern's concept to each Desa Adat in Lovina tourist object that have accommodated the necessities from tourism activity that is the necessities from tourist and industrialist in tourism and local society.

DAFTAR ISTILAH

Apenimpug	: Jarak untuk orang dewasa normal melempar suatu benda.
Apenyengker	: Batasan tembok pembatas (penyengker) dari suatu Pura.
Art Shop	: Toko yang menjual barang – barang kerajinan dan barang – barang seni.
Atribut Desa Adat	: Fasilitas umum dalam suatu desa adat yang terkait dengan kegiatan dalam desa adat.
Atraksi Pariwisata	: sesuatu yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung, bisa berupa alam, kebudayaan atau manusia itu sendiri.
Awig – awig	: Aturan dalam suatu desa adat yang bersifat mengikat semua anggota/warga desa adat.
Bale Banjar	: Gedung serba guna milik desa adat yang biasa dipakai sebagai tempat pertemuan warga desa adat.
Bhuana Agung	: Alam semesta (alam besar)
Bhuana Alit	: Alam kecil (badan/raga manusia)
Desa Adat	: Desa yang merupakan suatu kesatuan wilayah tempat para warganya secara bersama – sama mengonsepsikan dan mengaktifkan upacara – upacara dan berbagai kegiatan sosial yang ditata oleh suatu sistem budaya.
Desa Dinas	: Desa dengan fungsi dibidang pemerintahan
Desa kala Patra	: Tempat, waktu dan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
Kaja	: Arah ke gunung.
Kangin	: Arah terbitnya matahari
Kauh	: Arah terbenamnya matahari
Kelod	: Arah ke laut
Krama Desa	: Warga desa
Madya	: Tengah, sedang.
Merajan	: Tempat persembahyangan keluarga.
Motif Pariwisata	: dorongan atau alasan untuk melakukan kegiatan wisata.
Nawa Sanga	: Arah sembilan mata angin.
Ngemong	: Menjaga, memelihara, mengurus.
Nista	: Kanista, tidak baik, rendah.
Nyungsung	: Menjunjung.
Pola Tata Ruang Vernakular	: wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang berdasarkan pengetahuan tradisional dan budaya setempat, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan jaman serta diwujudkan tidak berdasarkan rekayasa desain.
Palemahan Desa	: Tanah ulayat milik desa yang merupakan tempat permukiman warga desa bersangkutan.

Pawongan Desa	: Seluruh warga desa adat dalam suatu desa adat.
Pura Desa	: Pura tempat memuja brahma
Pura Dalem	: Pura tempat memuja Siwa
Pura Puseh	: Pura Tempat memuja Wisnu
Setra	: Kuburan
Society	: Masyarakat
Tri Khayangan	: Tiga buah Pura yang dimiliki desa adat yaitu Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem.
Utama	: Utama, paling baik.
Zona	: Batasan kawasan dengan tema pengembangan tertentu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Letak Indonesia secara geografis berada pada jaringan lalu lintas pariwisata kawasan Pasifik dengan potensi alam dan budaya yang beragam merupakan produk wisata yang dapat menarik wisatawan dalam jumlah yang besar. Salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Indonesia yang mendapat prioritas utama sebagai primadona dalam pengembangan pariwisata adalah pulau Bali. Pulau Bali dijadikan sebagai prioritas utama dalam pengembangan pariwisata karena Pulau Bali mempunyai potensi berupa keindahan alam dan budaya dari masyarakat Bali yang sangat unik.

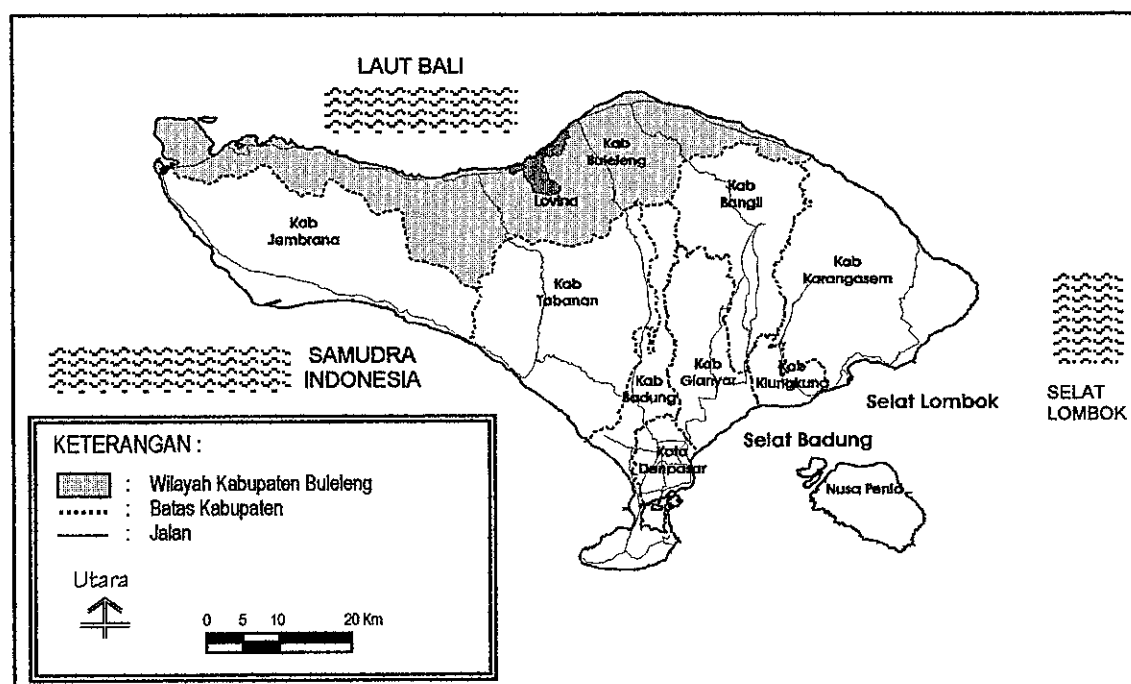
Pada kenyataannya pariwisata di Bali sudah sedemikian berkembangnya terutama di Bali Selatan dengan terpusatnya fasilitas akomodasi pariwisata di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar (Kuta, Nusa Dua dan Sanur) serta dengan keberadaan Bandara Internasional Ngurah Rai di Tuban – Kabupaten Badung

Kebijakan pembangunan Pemerintah Propinsi Bali adalah memprioritaskan pembangunannya pada sektor pariwisata, khususnya pariwisata budaya yang ditunjang oleh sektor pertanian dan industri kecil/kerajinan. Dalam mendukung kebijakan pembangunan kepariwisataan tersebut dan dalam usaha untuk penyebaran dan pemerataan kegiatan pariwisata di Bali, Pemerintah Propinsi Bali telah menetapkan 21 kawasan pariwisata di seluruh Bali (Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No.528 Tahun 1993).

UPT-PUSTAK-UNDIP

Dalam rangka penyebaran dan pemerataan pembangunan dibidang pariwisata, pada saat ini pemerintah Propinsi Bali sedang berusaha untuk mengembangkan pariwisata terutama di Bali Utara. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Lovina di Kabupaten Buleleng sebagai salah satu kawasan pariwisata dan dengan dibukanya bandara perintis (Lapangan Udara Letkol Wisnu) di Kecamatan Grokgak Kabupaten Buleleng. Letak Kawasan Pariwisata Lovina adalah seperti pada gambar 1.1 berikut :

GAMBAR 1.1
PETA PULAU BALI



Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2000

Kawasan pariwisata Lovina yang terletak di Kabupaten Buleleng, meliputi 2 Kecamatan yang terdiri dari 7 desa / kelurahan yaitu: (1) Kecamatan Buleleng terdiri dari Desa Kalibukbuk, Desa Pemaron, Desa Tukad Mungga dan Desa Anturan. (2) Kecamatan Banjar terdiri dari Desa Kaliasem, Desa Temukus dan Desa Tigawasa. Disamping adanya

Desa dinas, secara tradisional kawasan pariwisata Lovina terdiri dari 8 Desa Adat yaitu Desa Adat Kalibukbuk, Desa Adat banyualit, Desa Adat Pemaron, Desa Adat Tukad Mungga, Desa Adat Anturan, Desa Adat Kaliasem, Desa Adat Temukus dan Desa Adat Tigawasa.

Keberhasilan Lovina menyedot wisatawan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 1998 dan tahun 2000 (Tabel I.1).

TABEL I.1
PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATAWAN
KE KAWASAN PARIWISATA LOVINA TAHUN 1996-2000

No.	Tahun	Wisman	Wisnus	Jumlah	Peningkatan (%)
1	1996	12.839	62.490	75.329	
2	1997	13.857	70.980	84.837	12,6%
3	1998	8.258	45.642	53.900	-36,5%
4	1999	55.740	109.518	165.258	206,6%
5	2000	5.727	43.462	49.189	70,2%

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, 2001

Dengan meningkatnya arus wisatawan ke Lovina, menjadikan adanya peningkatan aktivitas pariwisata baik aktivitas dari wisatawan maupun aktivitas dari masyarakat Lovina. Peningkatan aktivitas pariwisata ini telah membawa implikasi yang meluas keseluruhan sektor kehidupan masyarakat. Lebih – lebih kalau diingat bahwa melalui saluran pariwisata terjadi pertemuan antara bermacam – macam kebudayaan yang ada pada setiap suku bangsa di dunia. Implikasi lain dengan peningkatan arus wisatawan ini adalah peningkatan kebutuhan akan penyediaan fasilitas yang menunjang pariwisata. Ini berarti bahwa tuntutan kebutuhan ruang untuk kegiatan pariwisata akan semakin meningkat, dalam jumlah dan penyebarannya.

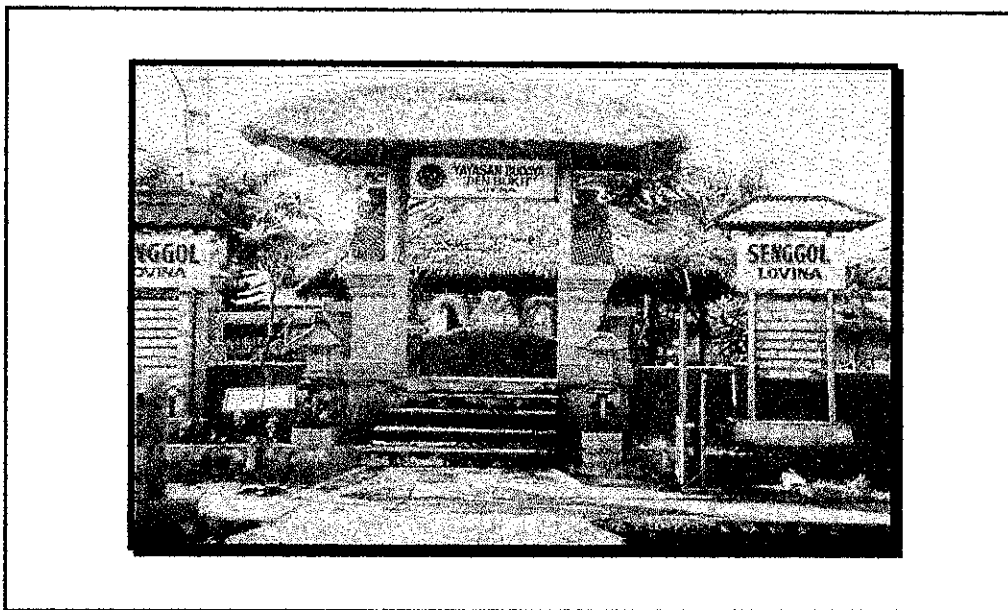
Fasilitas ruang untuk kegiatan pariwisata pada dasarnya dibagi atas dua bagian, yaitu : daerah kunjungan wisata dan daerah domisili wisata. Pada umumnya daerah kunjungan wisata dampak pengaruh pariwisata bersifat tidak langsung, karena kontak komunikasi antara masyarakat dan wisatawan tidak berlangsung secara intensif. Lain halnya dengan lokasi domisili wisatawan, kontak komunikasi antara wisatawan dan masyarakat berlangsung dengan intensif (sifatnya *direct*).

Sebagaimana negara sedang berkembang lainnya dimana kegiatan pariwisata tidak dilaksanakan secara terencana, semua proses berlangsung secara alamiah dan naluriah (Peppelenbosch dalam Paturusi, 1988). Demikian halnya yang terjadi di Lovina, adalah daerah domisili wisata yang tidak diantisipasi dengan perencanaan dari awal tetapi tumbuh pesat dengan spontan. Pola tata ruang tradisional Bali yang terdapat di masing – masing Desa Adat di Lovina yang terbagi kedalam 3 tingkatan ruang sesuai dengan fungsi dari masing – masing ruang yaitu zona utama, madya dan nista yang merupakan cerminan dari konsep *Tri Hita Karana* dan *Tri angga*, kini sudah mulai mengalami perubahan – perubahan peruntukan ruang sesuai dengan tuntutan dari kegiatan pariwisata.

Dengan keadaan seperti ini terjadi perkawinan fungsi antara fungsi sosial budaya (bahkan seringkali juga fungsi agama) dengan fungsi ekonomi yang tidak selalu dapat berlangsung secara serasi, sehingga meminta pengorbanan dari fungsi dan pengaruh fungsi tersebut pada kehidupan sosial. Salah satu eksis perkawinan fungsional yang sifatnya positif adalah tumbuhnya lapangan pekerjaan baru bagi penduduk setempat yang berarti meningkatkan ekonomi penduduk, menggairahkan kesenian dan kebudayaan, menghidupkan kembali unsur kebudayaan yang sudah hampir dilupakan (Selo Sumarjan, 1974).

Dari segi arsitektur terjadi inovasi dalam disain serta bahan bangunan dengan tetap memperhatikan citra arsitektur tradisional (gambar 1.2).

GAMBAR 1.2
RESTORAN DENGAN PENAMPILAN ARSITEKTUR TRADISIONAL BALI
PADA KAWASAN PARIWISATA LOVINA



Sumber : Dokumen Pribadi, 2002

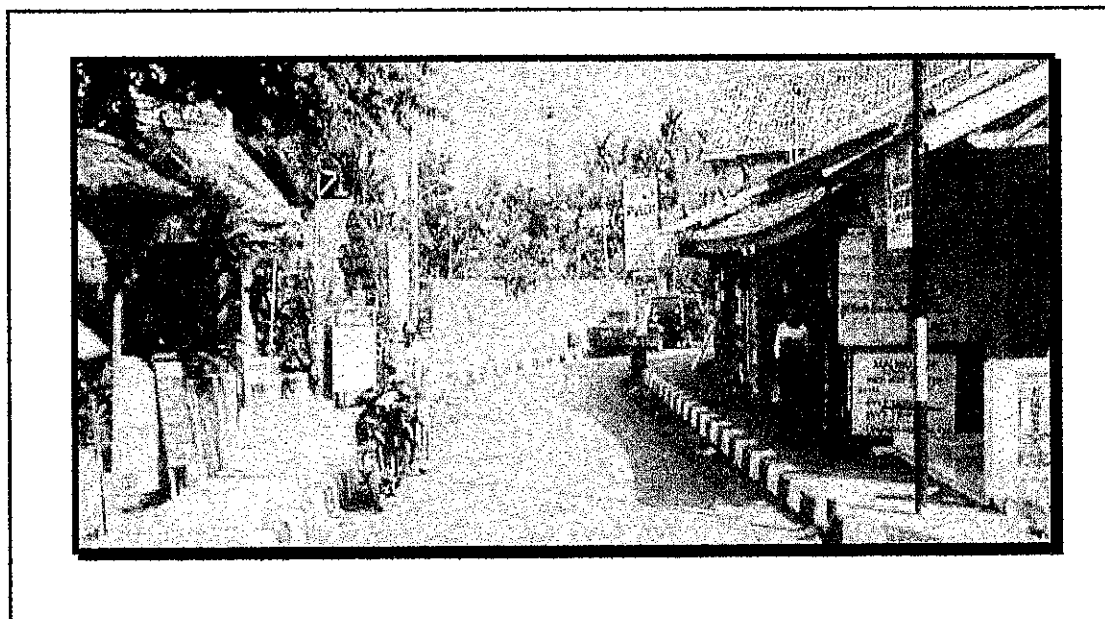
Disisi lain eksekusi yang sifatnya negatif tumbuhnya hotel, *home stay*, *cottage*, *pub*, *diskotik*, *art shop* dan berbagai sarana lainnya yang mengeksploitasi lingkungan semaksimal mungkin.

Bila berbicara mengenai tata ruang tradisional Bali, tidak akan terlepas menyangkut falsafah kepercayaan masyarakat Bali, yang sebagian besar menganut agama Hindu. Karena berpangkal dari kepercayaan inilah diturunkan konsep – konsep yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk salah satunya konsep pengaturan tata ruang. Konsep ini merupakan konsep kosmologis yang berintikan jalan atau cara menuju ke keseimbangan kehidupan makro dan mikro kosmos yang berimplikasi pada tujuan

keselamatan dan kelangsungan hidup manusia (Bagus, 1985). Dengan peran gandanya sebagai permukiman wisatawan, menimbulkan aktivitas – aktivitas baru dan kebutuhan – kebutuhan baru yang selama ini tidak dikenal bahkan sangat asing sekali, hal ini akan menimbulkan suatu pola tata ruang baru yang menggabungkan kedua hal tersebut. Pola tata ruang yang terwujud adalah perwujudan dari pola tata ruang tradisional Bali yang sudah dipengaruhi oleh kegiatan pariwisata. Pola tata ruang seperti ini dinamakan sebagai pola tata ruang *vernakular*.

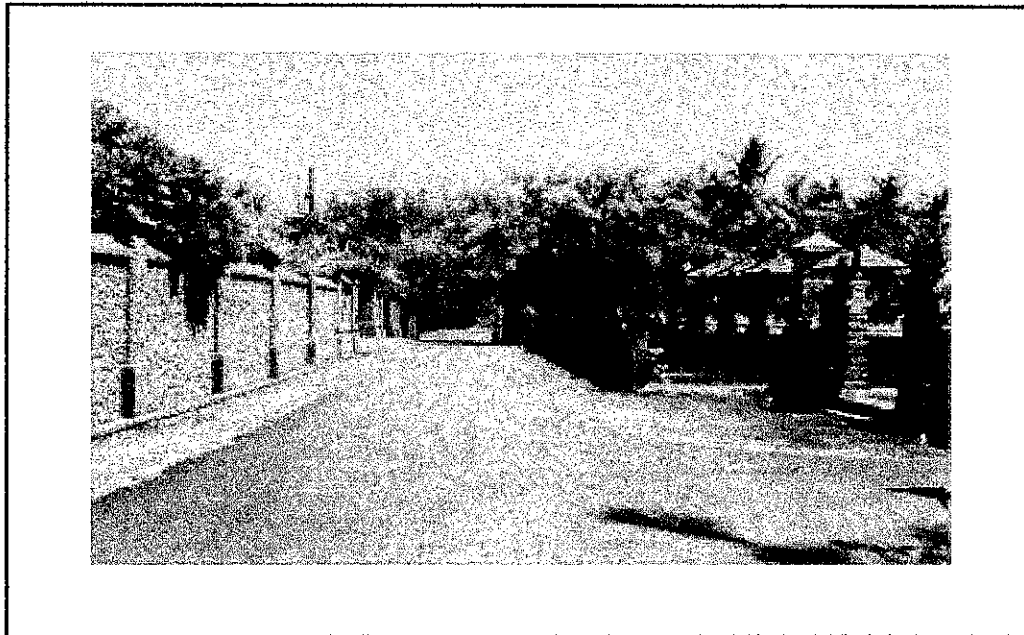
Gejala yang menunjukkan terjadinya suatu pola tata ruang *vernakular* pada kawasan pariwisata Lovina dapat terlihat dengan adanya pemanfaatan ruang untuk fasilitas hotel dan restoran pada wilayah desa adat dan adanya pemanfaatan ruang untuk *art shop* dan fasilitas pariwisata lainnya pada area permukiman penduduk (*palemahan desa*). Seperti terlihat pada gambar 1.3 dan 1.4 berikut :

GAMBAR 1.3
ART SHOP PADA KAWASAN PARIWISATA LOVINA



Sumber : Dokumen Pribadi, 2002

GAMBAR 1.4
LOKASI HOTEL YANG BERDEKATAN DENGAN PURA



Sumber : Dokumen Pribadi, 2002

Perkawinan fungsional kini tidak terelakkan lagi, masalahnya sekarang adalah bagaimana mengeliminir sekecil mungkin pengorbanan sosial yang terjadi tanpa mengurangi arti pentingnya pariwisata sebagai program nasional. Konsep ruang yang telah dilaksanakan secara turun temurun kini harus diantisipasi dengan suatu konsep baru yang bisa mewadahi atau mengakomodasikan kebutuhan wisatawan dan kepentingan masyarakat lokal yang tentunya tidak menyimpang dari ketentuan nilai – nilai tradisional masyarakat Bali.

1.2. Rumusan Masalah

Perkembangan kegiatan pariwisata yang semakin pesat akan menuntut peningkatan penyediaan fasilitas penunjang pariwisata. Ini berarti bahwa tuntutan kebutuhan ruang

untuk kegiatan pariwisata akan semakin meningkat. Kegiatan pariwisata juga akan membawa implikasi yang meluas keseluruh sektor kehidupan masyarakat, dimana terjadi pertemuan antara bermacam – macam kebudayaan yang ada pada setiap suku bangsa di dunia, sehingga akan terjadi perkawinan fungsi antara fungsi sosial budaya dengan fungsi ekonomi yang tidak selalu dapat berlangsung secara serasi. Tata ruang tradisional Bali dengan konsep kosmologis yang berintikan jalan atau cara menuju ke keseimbangan kehidupan makro dan mikro kosmos, akhirnya harus bisa berjalan secara serasi dengan kepentingan – kepentingan wisatawan dengan aktivitas – aktivitas baru. Untuk dapat mengakomodasikan kepentingan wisatawan dan kepentingan masyarakat lokal (masyarakat Bali), perlu kiranya diketahui batas – batas toleransi antara kedua kepentingan tersebut sehingga dengan demikian akan bisa dimunculkan suatu konsep pola tata ruang tradisional yang dapat mengakomodasikan kedua kepentingan yang berbeda tersebut, yaitu suatu pola tata ruang yang berbasis pada pola tata ruang tradisional Bali dan sudah mengalami penyesuaian dan perubahan sesuai dengan tuntutan dari kegiatan pariwisata atau yang dikenal dengan pola tata ruang vernakular.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya adalah :

- ✱ Peningkatan arus kunjungan wisatawan akan meningkatkan aktivitas pariwisata.
- ✱ Aktivitas pariwisata baik aktivitas dari wisatawan, pengusaha pariwisata maupun masyarakat lokal, masing – masing akan menimbulkan adanya kebutuhan ruang yang berpotensi menimbulkan konflik.

- # Tata ruang tradisional Bali belum bisa mengakomodasikan kepentingan wisatawan dan kepentingan pengusaha pariwisata.
- # Perlu suatu konsep pola tata ruang baru yang bisa mengakomodasikan kepentingan wisatawan, pengusaha dan sekaligus juga mewadahi kepentingan masyarakat lokal.

Dari rumusan masalah tersebut dapat dimunculkan suatu pertanyaan mendasar tentang *bagaimana bentuk pola tata ruang vernakular masing – masing desa adat pada kawasan pariwisata Lovina, yang dapat dikembangkan untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat modern.*

1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi

1.3.1. Tujuan Studi

Berdasarkan latar belakang dan Rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari studi ini adalah untuk *merumuskan pola tata ruang vernakular pada pada masing – masing desa adat di kawasan pariwisata Lovina.*

1.3.2. Sasaran Studi

Untuk mencapai tujuan studi, maka yang menjadi sasaran dari studi ini adalah :

- # Mengidentifikasi zonasi dari masing – masing Desa Adat di kawasan pariwisata Lovina berdasarkan zona *utama, madya dan nista.*
- # Menentukan parameter yang mempengaruhi keberadaan pola tata ruang tradisional Bali dari sisi masyarakat pada masing – masing Desa Adat di kawasan pariwisata Lovina.

- # Menentukan parameter yang mempengaruhi perubahan pola tata ruang tradisional Bali dari sisi wisatawan dan pengusaha, pada masing – masing Desa Adat di kawasan pariwisata Lovina.
- # Menentukan arahan pengembangan kawasan dengan menetapkan standar pola tata ruang vernakular pada kawasan pariwisata Lovina.

1.3.3. Manfaat Studi

Manfaat dari studi ini adalah untuk menentukan suatu pola tata ruang vernakular pada kawasan pariwisata Lovina pada saat ini, dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Propinsi Bali.

1.4. Ruang Lingkup Studi

1.4.1. Lingkup Substansial

Dengan maksud memperjelas dan mempersempit permasalahan yang dibahas, maka perlu kiranya untuk membatasi permasalahan dengan mengidentifikasi variabel *pariwisata, tata ruang tradisional Bali dan tata ruang vernakular* yang menyangkut pengertian dasar dan aspek – aspeknya sehingga akan menghasilkan suatu konsep umum yang dilandasi pertimbangan teori dan konsep dari pariwisata, tata ruang tradisional Bali dan tata ruang vernakular. Berdasarkan uraian tersebut maka lingkup substansial dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Pariwisata

- Motivasi wisatawan berkunjung ke daerah tujuan pariwisata (kawasan pariwisata Lovina).

- Motivasi pengusaha pariwisata dalam pembangunan fasilitas akomodasi pariwisata di kawasan pariwisata Lovina.

2. Variabel tata ruang vernakular

Tata ruang vernakular merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang berdasarkan pengetahuan tradisional dan budaya setempat, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan jaman serta diwujudkan tidak berdasarkan rekayasa disain.

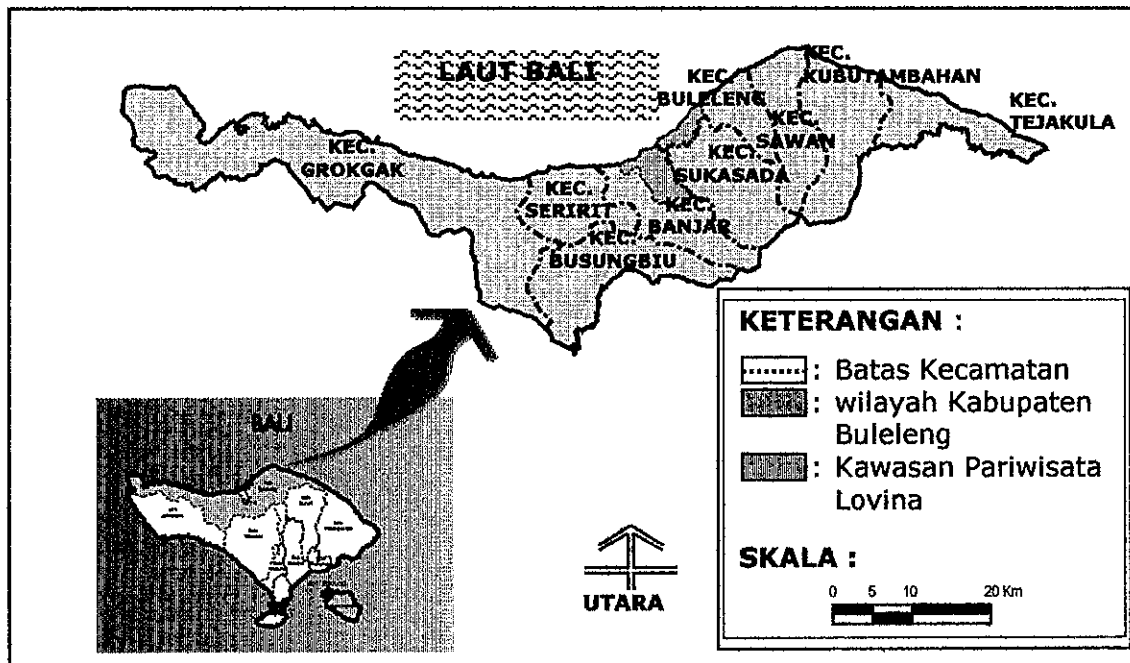
3. Variabel tata ruang tradisional Bali

- Meliputi konsepsi tata ruang tradisional Bali, yaitu konsep *Tri Hita Karana* yang dijabarkan kedalam konsep ruang yaitu konsep *Tri angga (utama, madya, nista)*
- Aspek – aspek tata ruang tradisional Bali yang meliputi aspek sosial, aspek simbilik, aspek morfologis dan aspek fungsional.

1.4.2. Lingkup Spasial

Lokasi penelitian adalah pada Kawasan Pariwisata Lovina. Karena Kawasan Pariwisata Lovina merupakan suatu kawasan pariwisata yang sedang berkembang, merupakan lokasi permukiman tradisional serta merupakan lokasi domisili wisatawan. Kawasan pariwisata Lovina termasuk wilayah Bali Utara yang secara geografis berada pada posisi 08°08'40" Lintang Selatan dan 214°58'12" Bujur Timur (gambar 1.1). Sedangkan secara administrasi termasuk wilayah administratif Kabupaten Buleleng, seperti terlihat pada gambar 1.5 berikut.

GAMBAR 1.5
WILAYAH KABUPATEN BULELENG



Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2000

Berdasarkan SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 528 tahun 1993, kawasan pariwisata Lovina meliputi 7 Desa Dinas yaitu : Desa Kalibukbuk, Desa Pemaron, Desa Tukad Mungga dan Desa Anturan (Kecamatan Buleleng), Desa Kaliasem, Desa Temukus dan Desa Tigawasa (Kecamatan Banjar).

Dalam penelitian ini secara khusus akan melihat pada tingkatan *desa adat* (suatu kesatuan wilayah tempat para warganya secara bersama – sama mengonsepsikan dan mengaktifkan upacara – upacara dan berbagai kegiatan sosial yang ditata oleh suatu sistem budaya) yaitu pada masing – masing desa adat yang ada pada kawasan pariwisata Lovina. Pada kawasan pariwisata Lovina terdapat 8 *Desa Adat* yaitu Desa Adat Kalibukbuk, Desa Adat Banyualit, Desa Adat Pemaron, Desa Adat Tukad Mungga, Desa Adat Anturan, Desa Adat Kaliasem, Desa Adat Temukus dan Desa Adat Tigawasa.

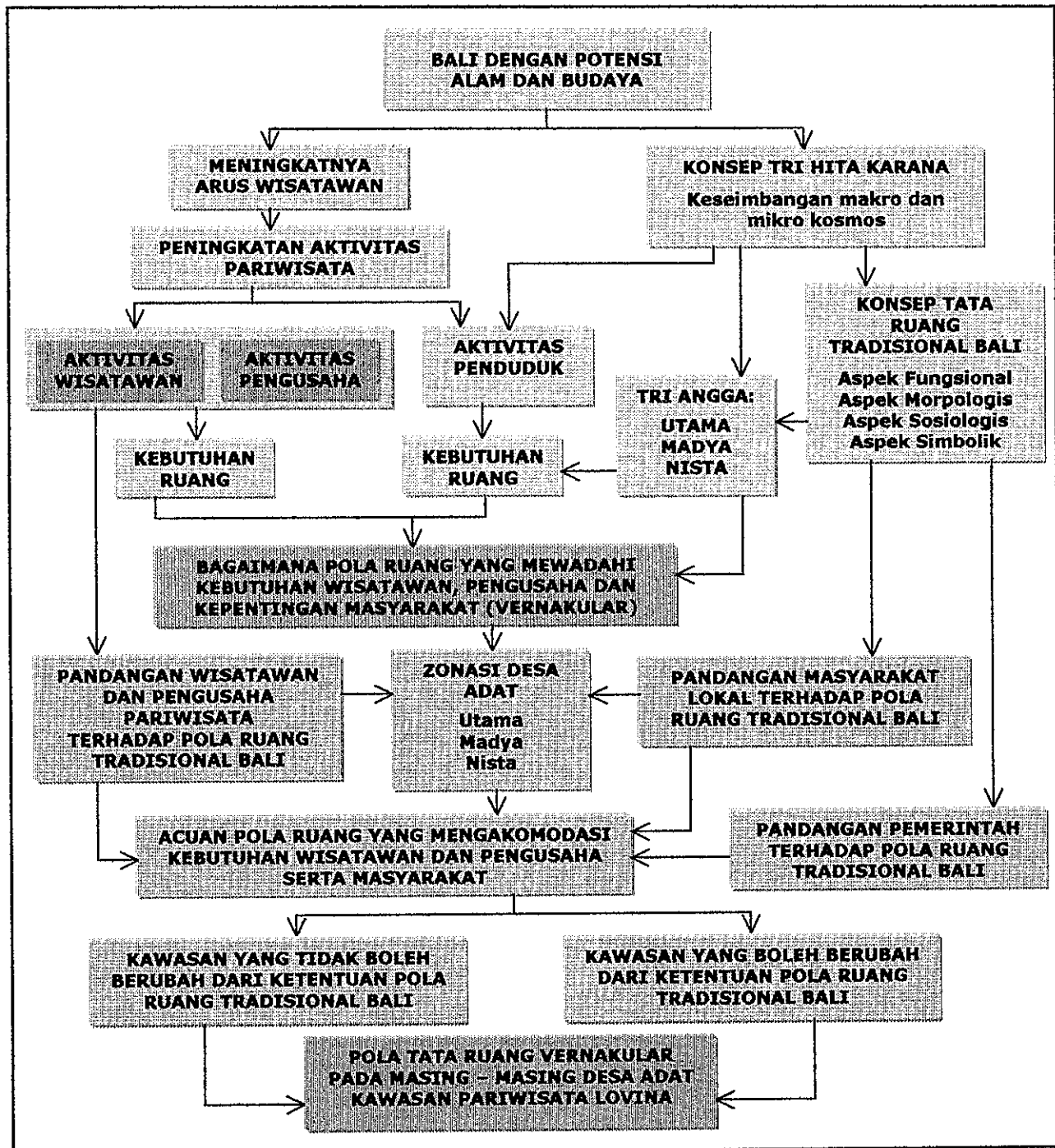
1.5. Kerangka Pemikiran Studi

Bali dengan potensi alam dan budaya yang dimiliki merupakan suatu aset yang menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara, sehingga daya tarik tersebut akan sangat berpotensi untuk meningkatkan arus wisatawan. Dengan meningkatnya arus wisatawan akan menuntut dan mengakibatkan adanya peningkatan aktivitas pelayanan dengan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung berupa pembangunan fisik maupun peningkatan produk dan pelayanan kepariwisataan yang tentunya akan mengakibatkan adanya aktivitas kepariwisataan baik aktivitas dari wisatawan, pengusaha pariwisata maupun aktivitas dari penduduk setempat didalam memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Dengan adanya peningkatan aktivitas akan menimbulkan adanya peningkatan kebutuhan akan ruang baik kebutuhan ruang bagi wisatawan maupun bagi masyarakat lokal.

Dilain pihak salah satu potensi budaya di Bali adalah adanya konsep tata ruang kosmologis yang merupakan acuan pola tata ruang masyarakat Bali. Pola tata ruang tradisional dari masyarakat dengan konsep kosmologis yang berintikan jalan atau cara menuju ke keseimbangan kehidupan makro dan mikro kosmos, akhirnya harus bisa mengakomodasikan kepentingan – kepentingan wisatawan dengan aktivitas dan kebutuhan baru yang selama ini tidak dikenal bahkan sangat asing sekali. Untuk dapat mengakomodasikan kepentingan wisatawan dan kepentingan masyarakat lokal (masyarakat Bali), perlu kiranya suatu konsep pola tata ruang yang dapat mengakomodasikan kedua kepentingan yang berbeda tersebut serta tidak menyimpang dari ketentuan nilai – nilai tradisional masyarakat Bali (pola tata ruang vernakular).

Sesuai dengan uraian diatas maka Kerangka pemikiran dari studi ini dapat digambarkan seperti diagram berikut (gambar 1.6).

GAMBAR 1.6
KERANGKA PEMIKIRAN STUDI



1.6. Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Studi

1.6.1. Pendekatan Studi

Untuk mendapatkan suatu konsep pola tata ruang vernakular pada kawasan pariwisata Lovina maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan/fenomena yang di temukan di lapangan, kemudian fenomena tersebut dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan. Adapun langkah – langkah yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

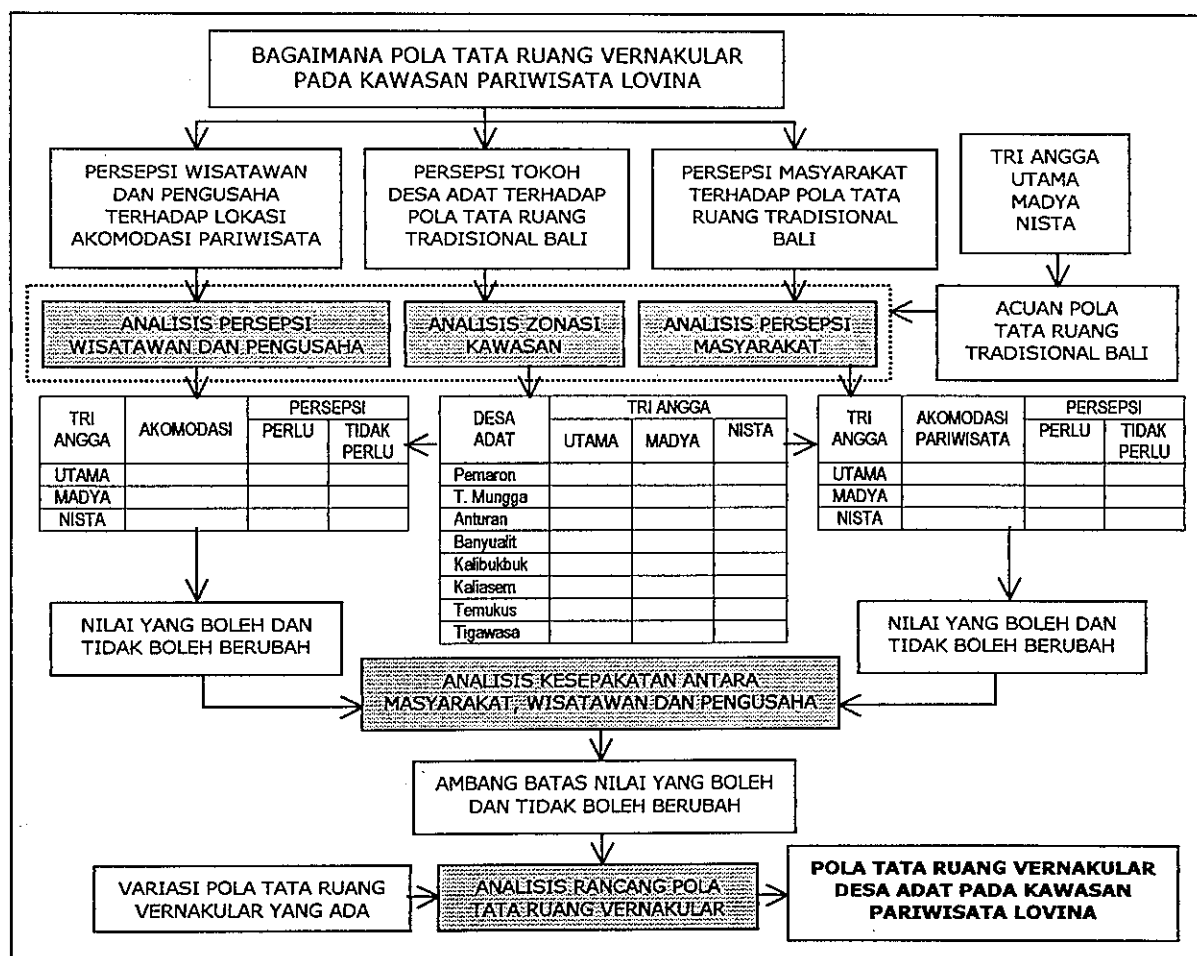
- a. Merumuskan zonasi masing – masing desa adat yang ada pada kawasan pariwisata Lovina, dengan klasifikasi zona utama, madya dan nista. Zonasi kawasan ini merupakan kesepakatan yang dibentuk melalui matriks dengan mengkaji persepsi dari tokoh desa adat.
- b. Mengkaji persepsi masyarakat mengenai syarat – syarat letak fasilitas pariwisata dan atribut desa adat pada masing – masing zona (utama, madya, nista) di setiap desa adat pada kawasan pariwisata Lovina. Persepsi didapat dengan metode wawancara/kuesioner. Parsepsi masyarakat yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan matrik silang.
- c. Mengkaji persepsi wisatawan dan pengusaha mengenai letak fasilitas pariwisata pada masing – masing zona (utama, madya, nista) di setiap desa adat pada kawasan pariwisata Lovina. Persepsi didapat dengan metode wawancara / kuesioner. Parsepsi wisatawan dan persepsi pengusaha yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan matrik silang.

- d. Menentukan kesepakatan dari masyarakat, wisatawan dan pengusaha mengenai fasilitas akomodasi pariwisata yang bisa diterima pada masing – masing zona.
- e. Menentukan rancangan pola tata ruang vernakular pada masing – masing desa adat dengan menggunakan analisis interpretasi rancang pola tata ruang.

1.6.2. Metode Analisis

Analisis yang dilakukan dengan menggunakan beberapa metode analisis. Adapun kerangka pikir dari analisis yang dilakukan adalah seperti pada gambar 1.7.

GAMBAR 1.7
KERANGKA PIKIR ANALISIS



Dalam penelitian ini dilakukan 5 jenis analisis yaitu (1). Analisis zonasi kawasan desa adat, (2). Analisis persepsi masyarakat, (3) Analisis persepsi wisatawan dan persepsi pengusaha, (4). Analisis kesepakatan masyarakat, wisatawan dan pengusaha (5). Analisis rancang pola tata ruang vernakular. Secara lebih jelas pada poin berikut akan dijelaskan secara lebih terperinci dari masing – masing analisis tersebut.

a. Analisis Zonasi Kawasan Desa Adat

Untuk mendapatkan zonasi kawasan desa adat pada kawasan pariwisata Lovina digunakan analisis Matrik Silang yang melihat zona utama, madya dan nista pada masing – masing desa adat. Zona utama, madya atau nista ditentukan dengan melihat komponen atribut desa adat yang ada pada masing – masing desa adat menurut persepsi dari tokoh desa adat. Sebelum penentuan zona untuk masing – masing desa adat terlebih dahulu ditentukan komponen – komponen atribut desa adat yang termasuk utama, madya atau nista. Setelah diketahui atribut – atribut desa adat yang termasuk utama, madya atau nista baru kemudian ditentukan wilayah/zona dari masing – masing desa adat yang termasuk zona utama, madya atau nista dengan menganalisa persepsi dari tokoh desa adat. Hal ini dapat digambarkan dan disajikan dalam bentuk tabel seperti pada tabel I.2.

TABEL I.2
TABEL PENENTUAN ZONASI DESA ADAT

DESA ADAT	TRI ANGGA		
	UTAMA	MADYA	NISTA
Desa Adat Pemaron			
Desa Adat Tukad Mungga			
Desa Adat Anturan			
Desa Adat Banyualit			
Desa Adat Kalibukbuk			
Desa Adat Kaliasem			
Desa Adat Temukus			
Desa Adat Tigawasa			

b. Analisis Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat mengenai syarat – syarat letak fasilitas pariwisata dan atribut desa adat pada masing – masing zona (utama, madya, nista) di setiap desa adat pada kawasan pariwisata Lovina. Persepsi masyarakat yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan matrik silang, sehingga bisa menggambarkan hal – hal pokok (nilai – nilai tata ruang tradisional Bali yang harus tetap ada dan dipertahankan) dan hal – hal yang tidak pokok (nilai – nilai tata ruang tradisional Bali yang boleh tidak ada), serta didapatkan fasilitas akomodasi pariwisata yang bisa diterima pada masing – masing zona dalam desa adat.

c. Analisis Persepsi Wisatawan dan Pengusaha

Persepsi dari wisatawan dan pengusaha dianalisis dengan matriks silang yang melihat keinginan dari wisatawan dan pengusaha mengenai perletakan fasilitas akomodasi pariwisata pada masing – masing zona desa adat, sehingga didapatkan posisi fasilitas akomodasi pariwisata yang dapat diterima oleh wisatawan dan pengusaha.

d. Analisis Kesepakatan Masyarakat, Wisatawan dan Pengusaha

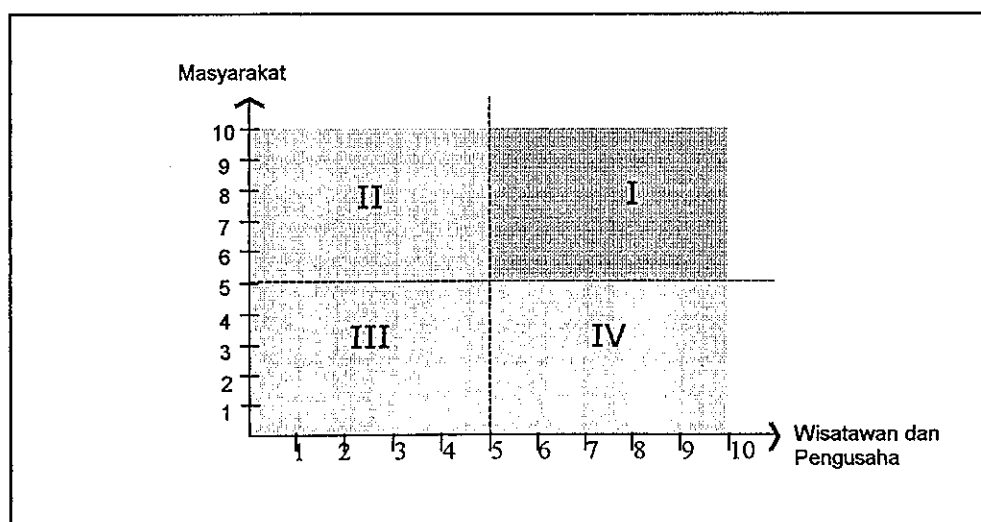
Setelah didapatkan zonasi dari masing – masing desa adat dan diketahui lokasi dari fasilitas akomodasi pariwisata menurut masyarakat desa adat serta wisatawan dan pengusaha kemudian dicari ambang batas toleransi yang merupakan suatu kesepakatan antara masyarakat, wisatawan dan pengusaha. Dalam analisis ambang batas, dibuat range penilaian terhadap prosentase pendapat dari responden. Pendapat responden dari 0% - 100% dibagi dalam 10 range dengan nilai 1 sampai 10, seperti pada tabel 1.3 berikut :

TABEL 1.3
PENENTUAN RANGE PENDAPAT RESPONDEN

RANGE PROSENTASE PENDAPAT RESPONDEN	NILAI	KETERANGAN
0-10%	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai 5 sebagai ambang batas kesepakatan
11-20%	2	
21-30%	3	
31-40%	4	
41-50%	5	
51-60%	6	
61-70%	7	
71-80%	8	
81-90%	9	
91-100%	10	

Untuk bisa menentukan suatu kesepakatan antara masyarakat, wisatawan dan pengusaha, dipakai batasan minimal yang bisa diterima oleh responden (masyarakat, wisatawan dan pengusaha), pada nilai 5 adalah ambang batas minimal yang bisa diterima oleh responden, Kesepakatan yang terjadi dapat digambarkan seperti gambar 1.8 berikut :

GAMBAR 1.8
GRAFIK KESEPAKATAN PERSEPSI RESPONDEN



Dari gambar 1.8 dapat di simpulkan apabila berada pada kuadran I adalah merupakan daerah pengembangan pariwisata artinya terjadi kesepakatan dari semua responden (masyarakat, wisatawan dan pengusaha), kuadran II dan IV merupakan daerah pengembangan terbatas artinya ada sebagian komponen yang tidak setuju, sedangkan pada kuadran III adalah merupakan daerah lindung yang tidak dipergunakan untuk kegiatan pembangunan fasilitas akomodasi pariwisata.

e. Analisis Rancang Pola Tata Ruang Vernakular

Untuk menentukan rancangan pola tata ruang vernakular yang diusulkan (mengakomodasi kepentingan wisatawan, pengusaha dan kepentingan masyarakat) akan menggunakan analisis interpretasi dimana gambaran pola tata ruang eksisting akan di kaitkan dengan kesepakatan dari masyarakat, wisatawan dan pengusaha tentang fasilitas akomodasi pariwisata pada masing – masing zona sehingga akan didapatkan gambaran rancangan pola tata ruang vernakular untuk masing – masing desa adat.

1.6.3. Data dan Cara Mendapatkannya

a. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

▪ Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah berupa persepsi wisatawan dan pengusaha mengenai letak fasilitas pariwisata yang diinginkannya serta persepsi masyarakat mengenai syarat – syarat letak fasilitas pariwisata dan atribut desa

adat di setiap desa adat pada kawasan pariwisata Lovina yang terkena pengaruh pariwisata. Disamping itu juga diperlukan data mengenai letak fasilitas umum (atribut desa adat) yang ada pada masing – masing desa adat pada kawasan pariwisata Lovina.

▪ Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan nusantara, pengusaha yaitu pengusaha yang bergerak dalam bidang kepariwisataan, serta masyarakat pada kawasan pariwisata Lovina dalam hal ini adalah masyarakat yang menjadi anggota desa adat (*krama desa*).

b. Teknik Mendapatkan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode observasi langsung di lapangan dan wawancara/kuesioner. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar/pedoman wawancara yang sudah disiapkan (terlampir). Wawancara dilakukan dengan stake holders yang terkait dengan kegiatan pariwisata dan tata ruang tradisional Bali.

c. Teknik Sampling

Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan metode sample bertujuan (*purposive sample*). Artinya responden yang akan dijadikan sampel adalah responden yang dianggap betul-betul mengetahui permasalahan penelitian (Nawawi, 2001). Respondennya

dari unsur desa adat (tokoh desa adat dan warga desa adat), pengusaha, wisatawan serta pemerintah. Jumlah responden dari masing – masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- Tokoh desa adat, yang termasuk dalam tokoh desa adat adalah kelian desa adat, petugas PHDI, TPL agama, serta orang yang dianggap tokoh/pemuka didalam desa adat. Sehingga dari unsur tokoh desa adat akan diambil responden minimal 4 orang dari masing – masing desa adat, sehingga untuk seluruh desa adat di kawasan pariwisata Lovina (8 desa adat) jumlah responden adalah minimal 32 responden.
- Unsur warga desa adat adalah warga inti dari masing – masing desa adat. Jumlah responden yang akan diambil adalah sebanyak 5% dari jumlah kepala keluarga (warga inti desa adat) sehingga jumlah responden untuk setiap desa adat jumlahnya tidak sama, tergantung dari jumlah warga inti dari masing – masing desa adat.
- Unsur pengusaha/swasta adalah pengusaha Hotel/Restoran dan pengusaha lain yang mendukung pariwisata seperti art shop, diving, diskotik, dan sebagainya serta pengurus PHRI. Responden yang akan diambil adalah menurut jumlah fasilitas wisata di kawasan pariwisata Lovina, dengan jumlah responden sebanyak 20% dari jumlah pengusaha di Lovina.
- Sedangkan wisatawan adalah wisatawan yang datang ke kawasan pariwisata Lovina pada saat pelaksanaan penelitian, baik wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Jumlah responden minimal adalah 10% dari jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan pariwisata Lovina rata – rata dalam satu hari pada tahun 2001.

Secara rinci mengenai jumlah responden untuk masing – masing unsur (tokoh desa adat, masyarakat desa adat, wisatawan dan pengusaha dapat dilihat pada lampiran.

1.7. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan tesis ini disusun menjadi 5 bab yang masing – masing bab berisikan antara lain :

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran studi, manfaat studi, ruang lingkup studi, kerangka pemikiran studi serta pendekatan dan metode pelaksanaan studi.

Bab II berisi tinjauan teoretik untuk memberikan gambaran awal terhadap permasalahan umum yang dikemukakan pada bab I. Secara umum dikemukakan beberapa teori dan konsepsi yang menyangkut pariwisata, pola tata ruang vernakuler dan pola tata ruang tradisional Bali serta beberapa hasil studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menyangkut ketiga hal tersebut. Pada bagian akhir dari bab II disajikan kerangka teori dan pertanyaan penelitian.

Bab III berisi gambaran umum kawasan pariwisata Lovina, yang menggambarkan mengenai letak geografis dan batas administrasi dari masing – masing desa adat pada kawasan pariwisata Lovina, distribusi dan kepadatan serta mata pencaharian penduduk, fasilitas pariwisata serta kunjungan wisatawan ke kawasan pariwisata Lovina, penggunaan lahan pada kawasan pariwisata Lovina, serta gambaran mengenai pola – pola desa adat yang ada pada kawasan pariwisata Lovina.

Bab IV berisi mengenai analisis dari data yang sudah didapatkan baik data skunder maupun data primer. Analisis yang dilakukan dalam bab IV terdiri dari 5 analisis yaitu (1) analisis zonasi desa adat, (2) analisis persepsi masyarakat desa adat, (3) analisis

persepsi wisatawan dan pengusaha, (4) analisis kesepakatan masyarakat, wisatawan dan pengusaha (5) analisis rancang pola tata ruang vernakular.

Bab V berisi mengenai kesimpulan dari data dan analisis yang telah dilakukan pada bab – bab sebelumnya, serta rekomendasi yang bisa dimunculkan.

BAB II

KAJIAN TEORETIK PARIWISATA, TATA RUANG VERNAKULAR DAN TATA RUANG TRADISIONAL BALI

2.1. Konsepsi Umum Pariwisata dan Studi Dampaknya

2.1.1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata dapat diartikan sebagai suatu hubungan dan fenomena yang timbul dari adanya kegiatan perjalanan dan kegiatan tinggal disuatu tempat untuk sementara dari sekelompok orang dengan tujuan utama mencari kesenangan atau maksud-maksud rekreasi lain (Sari,1998).

Pariwisata adalah merupakan suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata – mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. (Sihite, 2000).

Pariwisata adalah istilah yang diberikan pada aktivitas yang terjadi bila seorang wisatawan melakukan perjalanan. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari perencanaan perjalanan itu sendiri, perjalanan ketempat tertentu, tinggal ditempat itu, kembali, dan kenangan yang didapat sesudahnya. Itu juga meliputi aktivitas perjalanan yang dilakukan sebagai bagian dari perjalanan itu sendiri, pembelian – pembelian yang dilakukan, dan interaksi yang terjadi antara pihak tuan rumah dan tamunya. Lengkapnya, pariwisata

adalah semua aktivitas dan kejadian yang terjadi ketika seorang pengunjung melakukan perjalanan. (Mill, 2000).

Pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Sedangkan yang dimaksud dengan wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya, atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya (Soekadijo, 2000).

Sedangkan menurut ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (pasal 1), yang dimaksud dengan Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata (kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata), termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait di bidang tersebut.

Dari beberapa pengertian mengenai pariwisata dapatlah dilihat bahwa pariwisata pada hakekatnya mengandung 4 hal pokok yaitu :

- ✦ Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu
- ✦ Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain
- ✦ Perjalanan itu harus dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi.
- ✦ Orang yang melakukan perjalanan wisata itu tidak mencari nafkah di tempat tersebut.

2.1.2. Klasifikasi dan Aspek Tata Ruang Pariwisata

Setelah diketahui dasar pemikiran tentang definisi pariwisata, maka berikut ini akan diuraikan mengenai klasifikasi dan aspek tata ruang pariwisata untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pariwisata.

2.1.2.1. Klasifikasi Pariwisata

Didalam klasifikasi pariwisata ini akan di uraikan mengenai atraksi dan motif pariwisata serta bentuk dan jenis pariwisata.

a. Motif dan Atraksi Pariwisata

Untuk menjalani hidupnya menurut alam, manusia dibekali dengan kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan fisik, psikis dan sosial. Diantara kebutuhan psikis dapat disebut hasrat ingin tahu, hasrat untuk menyelidiki, kebosanan yang menimbulkan keinginan untuk mencari kesenangan dan lain – lainnya. Sifat – sifat pembawaan manusia tersebut ada relevansinya dengan perjalanan pariwisata, dimana manusia akan bergerak mencari tempat – tempat dimana hasratnya dapat dipenuhi. Hasrat pembawaan dalam bentuknya yang kongkrit, yang berupa keperluan atau dorongan atau alasan tertentu itulah yang dimaksud dengan *motif perjalanan*. Motif perjalanan itu dapat disebut *motif pariwisata*, sedang apa yang diharapkan akan dapat memenuhi keperluan atau motif itu disebut *atraksi pariwisata*. (Soekadijo, 2000)

– Motif pariwisata

Menurut McIntosh dalam Soekadijo (2000), motif pariwisata secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu :

- ✱ *Motif fisik*, yaitu motif yang berhubungan dengan kebutuhan badaniah seperti olah raga, istirahat, kesehatan, dan sebagainya.
- ✱ *Motif budaya*, yaitu : yang berhubungan dengan kebiasaan, kehidupan sehari – hari, kebudayaan yang berupa bangunan, musik, tarian dan sebagainya.

- ✦ *Motif interpersonal*, yaitu yang berhubungan dengan keinginan untuk bertemu dengan keluarga, teman, tetangga, tokoh – tokoh terkenal dan sebagainya.
- ✦ *Motif status* atau *motif prestise*, adalah anggapan bahwa orang yang pernah mengunjungi tempat – tempat lain merasa naik gengsinya atau statusnya.

Selanjutnya Soekadijo (2000) mengembangkan motif – motif pariwisata menjadi kelompok – kelompok motif yang lebih kecil seperti : motif bersenang – senang atau tamasya, motif kebudayaan, motif olahraga, motif bisnis, motif konvensi, motif spiritual, motif interpersonal, motif kesehatan serta motif sosial.

– Atraksi pariwisata

Suatu tempat hanya dapat menjadi tujuan wisata kalau kondisinya sedemikian rupa, sehingga ada yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata, sedangkan atraksi wisata tersebut sudah tentu harus sesuai atau sejalan dengan motif perjalanan wisata.

Menurut Soekadijo (2000) modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga yaitu : *alam*, *kebudayaan*, dan *manusia* itu sendiri. Sedangkan atraksi pariwisata dari sifatnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- ✦ *Atraksi penahan*, yaitu : pariwisata yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menahan wisatawan selama sehari – hari dan dapat berkali – kali dinikmati.
Contoh pantai Kuta
- ✦ *Atraksi Penangkap*, yaitu : yang hanya sekali dinikmati kemudian ditinggalkan lagi oleh wisatawan. Contoh Candi Borobudur.

Sedangkan Mariotti (dalam Yoeti, 1985) mengklasifikasikan tiga jenis atraksi pariwisata yaitu :

- ✦ *Wisata alam*, yang berkaitan dengan benda – benda yang tersedia di alam semesta. Yang termasuk kedalam kelompok ini adalah : *Iklim*, (cuaca cerah, sunny day, sejuk, kering, panas, hujan dan lain – lain), Bentuk tanah dan pemandangan, Hutan belukar, Flora dan fauna, Pusat – pusat kesehatan (sumber air panas, sumber air mineral)
- ✦ *Ketersediaan binaan*, berkaitan dengan benda – benda bersejarah, kebudayaan dan keagamaan (monumen, candi, pura, handicraft dan lain - lain)
- ✦ *Tata cara hidup*, berkaitan dengan tata cara hidup tradisional suatu masyarakat, kebiasaan hidup, adat istiadat.

b. Bentuk dan Jenis Pariwisata

Pendit (1999) mengemukakan bentuk – bentuk pariwisata dapat dibagi menurut beberapa kategori antara lain :

- ✦ *Menurut asal wisatawan*, asal wisatawan bisa dari dalam negeri (*pariwisata domestik*) atau berasal dari luar negeri (*pariwisata internasional*)
- ✦ *Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran*, wisatawan yang datang kesuatu negara dengan membawa mata uang asing akan memberikan pengaruh positif bagi neraca pembayaran luar negeri negara yang dikunjungi (*pariwisata aktif*), sedangkan kepergian seorang warganegara ke luar negeri memberikan efek negatif terhadap neraca pembayaran luar negeri negaranya (*pariwisata pasif*)
- ✦ *Menurut jangka waktu*, menurut waktu lamanya wisatawan tinggal di tempat atau negara yang bersangkutan (*pariwisata jangka pendek* dan *pariwisata jangka panjang*)

- ✦ Menurut jumlah wisatawan, bisa berupa *pariwisata tunggal* ataupun *pariwisata rombongan*.
- ✦ Menurut alat angkut yang dipergunakan, bisa berupa pariwisata udara, laut, udara.

2.1.2.2. Aspek Tata Ruang Pariwisata

Analisa sistematis pola tata ruang untuk kegiatan pariwisata dirintis oleh Miossec (1976) dalam Putra (1999) yang mengemukakan evolusi struktur kawasan pariwisata dalam konteks kaitan waktu dan ruang. Ada empat elemen dasar model Miossec yaitu : (1). Daerah tujuan wisatawan (*Resorts*), (2). Jaringan transportasi (*Transport Network*), (3). Perilaku wisatawan (*The behaviour of tourists*), (4). Kebijakan Pemerintah.

Keempat elemen dasar ini saling berkait dan bergantung satu dengan yang lainnya. Kerangka umum model Miossec mengacu pada beberapa hal pokok. *Pertama*, elemen – elemen ini merupakan suatu yang dinamis dalam konteks ruang dan waktu. Dengan demikian dalam penganalisaannya dibutuhkan adanya proses sebelum dan sesudah adanya suatu kegiatan. *Kedua*, elemen model ini harus dilihat secara menyeluruh dalam proses evaluasinya; perubahan perilaku wisatawan dan penduduk akan berpengaruh pada pertumbuhan tempat domisili wisatawan dan jaringan transportasi. Namun demikian masing – masing dari keempat elemen ini mempunyai kecepatan berubah yang berbeda. Hal ini tergantung dari sektor mana pengaruh tersebut dominan. (Putra, 1999).

2.1.3. Perkembangan Teori dan Konsep Pariwisata

Perkembangan kegiatan pariwisata sebagai idea sudah dikenal oleh bangsa Sumeria di Babylonia kira – kira 4000 BC, ketika saat itu ditemukan uang sebagai alat

pembayaran dan majunya perdagangan yang mendorong terjadinya perpindahan dan perjalanan.

Selanjutnya perkembangan pariwisata sangat dipengaruhi oleh perkembangan sarana dan prasarana transportasi. Di Tiongkok pada Dinasti Chou (221 – 122 BC), penduduk telah melakukan perjalanan darat ketika jalan raya pertama dibuat. Hal yang sama terjadi di Persia pada 560 – 530 BC. Ketika sarana transportasi makin berkembang, jarak perjalanan semakin jauh, seperti yang dilakukan oleh Pangeran Hendry dari Portugal (1394 – 1460), Columbus (1451 – 1506), d'Albuquerque, Vasco de Gama, Magelhaens di akhir abad XV.

Perjalanan perorangan maupun bersama yang diatur secara lebih terencana dan terorganisir (pariwisata) menjadi populer terutama di Eropa sejak abad XIX, yaitu bersamaan dengan masa perkembangan teknologi modern (mesin uap) yang mendukung sarana transportasi. (Budhisantoso, dalam Putra, 1999).

Fenomena pariwisata sebagai hal yang berkaitan dengan tata ruang pertama kali dirintis oleh para Geographer setengah abad yang lalu. Para Geographer Amerika saat itu melihat pariwisata sebagai suatu kenyataan dan bentuk signifikasi dari penggunaan tanah (McMurray, 1930; Brown, 1935) yang cenderung pada aspek ekonomi pariwisata (Carlson, 1938). Pakar lain melihat pariwisata sebagai peubah *landscape* dan memberi arahan baru pada bentuk kota/*urban form* (Jones, 1933; Eiselen, 1945). Kemudian para pakar Inggris pada masa itu memberikan kontribusi besar, khususnya penelitian oleh Gilbert yang melakukan penelitian *morphology* pada daerah wisata pedalaman (*inland*) dan dipinggir pantai. Pariwisata sebagai suatu studi regional yang dikenal sekarang ini dirintis oleh pakar Perancis Miegge (1933) dengan obyek studinya di kawasan wisata Savoy Perancis. Menurut

Miege, pariwisata mempunyai dua aspek penting bagi tata ruang, yaitu: aspek pergerakan manusia dan aspek sumber daya wilayah (regional). Kemudian menjelang perang dunia, suatu studi penting lainnya dilakukan oleh pakar Jerman Foster (1939) yang meneliti mengenai distribusi dan pengalokasian berbagai macam kegiatan pariwisata di Reisingebirge. (Pearce, 1983 dalam Paturusi, 1988).

Meskipun kajian pariwisata telah dilakukan pada masa sebelum perang dunia, namun studi pariwisata yang berkaitan dengan tata ruang ini dilakukan secara intensif pada tahun 1960 di Eropa dan 1970 di Amerika Utara. Pada saat yang sama, pariwisata semakin meluas kajiannya pada berbagai macam disiplin, seperti ilmu ekonomi, management, sosiologi dan anthropologi. Perkembangan ini tidak lepas dari perkembangan pariwisata itu sendiri setelah perang dunia (Pearce, 1983 dalam Paturusi, 1988).

Meskipun kajian kepariwisataan telah dilakukan dari berbagai macam disiplin keilmuan, namun dari sudut kajian yang berkaitan dengan tata ruang, baik dalam materi substansi dan metodologinya masih sangat kurang. Namun demikian secara garis besarnya ada 6 (enam) kajian pokok yang berkaitan dengan tata ruang pariwisata, yaitu : (1). Studi pola spasial dari *supply*, (2). Studi pola spasial dari *demand*, (3). Studi lokasi daerah tujuan wisata, (4). Studi pergerakan dan arus wisatawan, (5). Studi dampak pariwisata, (6). Studi model ruang pariwisata. Keenam pokok kajian diatas pada dasarnya berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

2.1.4. Dampak Perkembangan Pariwisata

Perkembangan kegiatan pariwisata yang diawali dengan naluri manusia untuk mengadakan perjalanan, yang mengakibatkan peranan pariwisata semakin berkembang.

Peranan pariwisata setidaknya ada 3 hal, yaitu : peranan ekonomi (sebagai sumber devisa), peranan sosial (penciptaan tenaga kerja) dan peran kebudayaan dalam memperkenalkan kebudayaan dan kesenian (Hari Hartono dalam Paturusi, 1988).

Dengan semakin luasnya wawasan peranan pariwisata tersebut maka dampaknya akan semakin luas pula. Namun demikian menurut Pearce (dalam Paturusi, 1988) secara garis besarnya ada 3 konteks kajian dampak pariwisata, yaitu : (1). Studi dampak terhadap ekonomi, (2). Studi dampak terhadap lingkungan (*environment*), (3). Studi dampak sosial budaya masyarakat (*society*).

a. Dampak Pariwisata Terhadap Aspek Ekonomi

Untuk mengkaji dampak pariwisata terhadap aspek ekonomi dan beberapa faktor penting yang harus diperhatikan adalah : ukuran, keaneka ragaman dan vitalitas ekonomi pada berbagai tingkat skala nasional, regional dan lokal. Masalah ekonomi yang dapat dipertanyakan adalah apakah sudah berkembang, sedang berkembang atau terjadi penurunan. Secara lebih luas apakah faktor ekonomi ini merupakan sektor tunggal, sektor kuat atau tergantung dengan sektor yang lain. Pariwisata dalam sistem ekonomi ini dapat menjadi sektor penting atau sama sekali tidak penting. Faktor – faktor inilah yang akan mempengaruhi luasnya jangkauan partisipasi daerah dan tingkat keterlibatannya dalam penentuan *cost benefit* pada berbagai sektor dari masyarakat dan batas dampak pariwisata yang ditimbulkannya.

Perkembangan dan pengembangan kepariwisataan akan berdampak pada tingkat perekonomian masyarakat setempat, dimana semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya akan menghabiskan uang untuk memenuhi keperluan hidup selama berada di tempat wisata. Pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan akan

mengakibatkan terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat, karena kegiatan pariwisata adalah merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang dan banyak menyentuh langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Uang yang di keluarkan oleh wisatawan (*Tourist Expenditure*) yang merupakan uang masuk kedalam ekonomi masyarakat akan berputar/berpindah dari kelompok satu ke kelompok lainnya, atau usaha satu ke usaha lainnya demikian seterusnya sehingga merupakan penghasilan yang berantai. Secara ekonomis, kegiatan pariwisata mampu memberikan serta mendorong dan mempengaruhi kondisi ekonomi disuatu negara bahkan dunia. Kegiatan pariwisata jelas dapat mempengaruhi permintaan, penawaran, neraca pembayaran serta devisa negara, ketenaga kerjaan, pengeluaran, pembangunan dan faktor – faktor ekonomi lainnya. (Sihite, 2000).

Secara khusus beberapa hasil studi dampak pariwisata dibidang ekonomi adalah antara lain penciptaan lapangan kerja baru, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di kawasan pariwisata, naiknya harga lahan di kawasan pariwisata, terjadinya spekulasi lahan, konversi penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian, adanya transisi kepemilikan pengelolaan industri pariwisata dari masyarakat lokal kepada orang luar (bukan lokal) (Noronha, dalam Paturusi, 1988).

Menurut Mill (2000) ada 4 pengaruh utama pariwisata terhadap perekonomian yaitu : (1) penyumbang mata uang asing (devisa), (2) meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, (3) dapat meningkatkan struktur perekonomian dan (4) dapat mendorong perkembangan usaha kecil.

b. Dampak Pariwisata Terhadap Aspek Lingkungan (*environment*)

Pembangunan pariwisata, sama seperti pembangunan bidang lainnya, mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. Pengaruhnya dapat positif atau negatif. Untuk kawasan yang kurang berkembang, pembangunan pariwisata dapat meningkatkan lingkungan bagi wisatawan maupun penduduk setempat lewat peningkatan sanitasi, sistem pembuangan dan perumahan. Untuk kawasan yang sudah berkembang, pembangunan pariwisata perlu diperhatikan segi negatifnya seperti polusi dan kemacetan lalu lintas (Mill, 2000).

Pariwisata dalam perkembangannya dapat menimbulkan penurunan nilai lingkungan bila tidak diadakan perencanaan sebelumnya. Lingkungan fisik yang dimaksudkan disini adalah meliputi tanah (*soil*), vegetasi, fauna, iklim dan kaitan antara unsur – unsur ini. Penggunaan lahan pada kawasan pariwisata mempunyai pengaruh terhadap lingkungan dan semakin banyak kawasan tersebut dipergunakan semakin besar pula akibat dan pengaruhnya. Akan ada suatu titik ketika lebih banyak orang menggunakan sebuah kawasan melebihi kemampuan yang bisa ditopangnya. Akibatnya adalah rusaknya lingkungan.

Menurut Sutan Hidayatsyah (dalam Paturusi, 1988), peranan lingkungan dalam konteks kegiatan pariwisata adalah sebagai berikut :

- Lingkungan merupakan suatu aset yang penting dalam kepariwisataan oleh karena itu perawatan lingkungan yang baik mempunyai arti yang penting bagi kelangsungan pertumbuhan kepariwisataan.
- Sebaliknya penurunan nilai lingkungan berakibat kematian pertumbuhan kepariwisataan.

- Aktivitas kepariwisataan berkembang melalui suatu mekanisme pasar, kegiatan tersebut telah memberikan kontribusi cukup berarti pada pertumbuhan ekonomi. Bagaimanapun juga mekanisme pasar tidak dapat di harapkan secara pasti untuk dapat mencegah penurunan nilai lingkungan. Pada umumnya pasar melihat dalam jangka waktu terbatas, sedangkan akibat terhadap lingkungan pada dasarnya terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu ada aset-aset lingkungan yang harus dikonservasikan berhubungan dengan potensinya dan dimanfaatkan untuk kepariwisataan, yang lain perlu dikonservasikan mengingat fungsinya sebagai bagian dari ekosistem.

c. Dampak Pariwisata Terhadap Aspek Sosial Budaya

Kunjungan wisatawan, baik perseorangan maupun secara bersama akan merangsang interaksi sosial dengan penduduk disekitar kawasan pariwisata. Baik langsung atau tidak langsung kehadiran wisatawan di kawasan pariwisata akan merangsang tanggapan masyarakat setempat sesuai dengan kemampuan mereka beradaptasi dengan kenyataan tersebut.

Dengan demikian secara garis besarnya ada dua kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang bersifat dikotomi, yaitu kelompok penerima dan tamu. Kedua kelompok ini saling berinteraksi satu dengan yang lain. Tipe wisatawan, *behavioral*, serta jumlahnya akan mempengaruhi bentuk adaptasi mereka terhadap norma budaya lokal. Mengenai hal ini dapat dilihat seperti pada tabel II.1.

TABEL II.1
TIPE, JUMLAH WISATAWAN DAN ADAPTASINYA TERHADAP
NORMA BUDAYA SETEMPAT

TIPE WISATAWAN	JUMLAH WISATAWAN	BENTUK ADAPTASI
<ul style="list-style-type: none"> * Petualang * Elite * Aneh (off-beat) * Asing (unusual) * Massa kecil * Massa besar * Carteran 	<ul style="list-style-type: none"> * Terbatas * Jarang * Jarang nampak * Kadang – kadang * Rutin * Terus menerus * berkolompok 	<ul style="list-style-type: none"> * Menerima total * Beradaptasi secara menyeluruh * Beradaptasi * Beradaptasi secara terbatas * Senang yang berbau barat * Mengharapkan yang berbau barat * Butuh yang berbau barat

Sumber : Smith, dalam Pearce (1983)

Dampak umum pariwisata terhadap sosial budaya menurut pearce (1983) adalah :
Dampak terhadap struktur penduduk (ukuran penduduk, komposisi usia/kelamin, modifikasi ukuran keluarga, transformasi penduduk dari *rural* ke *urban*), Transformasi bentuk dan tipe pekerjaan (dampak terhadap bahasa dan tingkat kualitas, dampak terhadap distribusi pekerjaan tiap sektor, kebutuhan akan tenaga kerja wanita, meningkatnya tenaga kerja musiman), Transformasi nilai (Politik, Sosial, Agama, Moral), Pengaruh terhadap cara hidup tradisional (Terhadap seni, musik dan nyanyian rakyat, Tradisi dan adat istiadat, Kehidupan sehari-hari), Modifikasi pola konsumsi (Perubahan kualitatif, Perubahan kuantitatif), Keuntungan bagi wisatawan (Rekreasi, relaks, penyegaran, Mengubah lingkungan, Memperluas wawasan, Kontak sosial).

Dengan melihat beberapa dampak yang dikemukakan oleh pakar diatas, maka timbul pertanyaan, dengan peningkatan arus wisatawan ke suatu kawasan pariwisata dari tahun ketahun apakah daerah tersebut masih dapat mempertahankan eksistensi kebudayaannya. Mengenai hal ini para pakar seperti Noronha (1979), I Gusti Ngurah Bagus (1976), Oka A. Yoeti (1997) dan Richard Sihite (2000), yang melihat daerah Bali

sebagai Daerah Tujuan wisata utama di Indonesia, secara serentak menyimpulkan bahwa eksistensi kebudayaan (Bali) masih dapat bertahan. Kebertahanan kebudayaan Bali menurut Noronha didasarkan atas 3 faktor yaitu : kuatnya ikatan adat dan organisasi banjar baik tingkat desa maupun di perkotaan. Masyarakat Bali di perkotaan walau diorganisir oleh organisasi masyarakat seperti RT (Rukun Tetangga), tetapi mereka tidak melepaskan organisasi banjarnya di desa. Rute pariwisata yang ada pada saat ini menyebabkan wisatawan hanya menyentuh sisi luar kehidupan masyarakat Bali, sedangkan kehidupan inti masyarakat tetap berlangsung dan bertahan di pusat – pusat desa.

2.1.5. Akomodasi Pariwisata

a. Hotel

Diantara bermacam – macam bentuk jasa kepariwisataan yang terpenting dan terlengkap ialah yang biasanya disebut hotel. Dalam praktek kegiatan pariwisata dewasa ini, hotel adalah fasilitas yang menyediakan jasa yang paling lengkap untuk wisatawan yang berkunjung atau menginap disuatu tempat. Dalam sistem sosial pariwisata, hotel adalah jasa yang berupa bangunan atau komplek bangunan yang secara komersial memberi fasilitas tempat tinggal sementara kepada umum yang memenuhi syarat (Soekadijo, 2000)

Disamping hotel yang secara umum menyediakan jasa untuk segala jenis tamu dan dengan bentuk jasa yang dibakukan ada hotel – hotel yang dapat disebut hotel khusus. Kekhususan ini terutama mengenai jenis tamu yang diterima. Hotel khusus dimaksudkan untuk keperluan tamu – tamu dengan kebutuhan khusus, sehingga jasa – jasa yang disediakan agak berbeda dengan jasa yang baku di hotel – hotel biasa. Hotel – hotel khusus

tersebut antara lain : Motel, Youth hostel, hotel konferensi, Pondok wisata, *Homestay*, *bungalow* dan lain - lain.

Di samping persyaratan fasilitas, pelayanan, dan tarif, hotel juga harus memenuhi persyaratan lokasi (Soekadijo, 2000), artinya kalau hotel didirikan ditempat yang tidak tepat, maka jasa yang tersedia di hotel tidak akan dimanfaatkan secukupnya oleh wisatawan. syarat lokasi dari hotel ada 3 syarat utama yaitu syarat lingkungan, syarat sentralitas dan syarat aksesibilitas.

- Syarat lingkungan : kesesuaian lokasi hotel dengan lingkungannya secara sosial dan fisik, dimana sukses tidaknya sebuah hotel sangat bergantung pada bagaimana hotel berintegrasi dengan lingkungannya.
- Syarat sentralitas : menunjukkan hubungan hotel dengan tempat – tempat atraksi wisata.
- Syarat aksesibilitas : menunjukkan hubungan hotel dengan angkutan wisata dimana dituntut bahwa hotel harus mudah ditemukan dan mudah dicapai.

b. Restoran

Rumah makan di kota – kota biasanya tidak diselenggarakan khusus untuk wisatawan, bahkan biasanya kebanyakan pendapatannya berasal dari penduduk setempat. Rumah makan atau restoran yang khusus memberikan jasanya kepada orang yang dalam perjalanan letaknya diluar kota, ditepi jalur – jalur lalu lintas yang penting. Untuk keperluan pariwisata, restoran diklasifikasikan seperti hotel menurut kualitas, fasilitas dan pelayanannya menjadi mewah, restoran kelas satu dan seterusnya, dan juga diberi tanda bintang atau tanda – tanda lain yang berlaku di suatu tempat. Restoran juga harus

memenuhi persyaratan lokasi, baik mengenai sentralitas, aksesibilitas maupun lingkungannya.

c. *Art Shop*

Salah satu kegiatan wisatawan dalam berwisata ke suatu negara adalah berbelanja barang – barang yang menjadi ciri khas dari daerah yang dikunjungi. Mengunjungi negara lain tanpa kenangan nyata adalah hampa (Spillane, 2001). Kadang – kadang maksud kunjungan adalah untuk *shopping*, untuk keperluan pribadi atau oleh – oleh. Dalam hal ini peranan toko – toko souvenir (*art shop*) sebagai penyalur kreasi seni atau produk perajin muncul untuk keperluan *shopping*. *Art shop* akan muncul pada daerah tujuan wisata untuk menjual barang – barang cinderamata khas dari penduduk setempat, yang bisa berlokasi pada permukiman penduduk atau munculnya toko – toko di sepanjang kawasan pariwisata.

Kesempatan berbelanja atau lazim pula dikatakan dalam bahasa asing (*Shopping*) adalah tiada lain daripada kesempatan untuk membeli barang oleh – oleh atau *souvenir* untuk dibawa pulang ke rumah atau negeri sendiri. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Harry G. Clement dalam Pendit (1999), uang yang dipergunakan oleh wisatawan untuk membeli oleh – oleh rata – rata berkisar 25% - 26,3% dari jumlah total pengeluaran wisatawan.

d. **Tempat Hiburan Malam**

Untuk dapat membuat wisatawan lebih lama tinggal dan tentunya lebih banyak mengeluarkan uangnya atau membelanjakan uangnya ditempat yang dikunjungi perlu sesuatu yang dapat mengikat dan membuat wisatawan senang untuk tetap tinggal di suatu

daerah wisata. Wisatawan juga memerlukan sarana hiburan untuk bisa dinikmati pada malam hari yang menampilkan hiburan – hiburan atau sekedar tempat minum – minum dan menari (Sihite, 2000). Tempat hiburan malam ini bisa berupa diskotik, *caffé* atau panggung tempat pementasan tari – tarian. Dalam mendesain dan menentukan lokasi suatu tempat hiburan malam sangat perlu memperhatikan lokasi yang dipakai karena biasanya tempat – tempat seperti ini akan menimbulkan citra yang glamor dan hingar bingar sehingga kalau tempatnya tidak tepat akan bisa mengganggu penduduk atau wisatawan yang memerlukan ketenangan.

2.1.6. Pemasaran Pariwisata

Pemasaran pariwisata meliputi sejumlah kegiatan yang maksudnya untuk mempengaruhi, mengimbau dan merayu wisatawan potensial sebagai konsumen agar mengambil keputusan untuk mengadakan perjalanan wisata, disamping itu kegiatan pemasaran juga menyediakan kemudahan – kemudahan agar calon wisatawan tersebut dapat melaksanakan keputusannya, yaitu untuk mengadakan perjalanan. (Soekadijo, 2000).

Tujuan akhir dari pemasaran ialah agar orang membeli produk yang ditawarkan, untuk itu produk harus dibuat menarik, agar orang tertarik produk itu harus tersedia, sehingga orang dapat membelinya. Menurut Salah Wahab (1989) dalam Soekadijo (2000) tindakan – tindakan yang dilakukan dalam kegiatan pemasaran adalah menentukan atau memilih pasar atau calon konsumen/wisatawan, memastikan apa yang dicari oleh konsumen, mempengaruhi mereka, sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal dan memberi kepuasan yang sebesar – besarnya kepada konsumen.

Sedangkan menurut Pendit (1999), landasan dan tujuan pemasaran harus bertolak dari kepribadian dan moral bangsa sebagai modal utama untuk menjadikan saling menghormati dan saling pengertian diantara bangsa – bangsa di dunia sebab pemasaran pariwisata ini memegang peranan dalam mengemban dan mengembangkan peradaban manusia dengan menonjolkan aspek – aspek moral, kultural, sosial, etika, edukasi dan psikologi yang dimiliki suatu bangsa. Pemasaran pariwisata akan berhasil apabila pokok – pokok seperti media, cara, strategi dan teknik telah dikuasai sebaik – baiknya.

Menurut Myra, P. Gunawan (et al. 2000), mempromosikan nilai lokal dilakukan tidak saja agar pariwisata yang dikembangkan berjalan harmonis dengan nilai – nilai yang berlaku, tetapi yang lebih penting agar produk pariwisata dapat memiliki citra (*brand image*) sendiri yang kuat sehingga tidak tergantung pada intervensi pihak asing yang bisa jadi kurang sesuai dengan nilai – nilai tradisi. Kemandirian citra ini akan menimbulkan identitas dan kebanggaan terhadap produk pariwisata dan nilai – nilai tradisi.

Pemasaran pariwisata berbeda dengan pemasaran industri manufaktur karena adanya ciri khusus dari pariwisata, menurut Mill (2000) ada 4 tantangan didalam pemasaran pariwisata yaitu :

1. Persediaan pariwisata tidak dapat dengan mudah diubah untuk memenuhi perubahan selera. Hal ini menyebabkan meningkatnya tekanan kepada para perencana untuk membuat keputusan pemasaran dan pengembangan yang tepat.
2. permintaan wisatawan sangat elastis. Ini berarti bahwa perubahan pendapatan wisatawan akan mengakibatkan perubahan yang lebih besar secara proporsional pada permintaan bagi wisatawan.
3. Pelayanan bagi wisatawan dikonsumsi langsung pada tempatnya.

4. Produk wisata merupakan gabungan pelayanan, dimana kurangnya pelayanan pada salah satu elemen dapat merusak seluruh liburan wisatawan.

2.1.7. Pendekatan Analisa Dampak Pariwisata

Sebagai suatu kegiatan, pariwisata belum lama dilihat sebagai kegiatan yang menguntungkan dalam sistem pembangunan. Dalam pengertian ekonomi secara luas, penanggulangan dampak pariwisata telah dilakukan secara meluas terhadap lingkungan (Cohen, dalam Putra, 1999) dan terhadap sosial budaya (Smith, dalam Parwata, 1996).

Pendekatan dampak pariwisata yang dilakukan selama ini masih sering menimbulkan konflik pendapat antara pakar yang satu dengan yang lainnya. Para pakar diakhir 60an cenderung melihat kegiatan pariwisata dengan perasaan optimis sebagai suatu potensi dalam pembangunan. Di pihak lain para Antropolog dan Sosiolog memandangnya secara pesimis, pariwisata dilihat sebagai hal yang dapat merusak nilai dan budaya masyarakat. Perbedaan pandangan ini sering diakibatkan oleh lemahnya methodology dan penilaian yang dilakukan cenderung bersifat subyektif, (Turner dan Ash, dalam Mill, 2000).

Studi dampak pariwisata tidak lepas dari perkembangan metodologi analisa dampak lingkungan yang lahir karena keprihatinan terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan yang terjadi di negara – negara Amerika, New Zaeland dan beberapa negara lainnya di tahun 70 an.

Dari pengalaman menganalisa dampak limbah minyak pada kilang di Scotlandia, akhirnya Potter berhasil mengembangkan suatu metoda pendekatan analisa dampak lingkungan. Pendekatan yang dilakukan oleh Potter ini kemudian dikembangkan

diberbagai analisa dampak, yang disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhannya. Salah satu dari pengembangan analisa Potter ini termasuk analisa dampak pariwisata. Secara garis besar analisa dampak pariwisata dapat diuraikan sebagai berikut : (1). Tentukan konteks dampak lingkungan (*environment*), masyarakat (*society*), ekonomi, (2). Estimasi masa yang akan datang seandainya pariwisata tidak dilaksanakan, (3). Tentukan dengan jalan spesifikasi pariwisata yang dijalankan, (4). Estimasi masa yang akan datang seandainya pariwisata dilaksanakan, (5). Identifikasi secara kuantitatif dan kualitatif perbedaan antara tahap 2 dan 4, (6). Tentukan pengukur untuk mengurangi dampak, (7). Analisa dampak dan alternatif pemecahan, (8). Hasil akhir, (9). Membuat keputusan. (Pearce dalam Paturusi, 1988).

2.2. Tata Ruang Vernakular

2.2.1. Pengertian Tata Ruang Vernakular

Vernakular berasal dari kata latin *vernaculus*, "native" dimana dalam perkembangan analogi bahasa sering digunakan untuk "grammar" dan digunakan untuk membahasakan gaya (*style*) atau macam sebagai ekspresi arsitektur (Oliver, 1997). Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang vernakular ada beberapa pendapat mengenai "vernakular" yang terkait dengan arsitektur yaitu :

- Vernakular adalah berkaitan dengan sesuatu yang *indigenous*, *domestic* dan *non foreign* atau asli, lokal dan bukan pengaruh dari luar.
- Vernakular dibangun tidak berdasarkan rekayasa desain, dan penerapan proses yang sederhana dan alami berdasarkan tradisi setempat.

- Arsitektur vernakular adalah ekspresi arsitektur yang sederhana didasarkan pada tradisi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa vernakular dalam arsitektur mengandung pengertian suatu arsitektur yang berbasis pada arsitektur tradisional yang sedikit demi sedikit mengalami perkembangan karena pengaruh perkembangan jaman, dimana hal ini akibat dari kreativitas manusia/masyarakat itu sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhannya yang dalam melakukan hal tersebut masyarakat tidak memerlukan seorang desainer untuk merancang bangunannya. Perkembangan bangunan tersebut berjalan dengan sendirinya dan dipertimbangkan dengan keadaan dan kebutuhan pada saat itu.

Dari pengertian arsitektur vernakular tersebut dapat ditentukan beberapa kata kunci mengenai “vernakular” yaitu : sesuatu yang asli, lokal dan bukan pengaruh dari luar (tidak berdasarkan rekayasa desain), berdasarkan pengetahuan tradisional dan budaya setempat, serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang sesuai dengan perkembangan jaman.

Selanjutnya untuk mengetahui pengertian dari tata ruang vernakular, setelah mengetahui pengertian dari vernakular perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari tata ruang. Menurut Soefaat et. al (1997), tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.

Dari pengertian mengenai tata ruang dan pengertian mengenai vernakular dapat disimpulkan pengertian dari tata ruang vernakular yaitu : wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang berdasarkan pengetahuan tradisional dan budaya setempat, dengan

tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan jaman serta diwujudkan tidak berdasarkan rekayasa desain.

2.2.2. Faktor – faktor Tata Ruang Vernakular

Tata ruang vernakular dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan dan faktor lingkungan dari suatu kawasan baik fisik maupun non fisik. Secara lebih jelas faktor – faktor yang berpengaruh terhadap tata ruang vernakular adalah sebagai berikut (Cigdem, 2002)

- Faktor Fisik dan Alam, Faktor fisik dan alam lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada tata ruang vernakular. Faktor fisik dan alam lingkungan ini meliputi : Letak geografis, Topografi, Flora dan fauna.
- Faktor Ekonomi, Keadaan perekonomian masyarakat akan sangat mempengaruhi ruang yang diperlukan dalam melaksanakan aktivitasnya. Dimana semakin tinggi tingkat perekonomian masyarakat maka makin tinggi pula tuntutan akan keperluan ruang yang secara umum akan sangat berpengaruh terhadap pola ruang secara keseluruhan dalam suatu wilayah.
- Faktor Politik dan Kebijakan Pemerintah, yang termasuk dalam faktor ini adalah bentuk pemerintahan, struktur administratif, undang – undang dan regulasi, standarisasi serta hubungan internasional
- Faktor Sosial Budaya, Yang termasuk dalam faktor sosial budaya ini antara lain gaya hidup, tingkat interaksi sosial, struktur sosial kemasyarakatan serta faktor agama dan kepercayaan dari masyarakat

- Efek dari kebudayaan sebelumnya, termasuk warisan budaya bersejarah pada masa di atasnya dan fisik lingkungan.
- Efek dari kebudayaan dan sosial lainnya, yang meliputi tingkat interaksi dengan kebudayaan lain serta kekuatan politik dari kebudayaan lain.

2.3. Konsep Umum Tata ruang Tradisional

Beberapa pengertian dan definisi tata ruang tradisional dikemukakan oleh beberapa pakar, namun pada intinya adalah : tata ruang yang terbentuk berdasarkan kaidah-kaidah tertentu yang dilaksanakan secara berurutan dan menerus tanpa ada perubahan (Djoko Sujarto dalam Paturusi 1988).

Amos Rapaport dalam Paturusi (1988) yang melakukan studi mengenai tata ruang tradisional di beberapa negara menyimpulkan bahwa, pengaturan terhadap tata ruang, merupakan wujud pengejawantahan manusia yang merasa perlu mengatur jagad raya ini, dimana semua kebudayaan mempunyai suatu sistem pengaturan tata ruang secara sendiri-sendiri; mereka berkomunikasi secara simbolis melalui pengaturan lingkungan. Semua lingkungan mempunyai makna dan mereka menggambarkan makna itu dalam bentuk skema, prioritas, preferensi dan kebudayaan dari penciptanya. Pada kebudayaan tradisional, pengaturan berdasarkan agama dengan maksud untuk mengatur kekacauan dunia dengan meniru suatu pengaturan ideal, yaitu pengaturan dan harmoni Surgawi.

Selanjutnya Rapaport melihat bahwa sistem pengaturan tata ruang tradisional ada dua sistem, dimana keduanya tidak saling terpisah satu dengan yang lain, bahkan seringkali berhubungan. Kedua sistem tersebut adalah : (1). Aturan geometris yang dikaitkan dengan *kosmologis* dan *agama*, (2). Aturan yang berkaitan dengan hubungan sosial masyarakat.

Pada tata ruang tradisional, kedua aturan tersebut hadir secara bersama-sama, sehingga fungsi lain *aturan agama* adalah untuk meletakkan, memperkuat dan menekan *aturan sosial*. Akibat perkembangan zaman, perkembangan tata ruang tradisional, aturan agama dan sosial digeser oleh faktor *teknologi* dan *ekonomi* (Skolimowski dalam Eko Budihardjo, 1986). Dari faktor teknologi dan ekonomi melahirkan konsep "*Form Follows Function*", yaitu suatu konsep yang menitik beratkan suatu hasil desain atau perencanaan dari segi fungsionalnya. Konsep tersebut nampaknya lebih praktis, lebih rasional dan fungsional, dengan motor teknologi membuahkan hasil yang nyata di beberapa negara maju.

Kritik tajam pendekatan teknologi dan ekonomi didasarkan pada kenyataan bahwa lingkungan yang diciptakan memang mampu menaikkan standar kehidupan masyarakat berkat teknologi yang canggih, namun disisi lain dari kehandalan teknologi yang canggih menyebabkan degradasi lingkungan yang tidak manusiawi.

Selanjutnya Skolimowski melontarkan argumen bahwa jika "fungsi" dijadikan sebagai parameter pembatas fisik dan ekonomi, maka ini merupakan kendala yang memasung hakekat manusia. Skolimowski mengusulkan pendekatan baru yang disebutnya *Form Follows Culture* yang sifatnya lebih manusiawi (*ecological humanism*).

Variasi dan pendapat mewarnai gagasan lingkungan ideal yang dikemukakan oleh para pakar tersebut. Namun demikian terlihat bahwa aspek utama yang banyak dilihat untuk mencapai lingkungan ideal adalah pada aspek pengaturan tata guna lahan dan perencanaan fisik yang mencakup bentuk lingkungan, pola sirkulasi, kepadatan penduduk dan gaya hidup.

2.4. Tata Ruang Tradisional Bali

2.4.1. Konsep Tata Ruang Tradisional Bali

Sebagaimana tata ruang tradisional pada umumnya dimana faktor-faktor sosial (Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat) sangat besar pengaruhnya terhadap aspek fisik tata ruang, maka dalam pembahasan konsepsi tata ruang tradisional, teori dan konsep ilmu-ilmu Sosial (Sosiologi, Antropologi, Sejarah) memberikan kontribusi yang cukup besar. Sejalan dengan perkembangan teori baik dibidang Sosial dan teknologi, maka wawasan pandangan terhadap tata ruang tradisional Bali juga mengalami perkembangan. Beberapa studi melihatnya dari aspek planologi (Tinny Suryani, 1973; Nurdjati Notowidagdo, 1973; Ardi P. Parimin, 1986); dari segi upaya konservasi dan pengembangan konsep ruang tradisional (Juswadi Saliya, 1975; Eko Budihardjo, 1986).

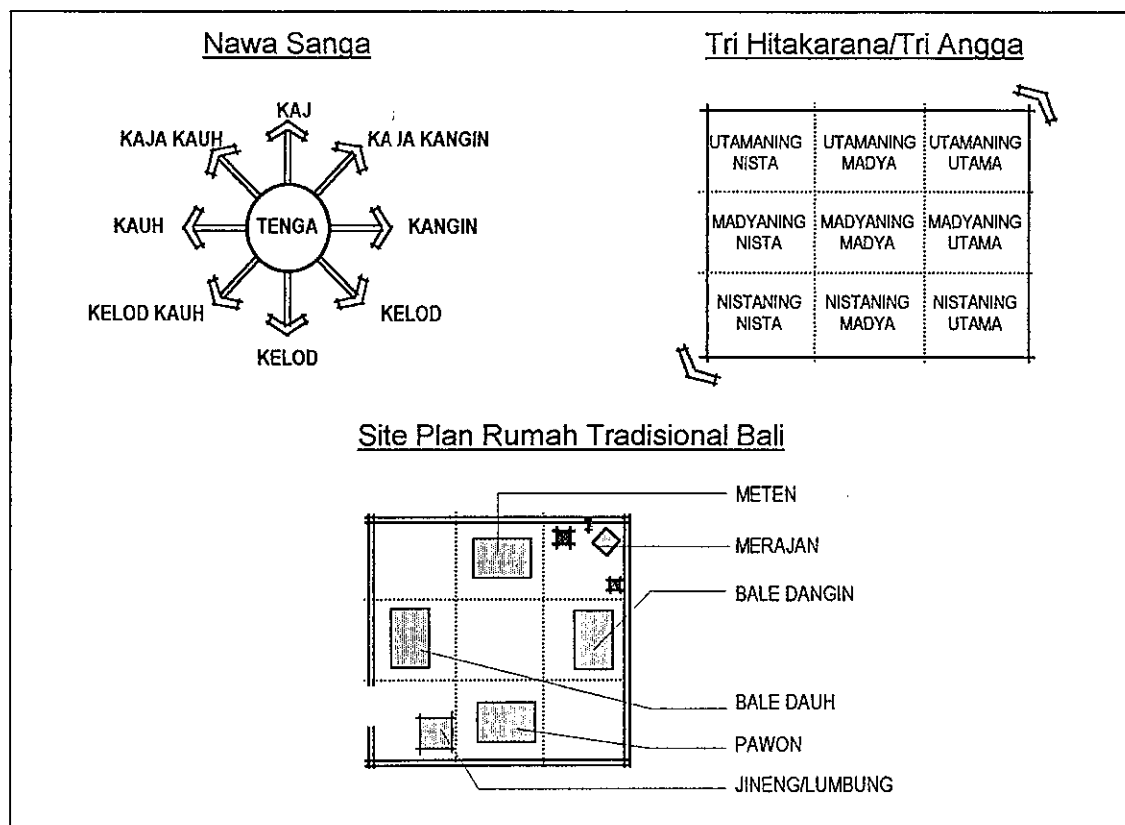
Demikian halnya pada studi tata ruang tradisional Bali, para sosiolog dan antropolog mencoba menafsirkan konsep makro dan mikro kosmos pada tata ruang tradisional Bali (Covarubias, 1936; Tan, 1967; Mc Kean, 1973; Geertz, 1975; Ramseyer, 1977; I Gusti Ngurah Bagus, 1975; James Dananjaya, 1985). Berdasarkan konsep makro dan mikro kosmos alam ini dibagi atas dua bagian, yaitu *Bhuana Agung* yang merupakan pengejawantahan makro kosmos dan *Bhuana Alit* sebagai mikro kosmos. Kedua alam ini selalu harus berada dalam keseimbangan untuk mencapai *moksa* (*perfection*). Konsep dikotomi ini tercermin pada konsep lainnya seperti; Suci-Kotor, *Kaja-Kelod*, *Kangin-Kauh* (timur – barat), Hitam-Putih.

Penurunan konsep diatas pada tata ruang dikenal dengan konsep *Nawa Sanga* yang membagi ruang dalam 9 segmen. Dimana setiap segmen mempunyai tingkat kesucian yang berbeda. Arah *Kaja* (arah ke gunung) diperuntukkan pada hal-hal yang bersifat suci,

seperti pura. Sedang yang berada di daerah *Kelod* (arah ke laut) diperuntukkan pada hal-hal yang kotor seperti *setra* (kuburan). Di antara kedua arah tersebut bersifat netral dan digunakan untuk tempat aktivitas kehidupan manusia. (lihat gambar 2.1)

Konsep dasar lainnya adalah konsep *Tri Hita Karana* yang pada hakekatnya berisi bahwa segala sesuatu di alam ini terdiri 3 unsur pokok, yaitu : *Atma (soul)*, *Sarira (physical body)* dan *Trikaya (power or ability)*. Penurunan konsep *Tri Hita Karana* dalam Konsep Ruang dikenal dengan konsep *Tri Angga* yaitu adanya permbagian zone-zone ruang berdasarkan derajat kesakralannya : *Nista*, *Madya* dan *Utama*.

GAMBAR 2.1
KONSEP NAWA SANGA SEBAGAI ORIENTASI KOSMOLOGIS



Sumber : Eko Budihardjo, 1986

Perwujudan Konsep *Tri Angga* dalam ruang terungkap mulai dari skala : alam, regional, Kota/desa, perumahan, pura dan detail rumah (tabel II.2).

TABEL II.2
KONSEP TRI ANGGA SEBAGAI KONSEP HIRARKI RUANG

TRI LOKA	SHUAH LOKA	BHUWAH LOKA	BHUR LOKA
TRI ANGGA	UTAMA	MADYA	NISTA
1. Universal	<i>Atmosphere</i>	<i>Lithosphere</i>	<i>Hydrosphere</i>
2. Wilayah	Gunung	Daratan	Laut
3. Desa/Kota	Pura/Kahyangan	Banjar/Permukiman	Kuburan
4. Pura	<i>Jeroan</i>	<i>Jaba Tenngah</i>	<i>Jaba Sisi</i>
5. Tempat tinggal	<i>Parahyangan/Pemrajan/Sanggah</i>	<i>Pawongan/Umah Natah</i>	<i>Palemahan/Lebuh Pintu masuk</i>

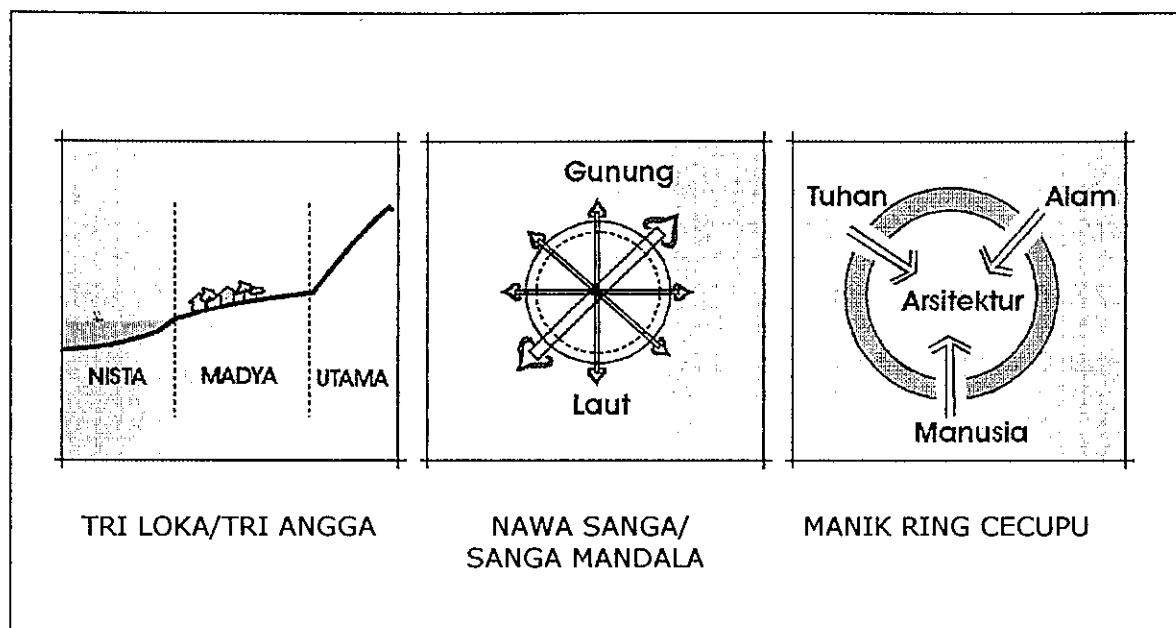
Sumber : Eko Budihardjo, 1986

Hasil dari penurunan konsep tata ruang ini sangat beragam, namun Ardi P. Parimin (1986) menyimpulkan adanya 4 atribut dalam tata ruang tradisional Bali (dalam tingkatan desa adat), yaitu :

1. Atribut Sosiologi menyangkut sistem kekerabatan masyarakat Bali yang dicirikan dengan adanya sistem desa adat, sistem *banjar*, sistem *subak*, *Sekeha*, *Dadia*, dan *perbekalan*.
2. Atribut Morpologi menyangkut komponen yang ada dalam suatu permukiman inti (*Core*) dan daerah periphery di luar permukiman, yang masing-masing mempunyai fungsi dan arti pada tata ruang tradisional Bali.
3. Atribut Fungsional menyangkut fungsi tata ruang tradisional Bali pada dasarnya berfungsi keagamaan dan fungsi sosial yang dicirikan dengan adanya 3 pura desa.
4. Atribut Simbolik berkaitan dengan orientasi sumbu utama desa.

Konsep tata ruang yang lebih bersifat fisik mempunyai berbagai variasi (seperti pada gambar 2.2).

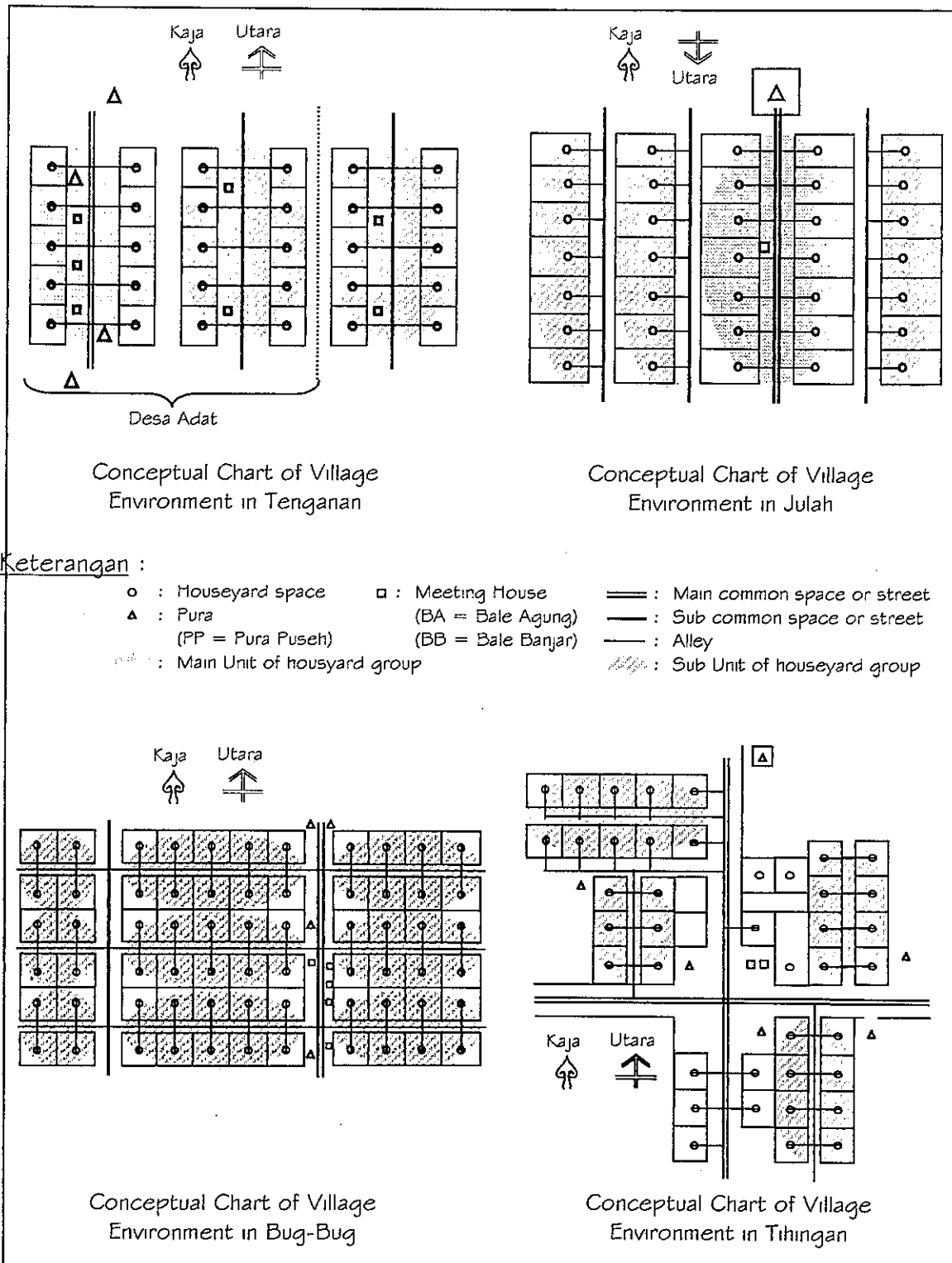
GAMBAR 2.2
KONSEPSI TATA RUANG TRADISIONAL BALI



Sumber : Eko Budihardjo, 1986

Namun demikian pada dasarnya mempunyai kesamaan yaitu sebagai: (1). Orientasi Kosmologis (*Nawa Sanga*), (2). Hierarki Ruang (*Tri Angga*), (3). Proporsi dan skala, (4). Keseimbangan Kosmologis, (5). Kronologis dan prosesi pembangunan, (6). Konsep ruang terbuka, (7). Kejujuran struktur (*Clarity of structure*), (8). Kejujuran pemakaian material (*Truth of material*). (Juswadi Salija, 1975; dalam Eko Budihardjo, 1986). Beberapa tipe konsep tata ruang tradisional Bali seperti pada gambar 2.3

GAMBAR 2.3
 BEBERAPA TIPE KONSEP TATA RUANG TRADISIONAL BALI



Sumber :Ardi P. Parimin, 1986

2.4.2. Aspek-Aspek Tata Ruang Tradisional Bali

Aspek – aspek yang ada pada tata ruang tradisional Bali meliputi aspek sosial, aspek simbolis, aspek morfologis dan aspek fungsional.

a. Aspek Sosial

Dalam pandangan masyarakat Bali konsep teritorial memiliki dua pengertian, yaitu : pertama, teritorial sebagai suatu kesatuan wilayah tempat para warganya secara bersama-sama mengonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara dan berbagai kegiatan sosial yang ditata oleh suatu sistem budaya dengan nama *desa adat*; dan kedua, desa sebagai kesatuan wilayah administrasi dengan nama *desa dinas* atau *perbekelan*. (Depdikbud, 1985). Menurut Surpha, (2002), Adat dan kebiasaan masyarakat Hindu di Bali dipelihara, dibina dan dipimpin oleh suatu lembaga yang bernama *desa adat*, yaitu suatu desa yang berbeda status, kedudukan dan fungsinya dengan desa dinas (desa administratif pemerintahan), baik ditinjau dari segi pemerintahan maupun dari sudut pandangan masyarakat, dengan penjelasan bahwa *desa adat* adalah : desa yang dilihat dari fungsinya dibidang adat (desa yang hidup secara tradisional sebagai perujudan dari lembaga adat), sedang *desa dinas* dilihat dari fungsinya dibidang pemerintahan merupakan lembaga pemerintah yang paling terbawah (yang sering disebut dengan istilah *keperbekelan*).

Batasan tentang Desa Adat dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Nomor 06 Tahun 1986 sebagai berikut : Desa Adat adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam

ikatan *Khayangan Tiga* (*Khayangan Desa*) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Proses terbentuknya sebuah Desa adat, (Surpha, 2002) pada awalnya ditandai dengan serombongan orang membuka hutan secara bersama – sama untuk tempat tinggal dan untuk pertanian. Tanah untuk tempat tinggal mereka mulai ditata sedemikian rupa sehingga setiap anggota rombongan mendapat pembagian tanah yang sama dan juga disediakan tanah – tanah untuk kepentingan kegiatan bersama seperti untuk bale banjar, pasar, pura dan sebagainya. Demikian pula tanah untuk pertanian mulai ditata sedemikian rupa ada yang dijadikan sawah ataupun tegalan. Setiap anggota rombongan mendapat pembagian tanah pertanian yang sama dan juga disediakan tanah pertanian untuk *pelaba pura* dan untuk kepentingan bersama lainnya. Tanah tempat tinggal kelompok masyarakat demikian itu lalu menjadi *karang desa* (wilayah permukiman desa adat) yang ditempati oleh *Krama desa adat* (warga desa adat) dan tanah pertanian yang merupakan sawah atau tegalan adalah milik kelompok masyarakat tersebut yang diatur secara perorangan dan kolektif. Oleh karena rombongan orang tersebut mempunyai kesamaan asal, nasib, kepercayaan dan kesamaan tradisi mudahnya terjadinya desa adat yang mencakup pengertian teritorial dan kesatuan tata krama pergaulan hidup di masyarakat.

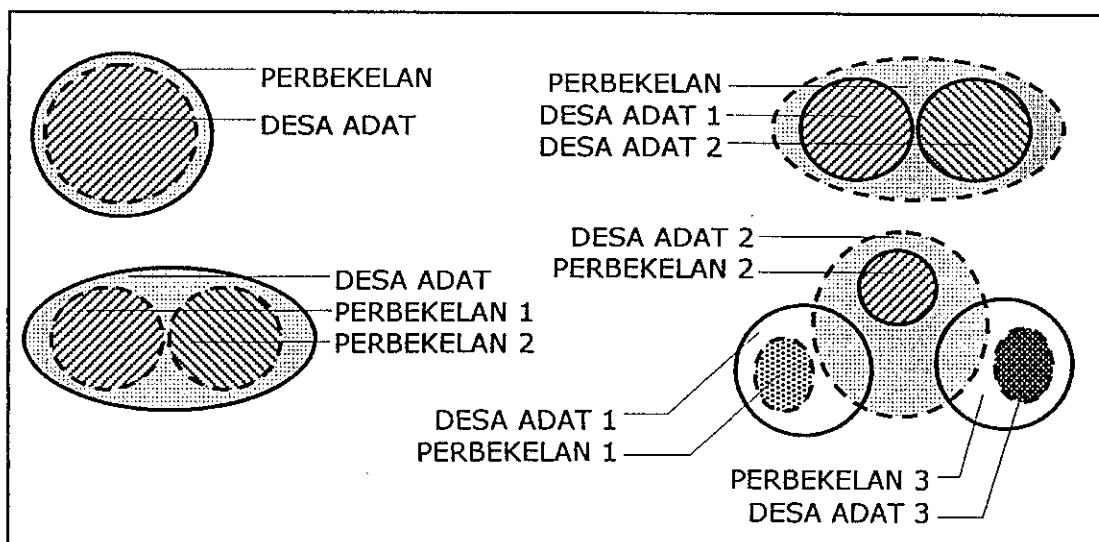
Dalam perkembangan desa adat, ada kalanya kemudian datang pula orang – orang baru yang juga bertempat tinggal di wilayah desa adat itu. Mereka juga menjadi anggota desa adat bilamana mereka diijinkan oleh *krama* desa adat bersangkutan (Ter Haar, 1960 dalam Surpha, 2002) dan sepanjang mereka mematuhi ketentuan – ketentuan desa adat itu yang antara lain ikut *nyungsung* dan *ngemong* Pura Kahyangan Tiga milik

desa adat bersangkutan. Dengan demikian desa adat itu menjadi heterogen dalam arti anggotanya tidak mempunyai kesamaan asal dan nasib.

Dari kesatuan wilayah, pada umumnya satu desa dinas mencakup beberapa desa adat. Dikatakan pada umumnya, karena dalam kenyataannya tidak terdapat satu pola yang seragam. Variasinya cukup beraneka ragam dan kompleks, antara lain : (1) Satu desa dinas terdiri dari satu desa adat, (2) Satu desa dinas mencakup beberapa desa adat, (3) Satu desa adat mencakup beberapa desa dinas, (4) Kombinasi 2 dan 3. Variasi hubungan antara desa adat dengan desa dinas yang cukup beragam tersebut seperti terlihat pada gambar berikut :

Melihat dari jumlah desa dinas (564 buah) dan jumlah desa adat (1.610 buah) yang ada di daerah Bali, memang ada kecenderungan bahwa variasi jenis kedua yang paling banyak kemungkinannya.

GAMBAR 2.4
VARIASI HUBUNGAN ANTARA DESA ADAT DENGAN DESA DINAS



Sumber : Adi P. Parimin (1986)

Untuk memperoleh pengertian tentang komunitas masyarakat Bali, maka penggambaran tentang ciri-cirinya akan diperinci menurut aspek-aspek sebagai berikut : Legitimasi, atribut-atribut dan ciri khusus.

a. Legitimasi

Disamping adanya pengakuan formal, maka legitimasi suatu komunitas berkembang pula dikalangan warga menurut persepsinya dengan ciri : (1) adanya perasaan cinta dan terkait kepada wilayah tersebut, (2) adanya rasa kepribadian kelompok, (3) adanya pola hubungan yang bersifat intim dan cenderung bersifat suka rela, (4) adanya suatu tingkat penghayatan dari sebagian besar lapangan kehidupannya secara bulat.

Disamping ciri pengenalan seperti diatas, ada beberapa syarat pokok terbentuknya desa adat, yaitu : (1) adanya wilayah dengan batas-batas tertentu yang disebut pelemahan desa atau tanah desa, (2) adanya warga desa yang disebut pawongan desa, (3) adanya sejumlah pura sebagai pusat-pusat pemujaan para warga desa yang disebut kahyangan tiga, (4) adanya suatu pemerintahan adat yang berlandasan pada aturan-aturan adat tertentu (*awig-awig desa*)

b. Atribut Desa Adat

Atribut pokok dari suatu komunitas kecil yang terwujud sebagai desa adat di Bali tersimpul dalam konsepsi *Tri Hita Karana* dengan atribut sebagai berikut :

1. *Kahyangan Tiga*, yang terdiri dari tiga pura sebagai pusat pemujaan warga desa, yaitu *Pura Puseh* (tempat pemujaan Dewa Wisnu yang memelihara alam beserta isinya); *Pura Desa* dan *Bale Agung* (tempat pemujaan Dewa Brahma yang menciptakan alam beserta isinya); dan *Pura Dalem* (tempat pemujaan Siwa, yang mengembalikan sesuatu

kepada asalnya). Dalam rangka menjaga kesucian pura, termasuk *Kahyangan Tiga* maka Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat telah mengeluarkan bhisama berupa surat keputusan Nomor 11/KEP./I/PHDIP/1994 tentang kesucian pura yang sudah menetapkan bahwa radius kesucian pura adalah *apenimpug* dan *apenyenger*.

2. *Palemahan Desa*, yaitu tanah ulayat milik desa yang merupakan tempat permukiman warga desa yang bersangkutan.
3. *Pawongan Desa*, yaitu seluruh warga desa yang bersangkutan. Sebagai warga inti adakah setiap pasangan suami istri yang telah berkeluarga.

Disamping atribut pokok tersebut, masih perlu dikemukakan beberapa fasilitas dan pelayanan desa yang menjadi simbol suatu komunitas masyarakat Bali yang terwujud sebagai desa adat, yaitu : (1) Balai pertemuan (*bale banjar*) tempat terselenggaranya rapat-rapat desa, (2) Kuburan desa (*setra*) yang biasanya terletak berdekatan dengan *pura dalem*, (3) Perempatan desa merupakan tempat yang dianggap keramat dan juga sebagai tempat upacara, (4) Tata susunan permukiman yang mengikuti konsep *Tri Angga*, yaitu : *Utama*, *Madya*, dan *Nista*.

c. Ciri Khusus Desa Adat

Kedua hal diatas telah memberikan ciri umum tentang suatu komunitas kecil yang terwujud sebagai desa adat. Masyarakat Bali memandang warisan adat kebiasaan adalah suatu hal yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan baik, walaupun demikian tidak berarti masyarakat Bali tidak berani melakukan perubahan – perubahan ataupun penyempurnaan. Untuk mengubah ataupun menyempurnakan adat kebiasaan, agama Hindu menganjurkan agar berpedoman pada ketentuan – ketentuan *Desa Kala Patra* (Surpha,

2002), yang artinya : (1) *Desa* artinya tempat dimana ia berada (2) *Kala* artinya dalam keadaan bagaimana ia pada waktu itu (3) *Patra* artinya sastra – sastra agama dan ketentuan yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah.

Untuk melihat ciri-ciri khusus yang memberikan variasi terhadap komunitas di Bali, agaknya indikator-indikator berikut dapat dipakai sebagai titik tolak, yaitu :

- *Indikator sistem ekonomi* menimbulkan ciri-ciri khusus, misalnya bagi desa pertanian akan berbeda dengan desa pariwisata.
- *Indikator sistem ekologi*, menimbulkan ciri khusus bagi desa pegunungan yang berbeda dengan desa Bali dataran. Permukiman di pegunungan misalnya lebih mengikuti pola linear, tidak terbagi ke dalam banjar dan sistem kasta tidak penting atau bahkan beberapa desa tidak mengenalnya.
- *Indikator sistem kemasyarakatan dan pengaruh luar*, misalnya dari pengaruh agama, maka dibedakan permukiman yang kurang dipengaruhi oleh agama Hindu dan yang kuat dipengaruhi. Juga dalam indikator ini dikemukakan arti pengaruh modernisasi. Pengaruh pariwisata yang membedakan ciri permukiman satu dengan yang lainnya sesuai dengan tingkat identitas pengaruh unsur-unsur tersebut.

Sejak masa lalu sampai saat ini, *desa adat* adalah suatu komunitas kecil dengan fokus fungsinya dibidang adat dan agama. Dalam menjalankan fungsinya, tiap-tiap desa adat mempunyai kedudukan yang bersifat otonom, dalam arti tiap desa adat berdiri sendiri menuruti aturan - aturan (*awig-awig desa*) dan desa adat tidak terkait dalam jalinan struktural. Bidang kedinasan seperti tersebut di atas berada di tangan urusan *desa dinas*. Dalam hal kedinasan itu, desa dinas membawahi sejumlah *banjar dinas*.

b. Aspek Simbolik

Aspek simbolik pada tata ruang tradisional Bali yang dimaksudkan disini adalah berkenaan dengan orientasi kosmologis. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan masyarakat Bali pada umumnya dapat dibagi atas dua kegiatan, yaitu : kegiatan yang bersifat *sakral* (berkaitan dengan kegiatan keagamaan); dan kegiatan yang bersifat *profan* (berkaitan dengan kegiatan sosial masyarakat). Penempatan dengan kegiatan tersebut di Bali dibedakan berdasarkan orientasi kesakralannya.

Elemen – elemen ruang yang dijadikan sebagai indikator kesakralan adalah : (1) Sumbu permukiman berupa jalan utama atau ruang utama pada permukiman, (2) Lokasi *pura puseh*, (3) Lokasi *pura dalem* , dan (4) *Bale Banjar*.

Orientasi Arah Sakral

Orientasi arah sakral pada tingkat desa adat dapat mengarah :

- ke arah gunung atau tempat yang tinggi dimana arwah leluhur bersemayam.
- sumbu jalan yang menuju ke dunia leluhur yang bersemayam di gunung.
- mengarah ke elemen-elemen alam lainnya seperti sungai dll
- arah *kaja-kangin* (arah tenggara untuk Bali Utara dan arah timur laut untuk Bali Selatan) yaitu arah ke gunung Agung.

Orientasi arah sakral pada tingkat perumahan ada yang bersifat lokal dan wilayah, arah orientasi yang sifatnya lokal misalnya : gunung atau daerah tertinggi yang terdekat dari lokasi perumahan; jalan utama permukiman; dan persimpangan jalan. Arah orientasi yang sifatnya wilayah ; gunung yang berada pada suatu wilayah (G. Agung, G. Batu Karu, G. Penulisan dan lain-lain). atau mengarah ke wilayah suatu kekuasaan (orientasi politis).

Nawa Sanga

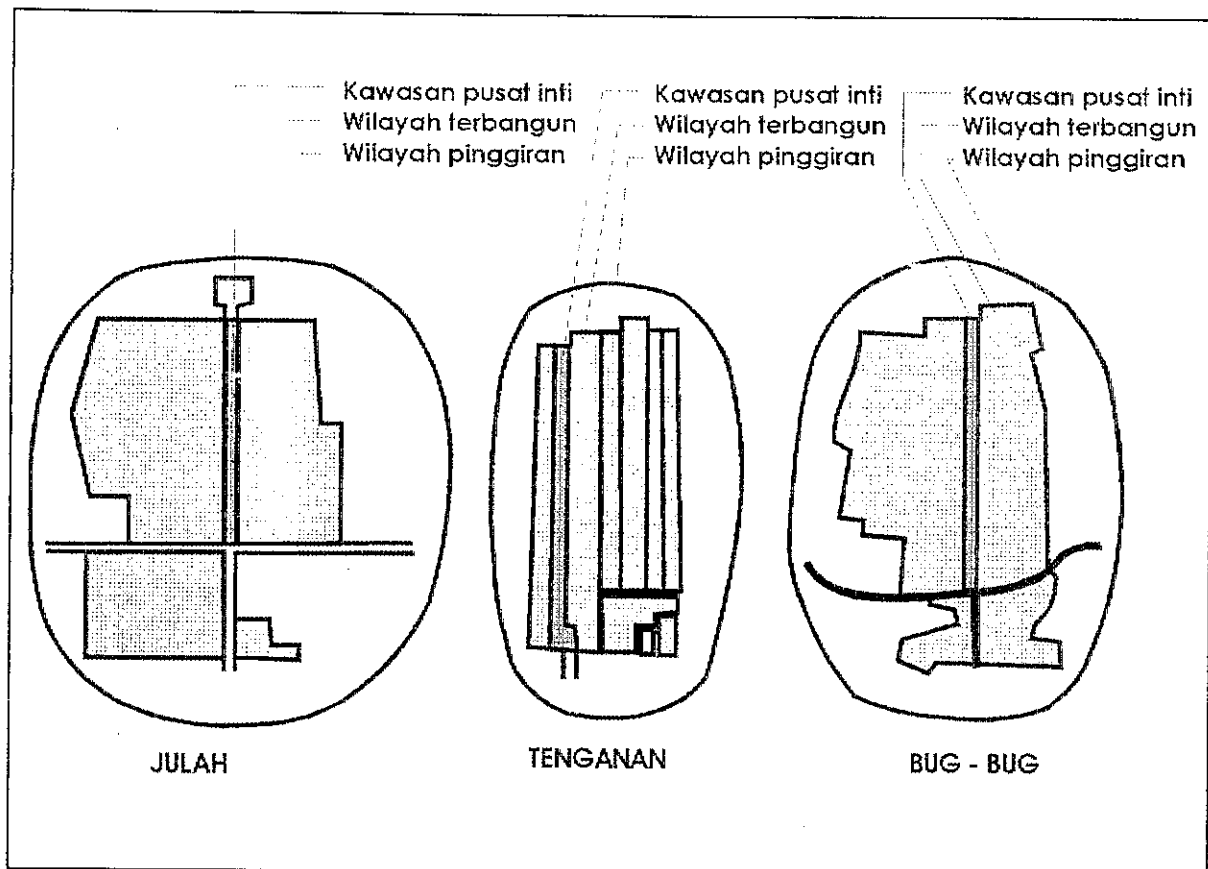
Nawa sanga atau *sanga mandala* adalah konsep tradisional yang didasarkan pada orientasi kosmologis masyarakat Bali sebagai pengejawantahan cara menuju ke kehidupan harmonis (Eko Budihardjo, 1986). *Nawa sanga* menunjuk ke arah delapan penjuru angin ditambah titik pusat ditengah. Dari kesembilan orientasi ini yang paling dominan adalah orientasi dengan sumbu “gunung-laut” dan sumbu “terbit-terbenamnya matahari”. Daerah yang paling sakral selalu ditempatkan pada arah gunung Agung, sedang daerah yang sifatnya profan di tempatkan pada arah yang menuju ke laut. (Penjabaran konsep nawa sanga dalam komposisi ruang dapat dilihat pada uraian Aspek fungsional.)

c. Aspek Morfologis

Peruntukan ruang dalam suatu desa adat dapat dikelompokkan dalam 3 peruntukan, yaitu : peruntukan inti, peruntukan terbangun dan peruntukan pinggiran. (seperti pada gambar 2.5)

Peruntukan inti pada suatu desa adat yang berpola linear terletak pada sumbu jalan pada peruntukan terbangun, atau jalan utama yang menuju ke pura desa. Pada desa adat yang berpola perempatan peruntukan intinya berada pada persimpangan jalan tersebut. *Peruntukan terbangun* adalah merupakan wilayah lama yang dibangun pada awal terbentuknya desa adat tersebut. Biasanya berada disekitar peruntukan inti. *Peruntukan pinggiran* adalah wilayah yang terletak di luar wilayah terbangun, tetapi, masih di bawah kontrol desa adat. Pada beberapa desa adat peruntukan pinggiran ini terletak pura desa dan pura dalem.

GAMBAR 2.5
MORPHOLOGI PERMUKIMAN TRADISIONAL BALI



Sumber : Ardi P. Parimin (1986)

d. Aspek Fungsional

Yang dimaksud dengan aspek fungsional dalam uraian ini adalah fungsi elemen ruang dalam kaitannya dengan orientasi kosmologis, yang tercermin pada komposisi dan formasi ruang. Dari konsep *nawa sanga* yang bersifat abstrak ini diterjemahkan ke dalam konsep fisik, baik dalam skala rumah maupun dalam skala desa adat. Pada skala rumah dengan adanya pembagian ruang imajiner ke dalam 9 segmen. Dimana tiap segmen diperuntukkan berdasarkan tingkat sakral dan profannya. Elemen ruang yang paling sakral seperti *merajan* (pura rumah tangga) ditempatkan pada segmen sakral (*utama*), yaitu

pada arah *kaja-kangin*. Dapur, tempat tidur, dan tempat bekerja di tempatkan pada segmen *madya*. Kandang ternak dan pintu di tempatkan pada segmen *nista*. Dalam skala desa adat, penerapan konsep *nawa sanga*, ada 3 macam pola tata ruang, yaitu :

1. Pola Perempatan

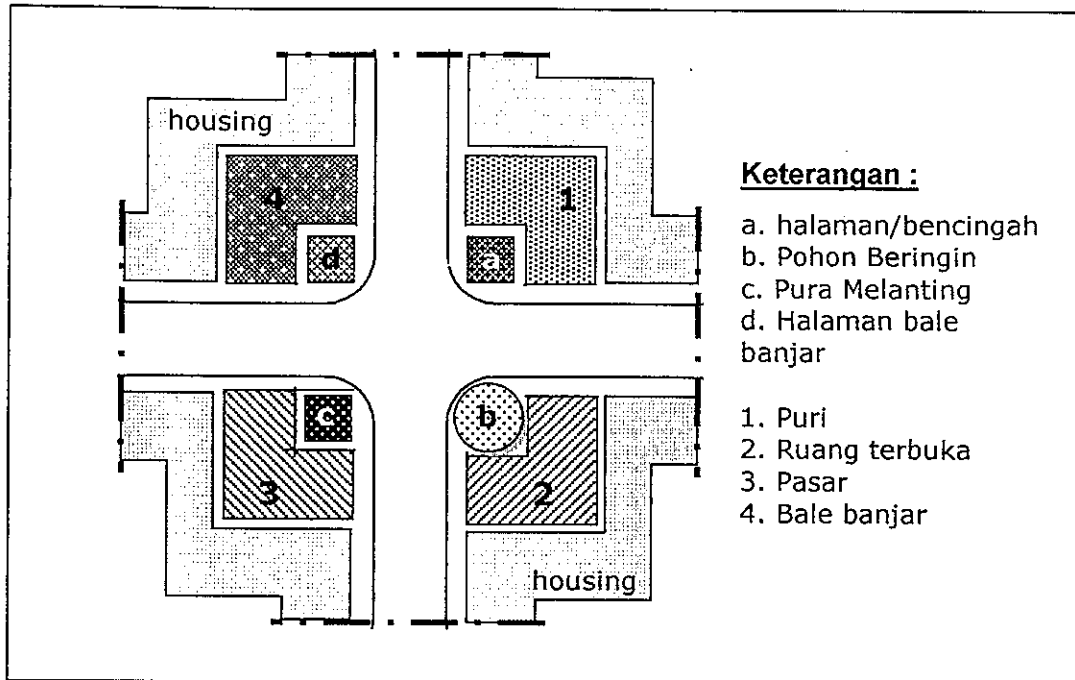
Pola perempetan jalan terbentuk dari perpotongan sumbu *kaja-kelod* (utara-selatan) dengan sumbu *kangin-kauh* (timur-barat). Berdasarkan konsep *Nawa-sanga*, maka pada daerah *kaja-kangin* yang mengarah ke Gunung Agung diperuntukkan untuk bangunan suci, yaitu *Pura Puseh*. Demikian halnya dengan letak *Pura Dalem* dan *setra* (kuburan desa) berada di *Kelod-kauh* (barat-daya) yang mengarah ke laut. Peruntukan permukiman dan *Bale Banjar* berada pada peruntukan *madya* . (lihat gambar 2.6)

2. Pola-Linear

Pada pola linear nampaknya konsep *Nawa-sanga* tidak begitu berperan. Orientasi kosmologis lebih didominasi oleh sumbu *kaja-kelod* (utara-selatan) dan sumbu *kangin-kauh* (timur-barat). Pada bagian ujung desa adat (*kaja*) diperuntukkan untuk *Pura* (*pura bale agung* dan *pura puseh*). Sedang di ujung *kelod* diperuntukkan untuk *Pura Dalem* (kematian) dan kuburan desa. Diantara kedua daerah tersebut terletak permukiman penduduk dan fasilitas umum (balai banjar dan pasar) yang terletak di plaza umum (lihat gambar 2.7)

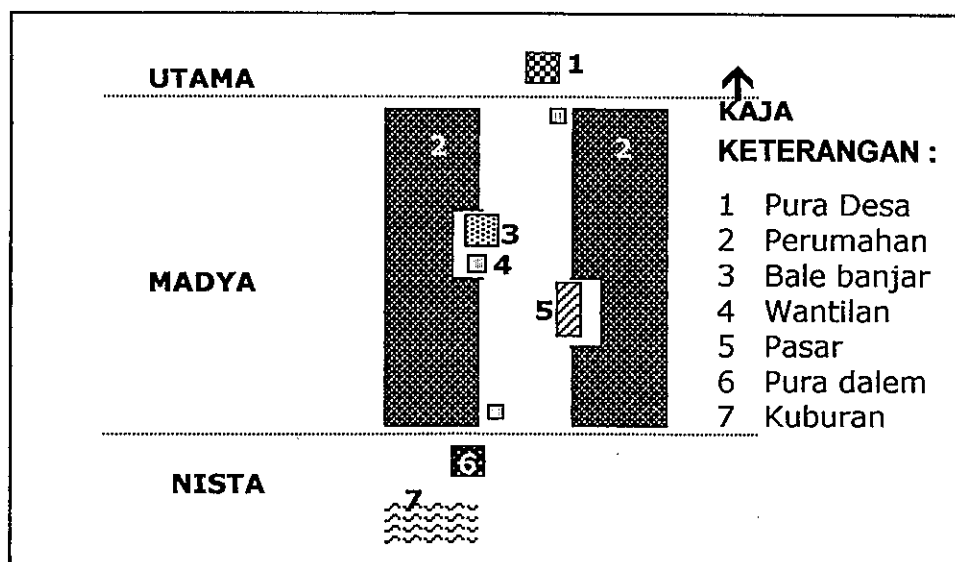
Pola linear ini pada umumnya terdapat pada desa adat di daerah pegunungan di Bali. Keadaan geofrafis yang berlereng diatasi oleh masyarakat dengan membuat teras sering untuk menghindari erosi dan longsor.

GAMBAR 2.6
POLA PEMPATAN TATA RUANG TRADISIONAL BALI



Sumber : Eko Budihardjo, 1985

GAMBAR 2.7
POLA LINIER TATA RUANG TRADISIONAL BALI

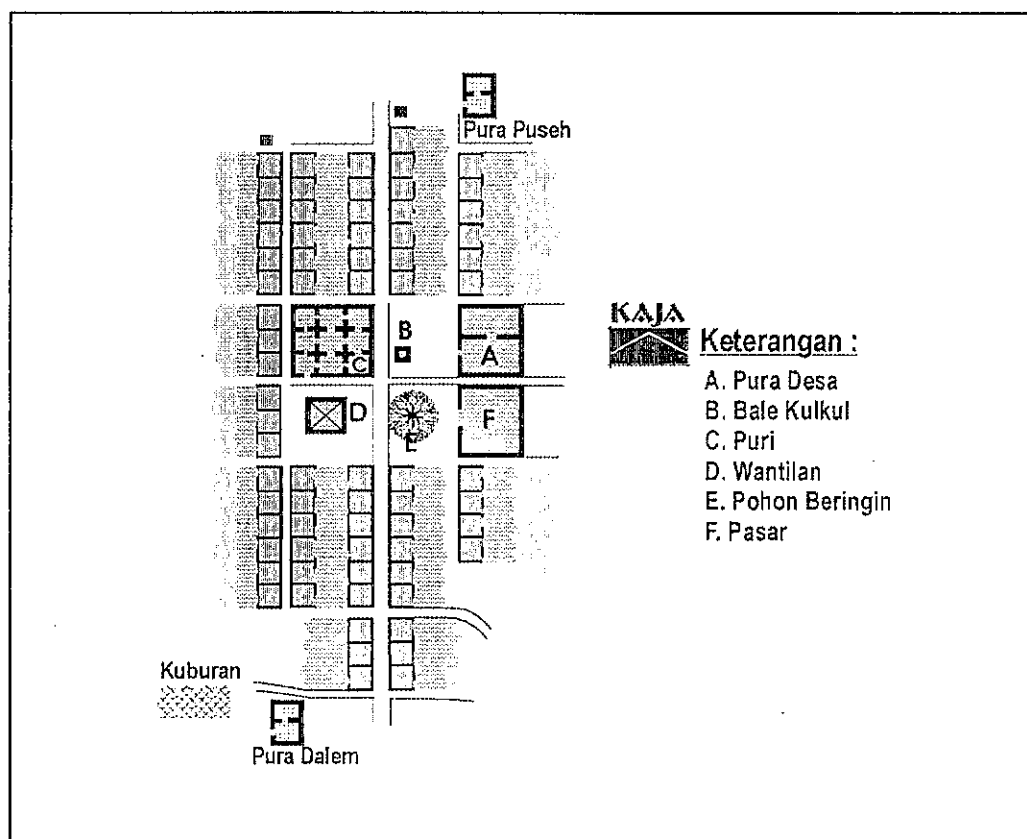


Sumber : Eko Budihardjo, 1985

3. Pola Kombinasi

Pola kombinasi merupakan paduan antara pola perempatan dengan pola linear. Pola sumbu desa adat memakai pola perempatan, namun demikian sistem perletakan elemen bangunan mengikuti pola linear. Perumahan dan fasilitas umum terletak pada ruang terbuka yang ada ditengah-tengah desa adat. Lokasi bagian sakral dan profan masing-masing terletak pada ujung *kaja* dan *kelod* desa adat (lihat gambar 2.8)

GAMBAR 2.8
POLA KOMBINASI TATA RUANG TRADISIONAL BALI



Sumber : Eko Budiardjo, 1986

Pola tata ruang yang dikemukakan diatas merupakan penyederhanaan dari pada pola tata ruang yang pada kenyataan sangat bervariasi. Setiap desa adat di Bali mempunyai pola tersendiri yang disebabkan oleh faktor yang telah dikemukakan pada uraian Aspek Sosial. Dari ilustrasi tersebut tata ruang tradisional Bali dapat diklasifikasikan dalam 2 type, yaitu :

- a. *Type Bali Aga* merupakan tata ruang desa adat asli Bali yang kurang dipengaruhi oleh Kerajaan Hindu Jawa. Lokasi desa adat ini terletak di daerah pegunungan yang membentang membujur di tengah-tengah Bali, sebagian berlokasi di Bali utara dan Selatan. Jumlah penduduk desa adat ini relatif kurang dibanding yang ada di Bali dataran. Bentuk fisik pola tata ruang Bali Aga dicirikan dengan adanya jalan utama yang berbentuk linear yang berfungsi sebagai ruang terbuka milik komunitas dan sekaligus sebagai sumbu utama desa adat. Contoh tata ruang Bali Aga : Julah, tenganan dan Bugbug.
- b. *Type Bali Dataran*, merupakan tata ruang tradisional yang banyak dipengaruhi oleh Kerajaan Hindu Jawa. Tata ruang type ini tersebar di dataran bagian selatan Bali yang berpenduduk lebih besar dibanding type pertama. Ciri utama tata ruang ini adalah adanya Pola perempatan jalan yang mempunyai 2 sumbu utama, sumbu pertama adalah jalan yang membujur arah utara-selatan yang memotong sumbu kedua berupa jalan membujur arah Timur-Barat (Ardi P. Parimin, 1986).

2.5. Kerangka Teori dan Pertanyaan Penelitian (*Research Question*)

2.5.1. Kerangka Teori

Dari uraian mengenai pariwisata, tata ruang vernakular dan tata ruang tradisional Bali, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan kerangka teori pada penelitian ini yaitu :

1. Perkembangan kegiatan pariwisata akan membawa dampak :

- Meningkatnya lapangan kerja baru pada berbagai industri di kawasan wisata.
- Meningkatnya pertumbuhan penduduk.
- Naiknya harga lahan dan terjadinya spekulasi lahan.
- Konversi penggunaan lahan dari pertanian ke kegiatan pariwisata.
- Konversi lapangan kerja penduduk dari pertanian ke kegiatan pariwisata.

Butir 1 diatas dapat dijadikan indikator untuk mengetahui kegiatan utama yang dilakukan oleh wisatawan, pengusaha ataupun masyarakat setempat dalam suatu kawasan yang berorientasi ke kegiatan pariwisata. Selanjutnya dapat ditelusuri lebih jauh dampak kegiatan utama tersebut terhadap aspek pola ruang.

2. Indikator dampak kegiatan pariwisata terhadap pola tata ruang : Penggunaan spasial yang mengutamakan kegiatan ekonomi daripada kegiatan sosial. Dampak yang bersifat spasial ditentukan oleh faktor-faktor :

- Karakteristik wisatawan : status sosial dan motivasi kunjungan
- Kebijakan pemerintah yang menyangkut tujuan pengembangan suatu kawasan wisata.

3. Konsep pola ruang tradisional Bali:

- dari aspek Morfologi permukiman yang melahirkan konsep peruntukan lahan : peruntukan terbangun, peruntukan inti dan peruntukan pinggiran.
- dari aspek simbolis :
 - Hierarki ruang : Utama, Madya, dan Nista.
 - Orientasi Kosmologis : sumbu-sumbu desa dan permukiman kaja-kelod.
- Aspek sosial yang menyangkut sistem kekerabatan masyarakat Bali yang dicirikan dengan adanya sistem desa adat
- Aspek Fungsional menyangkut fungsi pola ruang tradisional Bali pada dasarnya berfungsi keagamaan dan fungsi sosial yang dicirikan dengan adanya 3 pura desa

4. Tata ruang vernakular merupakan suatu wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang berdasarkan pengetahuan tradisional dan budaya setempat, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan jaman serta diwujudkan tidak berdasarkan rekayasa desain.

Faktor -- faktor yang paling berpengaruh adalah faktor fisik dan alam, faktor sosial budaya, efek dari kebudayaan sebelumnya, efek dari kebudayaan dan sosial lainnya

2.5.2. Pertanyaan Penelitian (*Research Question*)

Dari kajian teoritik mengenai pariwisata, tata ruang vernakular dan tata ruang tradisional Bali yang kemudian disusun dalam kerangka teori, dapat dikatakan bahwa kegiatan pariwisata yang ada di suatu daerah/kawasan pariwisata akan berpengaruh kepada terjadinya perubahan -- perubahan/penyesuaian -- penyesuaian pada pola tata ruang tradisional yang ada pada kawasan pariwisata tersebut dan penyesuaian tersebut

merupakan suatu indikasi terbentuknya suatu pola ruang vernakular pada kawasan pariwisata tersebut. Indikasi ini bisa terjadi pada semua kawasan pariwisata yang sebelumnya sudah ada suatu pola ruang tradisional termasuk kawasan pariwisata Lovina.

Dari uraian diatas perlu diketahui bentuk pola ruang vernakular pada kawasan pariwisata Lovina sehingga dapat dimunculkan suatu pertanyaan penelitian secara umum yaitu "*Bagaimana bentuk pola tata ruang vernakular pada masing – masing desa adat di kawasan pariwisata Lovina*". pertanyaan penelitian (*Research Question*) tersebut dapat dirinci lagi sebagai berikut :

- ✦ Bagaimana zonasi dari masing – masing Desa Adat di kawasan pariwisata Lovina berdasarkan zona *utama*, *madya* dan *nista*?
- ✦ Apa saja parameter yang mempengaruhi perubahan pola tata ruang tradisional Bali dari sisi wisatawan dan pengusaha, pada masing – masing Desa Adat di kawasan pariwisata Lovina yang terkena pengaruh pariwisata?
- ✦ Apa saja parameter yang mempengaruhi keberadaan pola tata ruang tradisional Bali dari sisi masyarakat pada masing – masing Desa Adat di kawasan pariwisata Lovina?
- ✦ Sejauh mana batasan – batasan dari nilai tata ruang tradisional Bali yang boleh berubah dan tidak boleh berubah?

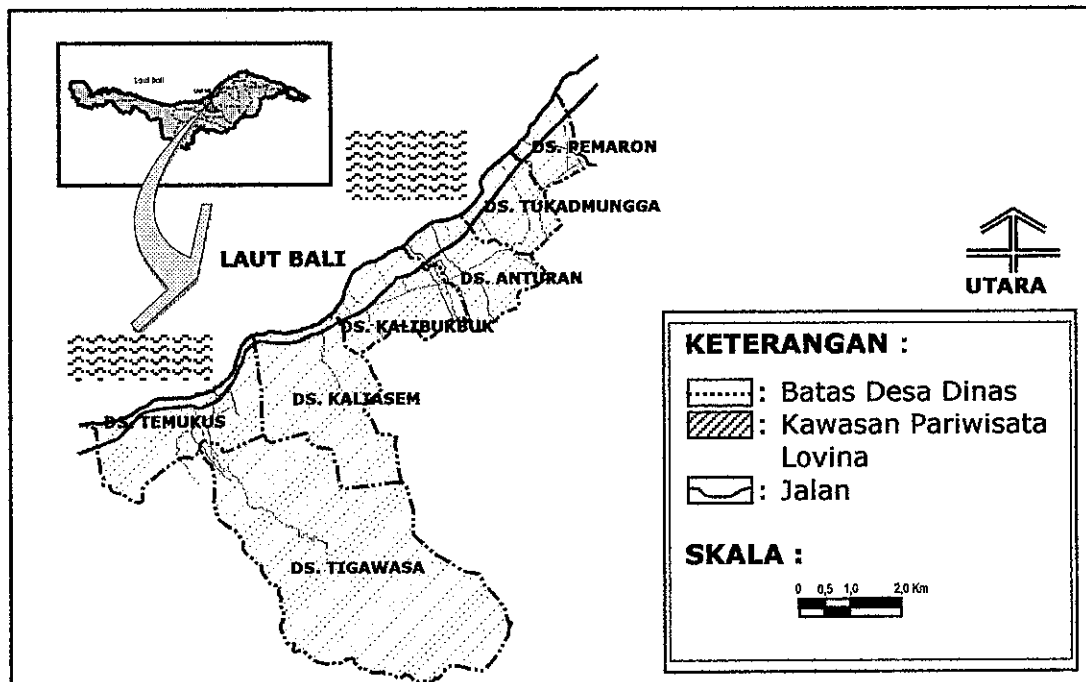
BAB III

GAMBARAN UMUM KAWASAN PARIWISATA LOVINA

3.1. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Berdasarkan pendekatan geografis, kawasan pariwisata Lovina berada pada posisi 08°08' 40" Lintang Selatan dan 114°58'12" Bujur Timur, sedangkan secara administrasi termasuk wilayah Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. (Gambar 1.1 dan 1.5). Berdasarkan SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 528 tahun 1993, kawasan pariwisata Lovina meliputi 2 kecamatan dan 7 Desa Dinas. seperti pada gambar 3.1.

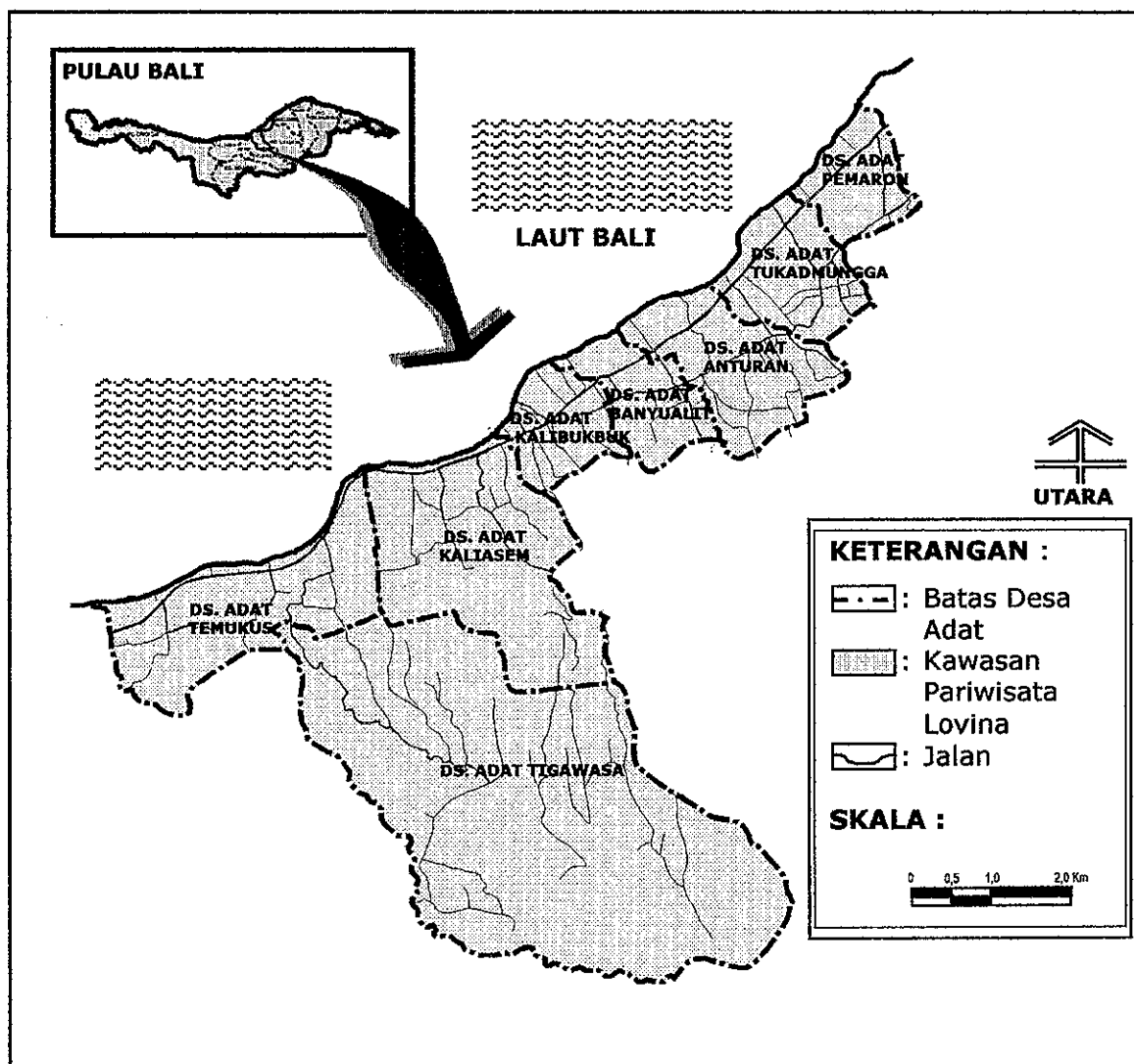
GAMBAR 3.1
DESA DINAS PADA KAWASAN PARIWISATA LOVINA



Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2000

Dari gambar 2.1 terlihat kawasan pariwisata Lovina terdiri dari 7 Desa Dinas yaitu Desa Kalibukbuk, Desa Pemaron, Desa Tukad Mungga dan Desa Anturan (Kecamatan Buleleng), Desa Kaliasem, Desa Temukus dan Desa Tigawasa (Kecamatan Banjar). Selain terbagi kedalam desa dinas, kawasan pariwisata Lovina juga terdiri dari 8 desa adat, seperti pada gambar 3.2 berikut :

GANBAR 3.2
DESA ADAT PADA KAWASAN PARIWISATA LOVINA



Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2000

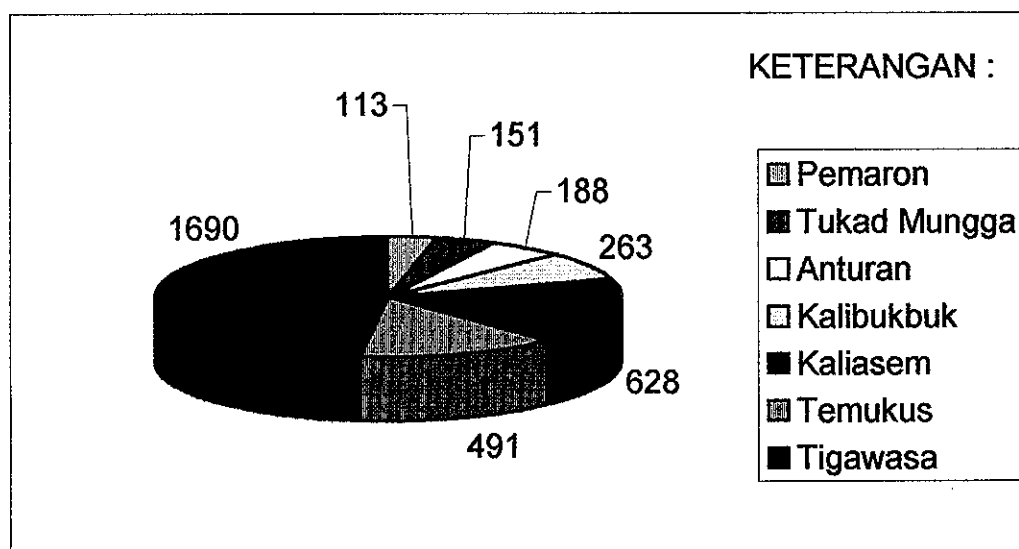
Luas kawasan pariwisata Lovina adalah 3.524 Ha, Desa Tigawasa adalah desa yang terluas (1.690 Ha) sedangkan desa dengan luas terkecil adalah Desa pemaron (113 Ha), lebih jelas disajikan pada Tabel III.1 dan gambar 3.3 berikut :

TABEL III.1
DESA –DESA DI KAWASAN PARIWISATA LOVINA

KECAMATAN	DESA DINAS	LUAS (HA)	DESA ADAT
Buleleng	Pemaron	113	Pemaron
	Tukad Mungga	151	Tukad Mungga
	Anturan	188	Anturan
	Kalibukbuk	263	Kalibubuk Banyualit
Banjar	Kaliasem	628	Kaliasem
	Temukus	491	Temukus
	Tigawasa	1.690	Tigawasa
Jumlah	7 Desa Dinas	3.524 Ha	8 Desa Adat

Sumber: Bappeda Kabupaten Buleleng, 2001

GAMBAR 3.3
PIE CHART LUAS DESA –DESA DI KAWASAN PARIWISATA LOVINA



Sumber: Bappeda Kabupaten Buleleng, 2001

3.2. Kependudukan

3.2.1. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Distribusi dan perkembangan penduduk di kawasan pariwisata Lovina dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Distribusi penduduk masing – masing desa pada kawasan pariwisata Lovina secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.2 berikut :

TABEL. III.2.
DISTRIBUSI DAN PERKEMBANGAN PENDUDUK
DI KAWASAN PARIWISATA LOVINA

No	DESA	PENDUDUK									Pert. (%)
		1998			1999			2000			
		LK.	PR.	JML	LK	PR.	JML	LK.	PR	JML	
1	Kalibukbuk	1.995	2.045	4.040	2.338	2.241	4.579	2.338	2.273	4.611	14,13
2	Anturan	2.063	2.211	4.274	2.094	2.265	4.359	2.094	2.297	4.391	2,74
3	Tk.Mungga	1.400	1.430	2.830	1.445	1.461	2.906	1.445	1.517	2.962	4,66
4	Pemaron	1.360	1.371	2.731	1.523	1.532	3.055	1.523	1.557	3.080	12,78
5	Kaliasem	2.349	2.299	4.648	2.352	2.295	4.647	2.352	2.297	4.649	0,02
6	Tigawasa	2.153	2.211	4.364	2.264	2.330	4.594	2.264	2.328	4.592	5,22
7	Temukus	2.202	2.428	4.630	2.568	2.576	5.144	2.568	2.990	5.558	20,04
	Jumlah	13522	13995	27517	14584	14700	29284	14584	15259	29843	8,45

Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2001

Dari tabel III.2 terlihat, jumlah penduduk kawasan pariwisata Lovina pada tahun 2000 sebanyak, 29843 Jiwa, dengan distribusi penduduk terbesar terdapat di Desa Temukus sebanyak 5.558 jiwa, sedangkan distribusi penduduk paling rendah terdapat di Desa Tukad Mungga dengan jumlah Penduduk 2.962 jiwa. Kepadatan penduduk dikawasan pariwisata Lovina secara rinci adalah seperti pada Tabel III.3.

TABEL III.3
KEPADATAN PENDUDUK DI KAWASAN PARIWISATA LOVINA

NO.	DESA	LUAS (Ha)	JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK					
			1998		1999		2000	
			Jumlah	(jiwa/Ha)	Jumlah	(jiwa/Ha)	Jumlah	(jiwa/Ha)
1	Kalibukbuk	263	4.040	15,36	4.579	17,41	4.611	17,53
2	Anturan	247	4.274	17,30	4.359	17,65	4.391	17,78
3	Tk. Mungga	148	2.830	19,12	2.906	19,64	2.962	20,01
4	Pemaron	146	2.731	18,71	3.055	20,92	3.080	21,10
5	Kaliasem	628	4.648	7,40	4.647	7,40	4.649	7,40
6	Tigawasa	1.690	4.364	2,58	4.594	2,72	4.592	2,72
7	Temukus	491	4.630	9,43	5.144	10,48	5.558	11,32
Jumlah		3.613	27517	7,62	29284	8,11	29843	8,26

Sumber : Bappeda Kabupaten Bulcleng, 2001

Dari tabel III.3 terlihat, kepadatan penduduk di kawasan pariwisata Lovina, menunjukkan bahwa di Desa Pemaron yang memiliki luas wilayah terkecil mempunyai kepadatan penduduk terpadat yaitu sebesar 21,10 Jiwa/Ha, kemudian diikuti oleh Desa Tukad Mungga dengan kepadatan sebesar 20,01 jiwa/Ha. Kepadatan terendah terdapat di Desa Tigawasa, yaitu sebesar 2,72 jiwa/Ha.

3.2.2. Jumlah Warga Inti Desa Adat

Warga inti desa adat yang dimaksudkan adalah setiap pasangan suami istri dengan anggota keluarganya atau dapat disamakan dengan satu unit kepala keluarga. Jumlah warga inti desa adat pada kawasan pariwisata Lovina tahun 1998 adalah 3252 kepala keluarga, tahun 1999 adalah 3298 kepala keluarga dan pada tahun 2000 sebanyak 3349 kepala keluarga. Jumlah warga inti desa adat pada masing – masing desa adat di kawasan pariwisata Lovina dapat dilihat seperti pada tabel III.4 berikut.

TABEL III.4
JUMLAH WARGA INTI DESA ADAT DI KAWASAN PARIWISATA LOVINA

NO.	DESA ADAT	JUMLAH WARGA INTI		
		1998	1999	2000
1	Kaliasem	309	314	320
2	Kalibukbuk	370	375	382
3	Anturan	488	492	496
4	Tk. Mungga	339	344	349
5	Pemaron	283	289	295
6	Kaliasem	496	502	511
7	Tigawasa	476	485	492
8	Temukus	491	497	504
	Jumlah	3252	3298	3349

Sumber : PHDI Kabupaten Buleleng, 2002

3.2.3. Mata Pencaharian

Matapencaharian penduduk di kawasan pariwisata Lovina adalah seperti pada tabel

III.5 berikut :

TABEL III.5
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
DI KAWASAN PARIWISATA LOVINA, TAHUN 2000

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATAPENCAHARIAN								
		P.Tanaman Pangan	Pertenak- an	Perikanan/ Nelayan	Pengangkut -an	Perbankan	PNS/ABRI	Jasa	Lainnya	Jumlah
1	Kalibukbuk	676	34	44	80	6	74	206	190	1.310
2	Anturan	592	168	133	75	6	69	148	120	1.311
3	Tk. Mungga	458	55	16	55	5	43	160	73	865
4	Pemaron	358	35	105	60	6	30	128	65	787
5	Kaliasem	2.200	14	60	21	14	68	23	-	2.400
6	Tigawasa	815	24	-	20	1	31	16	30	937
7	Temukus	2144	17	62	71	12	92	22	36	2.456
	Jumlah	7.243	347	420	382	50	407	703	514	10.066

Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2001

Dari tabel III.5 terlihat lapangan usaha yang paling banyak diusahakan penduduk adalah dibidang pertanian tanaman pangan (7.243 jiwa), diikuti kegiatan dibidang jasa

sebanyak 703 jiwa serta perikanan/nelayan sebanyak 4320 jiwa. Sedangkan mata pencaharian penduduk yang paling sedikit adalah usaha dibidang perbankan (50 jiwa).

3.3. Kunjungan Wisatawan

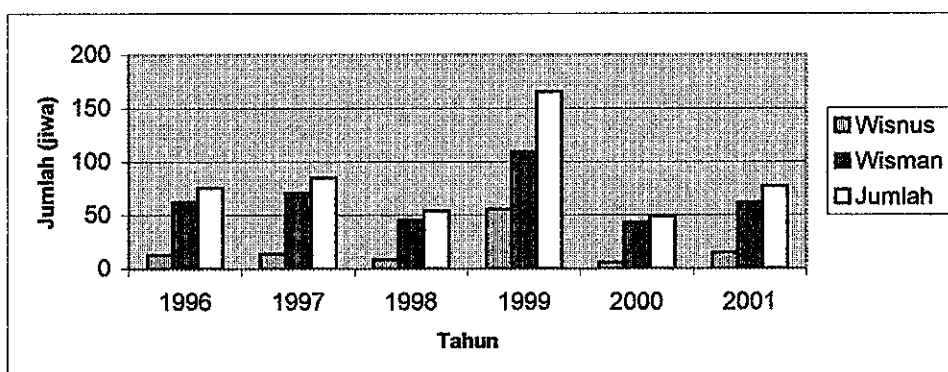
Perkembangan kunjungan wisatawan ke kawasan pariwisata Lovina, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara selama 6 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, kecuali tahun 1998 dan tahun 2000, seperti terlihat pada tabel Tabel III.6 dan gambar 3.4 berikut :

TABEL III.6
PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATAWAN
KE KAWASAN PARIWISATA LOVINA TAHUN 1996-2001

No.	Tahun	Wisnus	Wisman	Jumlah	Peningkatan (%)
1	1996	12.839	62.490	75.329	
2	1997	13.857	70.980	84.837	12,6%
3	1998	8.258	45.642	53.900	-36,5%
4	1999	55.740	109.518	165.258	206,6%
5	2000	5.727	43.462	49.189	-70,2%
6	2001	15.052	61.709	76.761	42,0%

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, 2002.

GAMBAR 3.4
GRAFIK PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATAWAN
KE KAWASAN PARIWISATA LOVINA TAHUN 1996-2001



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, 2002

Dari tabel III.6 dan gambar 3.4 terlihat pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 jumlah wisatawan meningkat dari 75.329 (1996) menjadi 84.837 (1997) atau mengalami peningkatan sebesar 12,6%. Kemudian menurun pada tahun 1998 menjadi 53.900 orang atau mengalami penurunan sebesar 36,5% dari tahun 1997, dan meningkat lagi pada tahun 1999 menjadi 165.258 orang wisatawan atau mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu 206,6% dari tahun 1998. Pada tahun 2000 kunjungan wisatawan mengalami penurunan lagi menjadi hanya 49.189 orang atau sebesar 70,2% dari tahun 1999. Penurunan ini terkait dengan krisis ekonomi dan kondisi keamanan Indonesia yang semakin rawan. Sedangkan pada tahun 2001 kunjungan wisatawan ke Lovina meningkat lagi yaitu sebesar 76.761 orang atau mengalami peningkatan sebesar 42,0% dari tahun 2000.

3.4. Akomodasi Pariwisata

Fasilitas wisata yang telah berkembang di kawasan pariwisata Lovina adalah Hotel berbintang, Hotel Melati, Pondok Wisata, Restoran dan Bar. Secara rinci jumlah fasilitas wisata disajikan pada Tabel III.7 dan gambar 3.5 berikut :

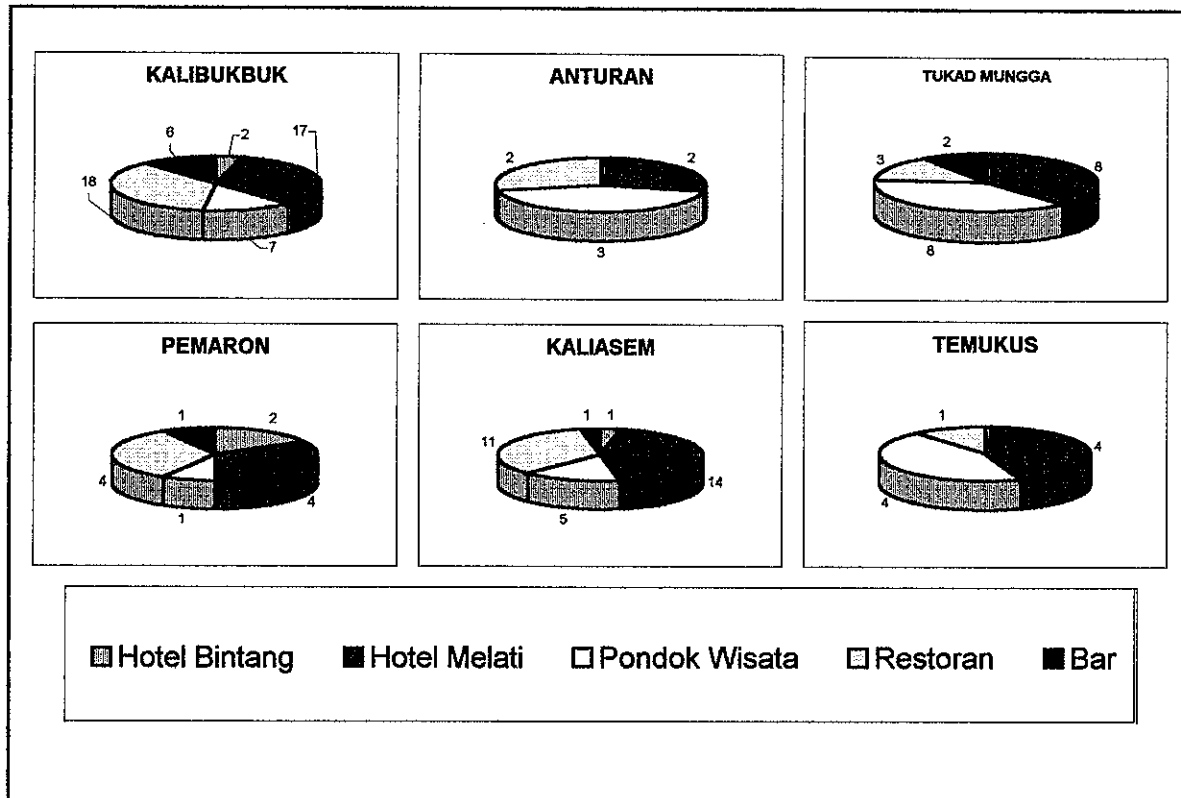
TABEL. III.7

JUMLAH FASILITAS WISATA DI KAWASAN PARIWISATA LOVINA, TAHUN 2000

NO.	DESA	FASILITAS WISATA					JUMLAH
		HOTEL BINTANG	HOTEL MELATI	PONDOK WISATA	RESTORAN	BAR	
1	Kalibukbuk	2	17	7	18	6	50
2	Anturan	-	2	3	2	-	7
3	Tk. Mungga	-	8	8	3	2	21
4	Pemaron	2	4	1	4	1	12
5	Kaliasem	1	14	5	11	1	32
6	Tigawasa	-	-	-	-	-	-
7	Temukus	-	4	4	1	-	9
	Jumlah	5	49	28	39	10	131

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, 2001.

GAMBAR 3.5
PIE CHART JUMLAH FASILITAS WISATA
DI KAWASAN PARIWISATA LOVINA, TAHUN 2000



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, 2001

Dari gambar 3.5 terlihat di Desa Kalibukbuk terdapat 2 buah hotel berbintang, 17 buah hotel melati, 7 buah pondok wisata, 18 buah restoran dan 6 buah bar, di Desa Anturan tidak ada hotel berbintang, 2 buah hotel melati, 3 buah pondok wisata, 2 buah restoran, di Desa Tukad Mungga tidak ada hotel berbintang, 8 buah hotel melati, 8 buah pondok wisata, 3 buah restoran dan 2 buah bar, di Desa Pamaron terdapat 2 buah hotel berbintang, 4 buah hotel melati, 1 buah pondok wisata, 4 buah restoran dan 1 buah bar, di Desa Kaliasem terdapat 1 buah hotel berbintang, 14 buah hotel melati, 5 buah pondok wisata, 11 buah restoran dan 1 buah bar, di Desa Temukus tidak ada hotel berbintang, 4 buah hotel

melati, 4 buah pondok wisata dan 1 buah restoran, sedangkan di Desa Tigawasa tidak ada fasilitas akomodasi pariwisata.

3.5. Tata Guna Lahan (*Land Use*) pada Kawasan Pariwisata Lovina

Penggunaan lahan di kawasan pariwisata Lovina masih didominasi oleh kegiatan bidang pertanian seperti sawah, perkebunan dan tegalan yang luasnya mencapai 3.019,92 Ha (83,54 %) sedangkan penggunaan permukiman, kuburan dan lainnya hanya sebesar 593,08 Ha (16,46 %). Lebih jelas seperti pada tabel III.8 berikut :

TABEL III.8
PENGUNAAN LAHAN DI KAWASAN PARIWISATA LOVINA TAHUN 2000.

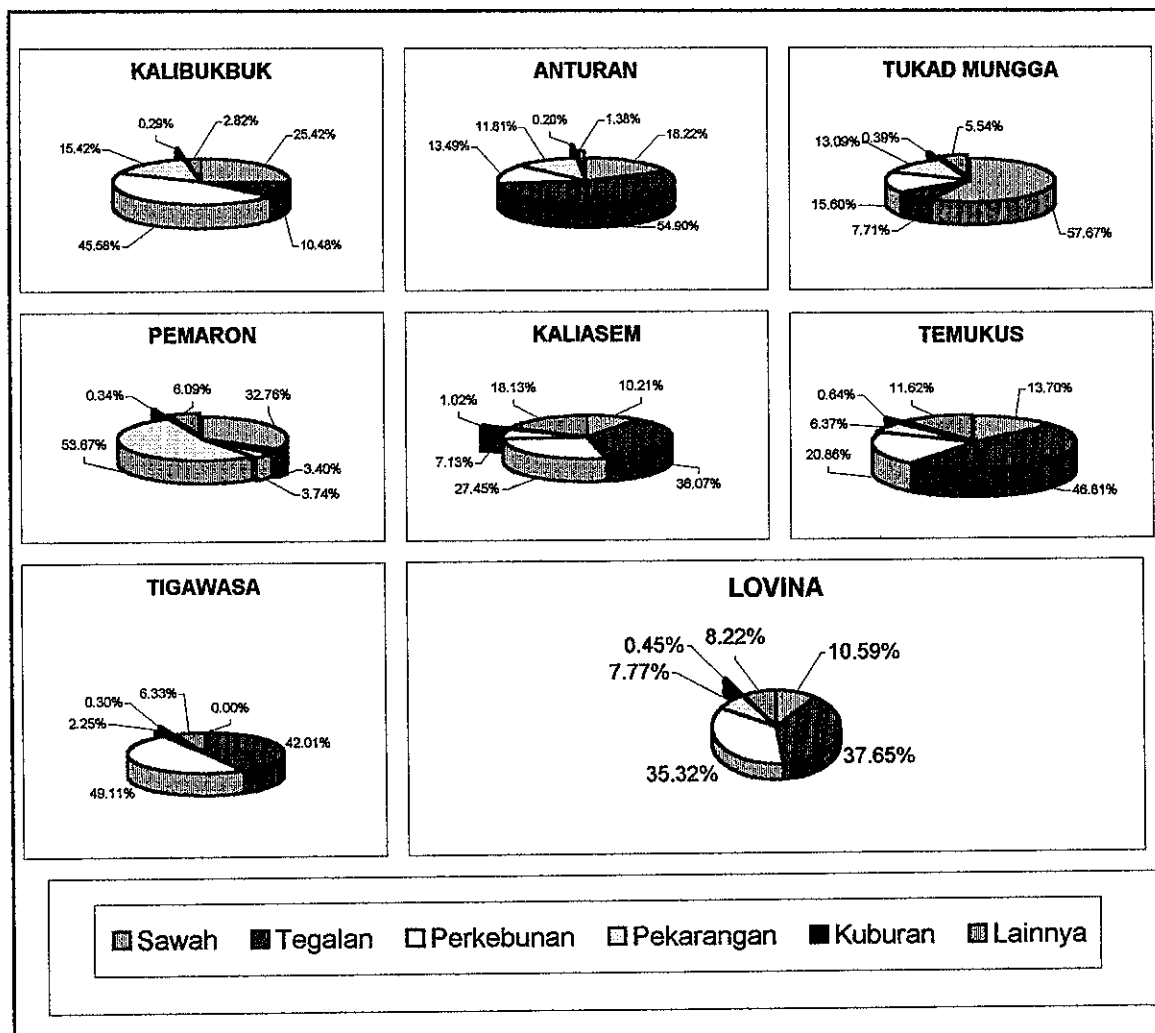
No	Desa	Luas (Ha)	Penggunaan lahan (Ha)					
			Sawah	Tegalan	Perkebunan	Pekarangan	Kuburan	Lainnya
1	Kalibukbuk	263	66,85	27,55	119,88	40,55	0,75	7,42
2	Anturan	247	45,00	135,60	33,32	29,18	0,50	3,40
3	Tk. Mungga	148	85,00	11,36	23,00	19,29	0,58	8,17
4	Pemaron	146	48,15	5,00	5,50	78,90	0,50	8,95
5	Kaliasem	628	50,13	177,11	134,76	35,00	5,00	89,00
6	Temukus	491	86,03	293,96	131,00	40,00	4,00	73,00
7	Tigawasa	1.690	-	710,00	830,00	38,00	5,00	107,00
Jumlah		3.613	382,76	1.360,58	1.276,46	280,92	16,33	296,94
Prosentase (%)			10,6%	37,7%	35,3%	7,8%	0,45%	8,2%

Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2001

Dari tabel III.8 terlihat secara keseluruhan penggunaan lahan (*land use*) pada kawasan pariwisata Lovina sebagian besar adalah berupa tegalan seluas 1.360,58 Ha, perkebunan seluas 1.276,46 Ha, sawah seluas 382,76 Ha, pekarangan seluas 280,92 Ha, kuburan seluas 16,33 Ha.

Prosentase penggunaan lahan pada masing – masing desa dapat digambarkan seperti pada gambar 3.6 berikut :

GAMBAR 3.6
PIE CHART PENGGUNAAN LAHAN
DI KAWASAN PARIWISATA LOVINA TAHUN 2000

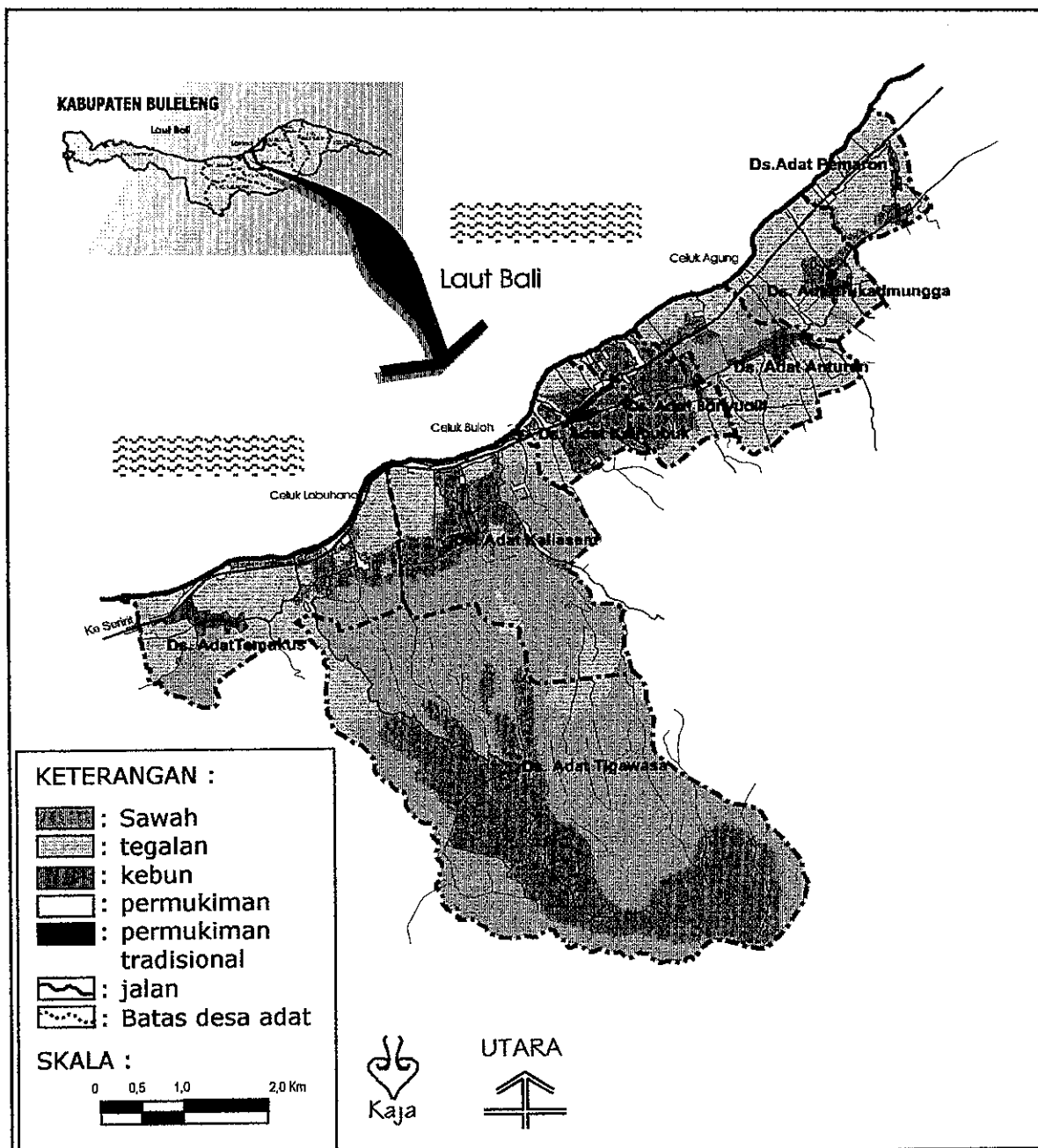


Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2001

Dari gambar 3.6 terlihat secara keseluruhan penggunaan lahan (*land use*) pada kawasan pariwisata Lovina sebagian besar adalah berupa tegalan mencapai 37,7% dari luas keseluruhan, perkebunan sebesar 35,3%, sawah sebesar 10,6%, pekarangan sebesar 7,8%,

kuburan sebesar 0,45%. Penggunaan lahan (*land use*) pada kawasan pariwisata Lovina adalah seperti pada gambar 3.7 berikut :

GAMBAR 3.7
PENGUNAAN LAHAN PADA KAWASAN PARIWISATA LOVINA



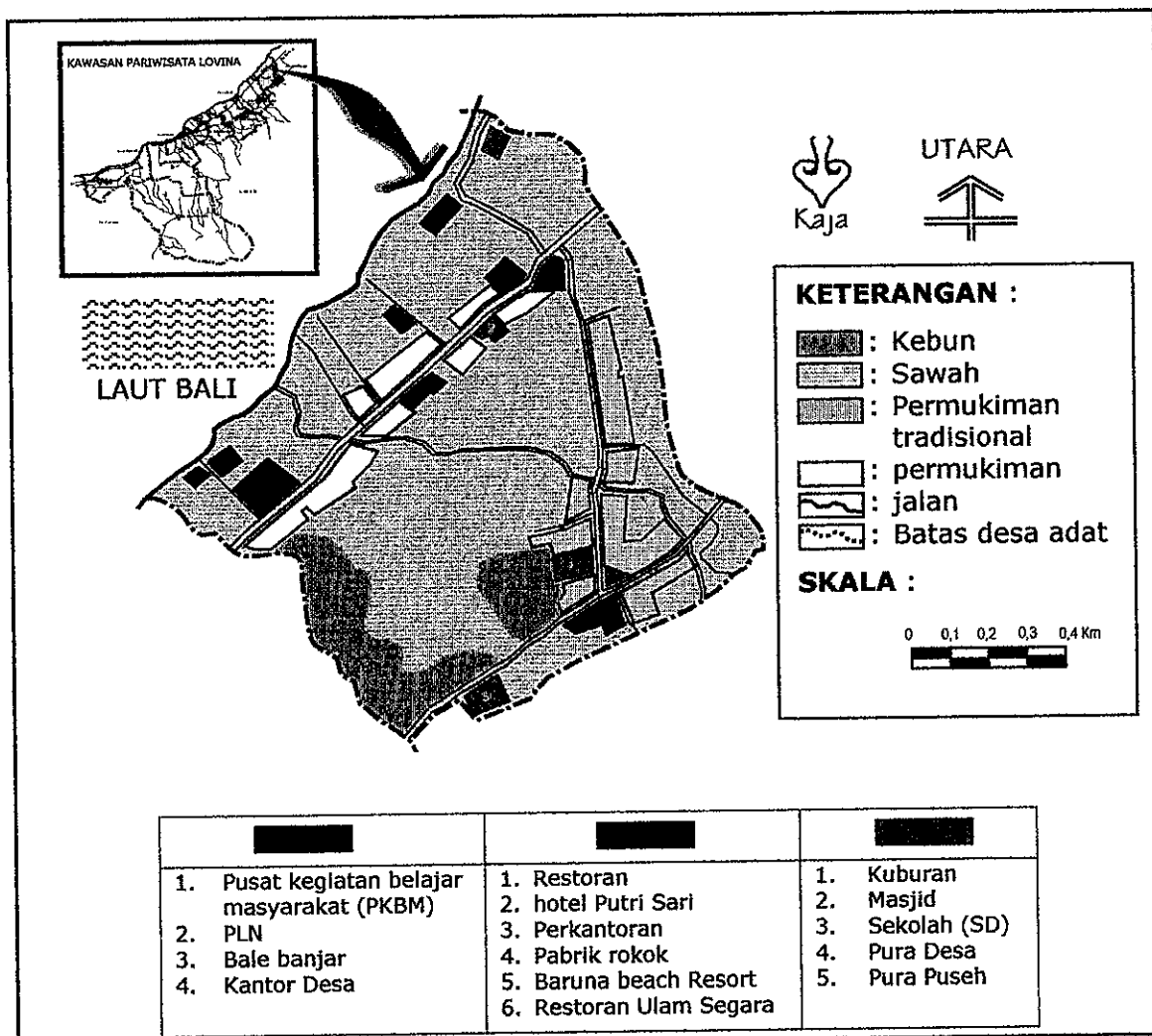
Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2000

Penggunaan lahan (*land use*) masing – masing desa adat pada kawasan pariwisata Lovina secara lebih terperinci adalah sebagai berikut :

a. *Land Use* Desa Adat Pemaron

Penggunaan lahan (*land use*) pada Desa Adat Pemaron adalah seperti pada gambar 3.8 berikut :

GAMBAR 3.8
PENGUNAAN LAHAN DESA ADAT PEMARON



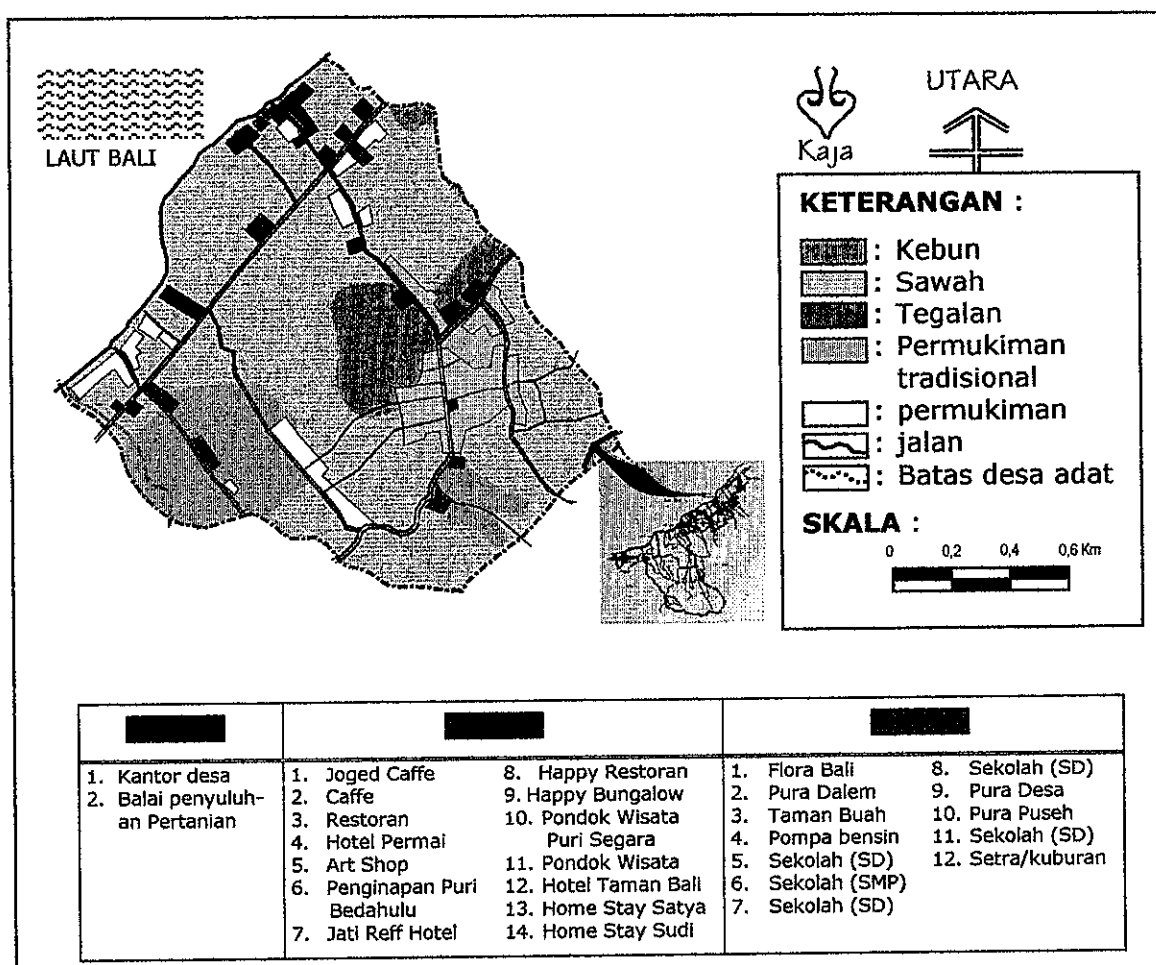
Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2000

Dari gambar 3.8 terlihat akomodasi pariwisata yang ada berupa hotel sebanyak 2 buah dan restoran sebanyak 2 buah, sedangkan atribut desa adat yang ada adalah pura puseh, pura desa, bale banjar dan *setra* (kuburan).

b. *Land Use* Desa Adat Tukad Mungga

Penggunaan lahan (*land use*) pada Desa Adat Tukad Mungga adalah seperti pada gambar 3.9 berikut :

GAMBAR 3.9
PENGUNAAN LAHAN DESA ADAT TUKAD MUNGGA



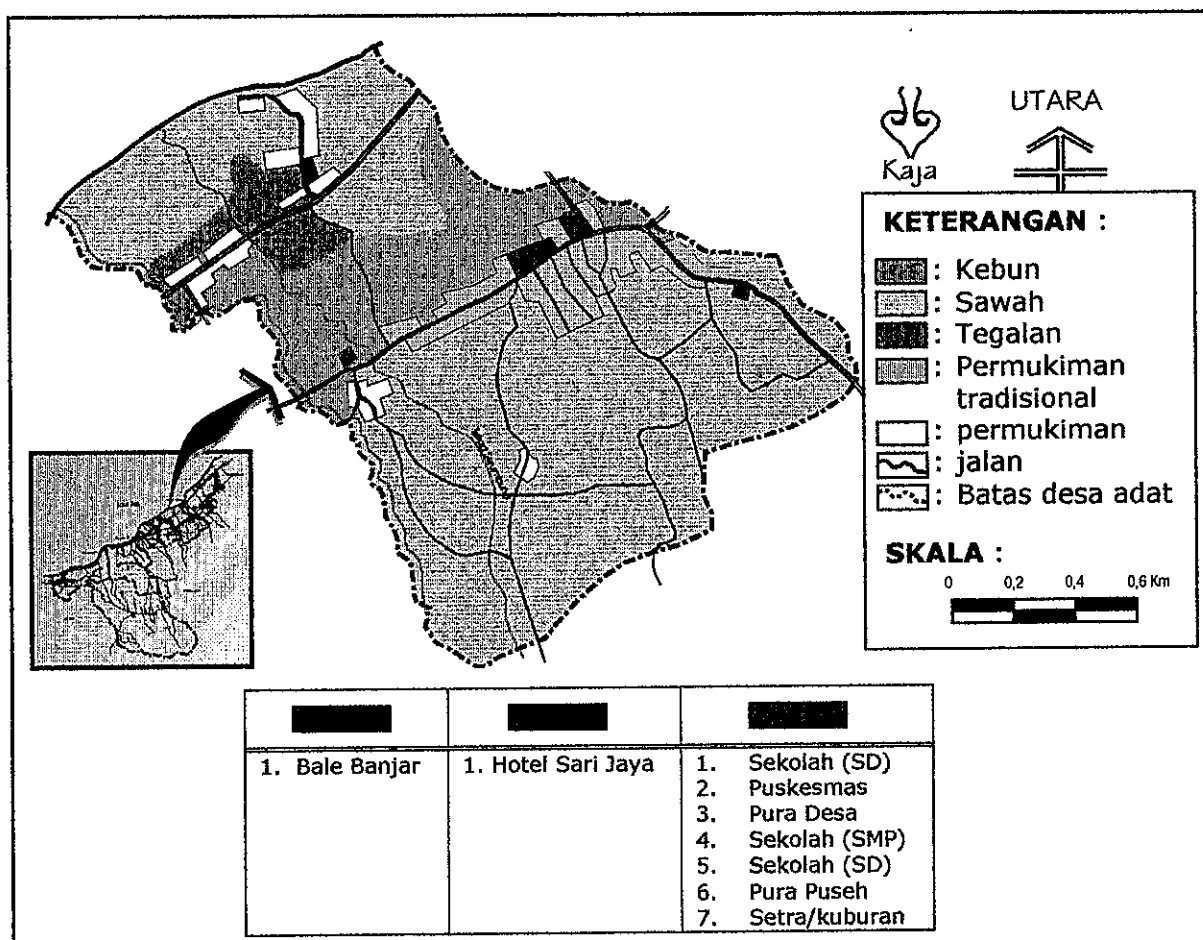
Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2000

Dari gambar 3.9 terlihat akomodasi pariwisata yang ada berupa hotel sebanyak 9 buah dan restoran sebanyak 2 buah, caffe sebanyak 2 buah sedangkan atribut desa adat yang ada adalah pura puseh, pura desa, pura dalem, bale banjar dan *setra* (kuburan).

c. *Land Use* Desa Adat Anturan

Penggunaan lahan (*land use*) pada Desa Adat Anturan adalah seperti pada gambar 3.10 berikut :

GAMBAR 3.10
PENGUNAAN LAHAN DESA ADAT ANTURAN



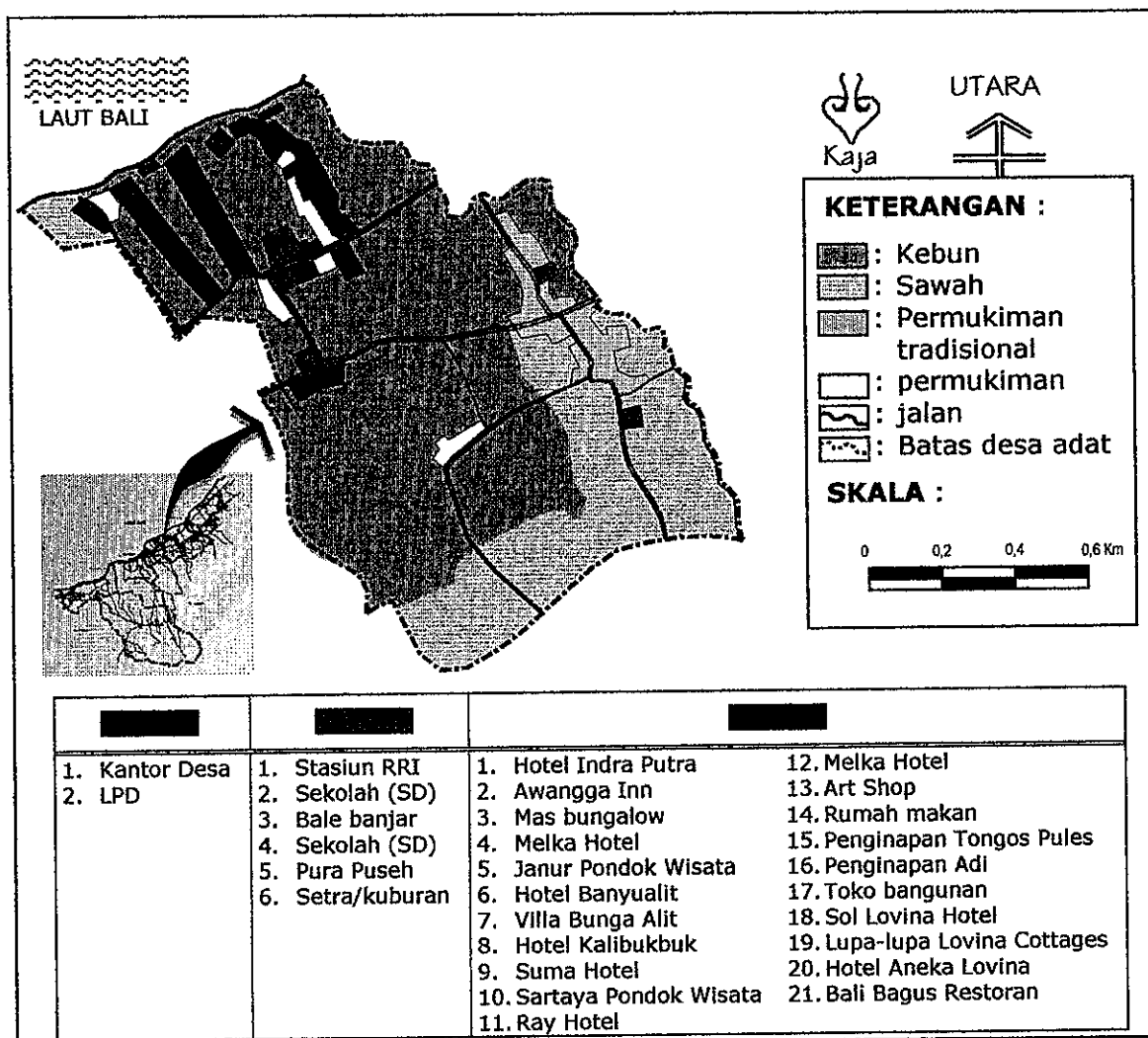
Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2000

Dari gambar 3.10 terlihat akomodasi pariwisata yang ada di desa adat Anturan hanya sebuah hotel yaitu Hotel Sari Jaya, sedangkan atribut desa adat yang ada adalah pura puseh, pura desa, bale banjar dan *setra* (kuburan).

d. *Land Use* Desa Adat Banyualit

Penggunaan lahan (*land use*) pada Desa Adat Banyualit adalah seperti pada gambar 3.11 berikut :

GAMBAR 3.11
PENGUNAAN LAHAN DESA ADAT BANYUALIT



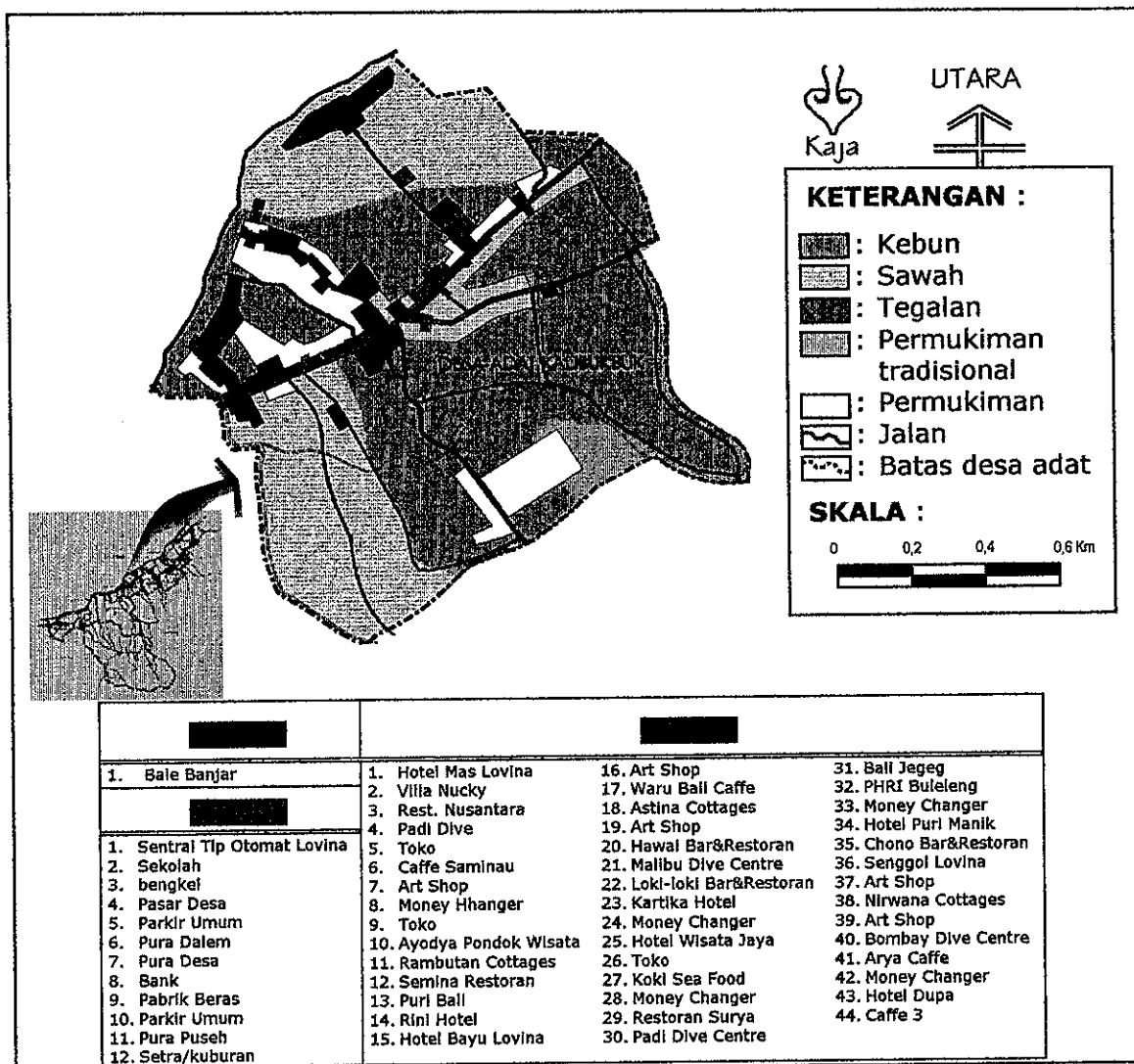
Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2000

Dari gambar 3.11 terlihat akomodasi pariwisata yang ada berupa hotel sebanyak 17 buah dan restoran sebanyak 2 buah, sedangkan atribut desa adat yang ada adalah pura puseh, bale banjar dan *setra* (kuburan).

e. *Land Use* Desa Adat Kalibukbuk

Penggunaan lahan (*land use*) pada Desa Adat Kalibukbuk adalah seperti pada gambar 3.12 berikut :

GAMBAR 3.12
PENGUNAAN LAHAN DESA ADAT KALIBUKBUK



Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2000

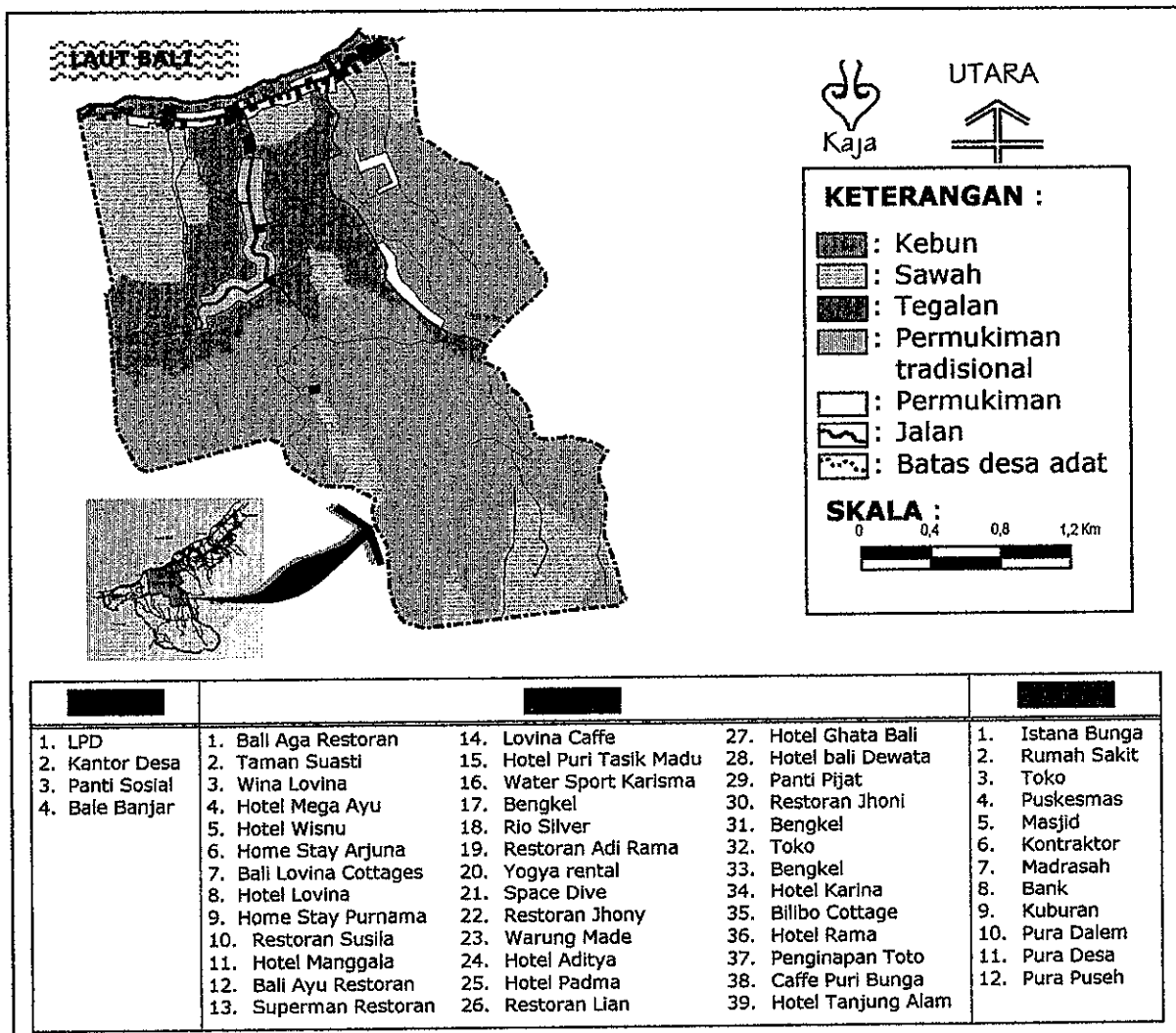
Dari gambar 3.12 terlihat akomodasi pariwisata yang ada berupa hotel sebanyak 13 buah, restoran 7 buah, *art shop* 5 buah, *caffe* 3 buah, sedangkan atribut desa adat yang ada adalah pura puseh, pura desa, pura dalem, bale banjar dan *setra* (kuburan).

f. *Land Use* Desa Adat Kaliasem

Penggunaan lahan (*land use*) pada Desa Adat Kaliasem adalah seperti pada gambar 3.13 berikut :

GAMBAR 3.13

PENGGUNAAN LAHAN DESA ADAT KALIASEM



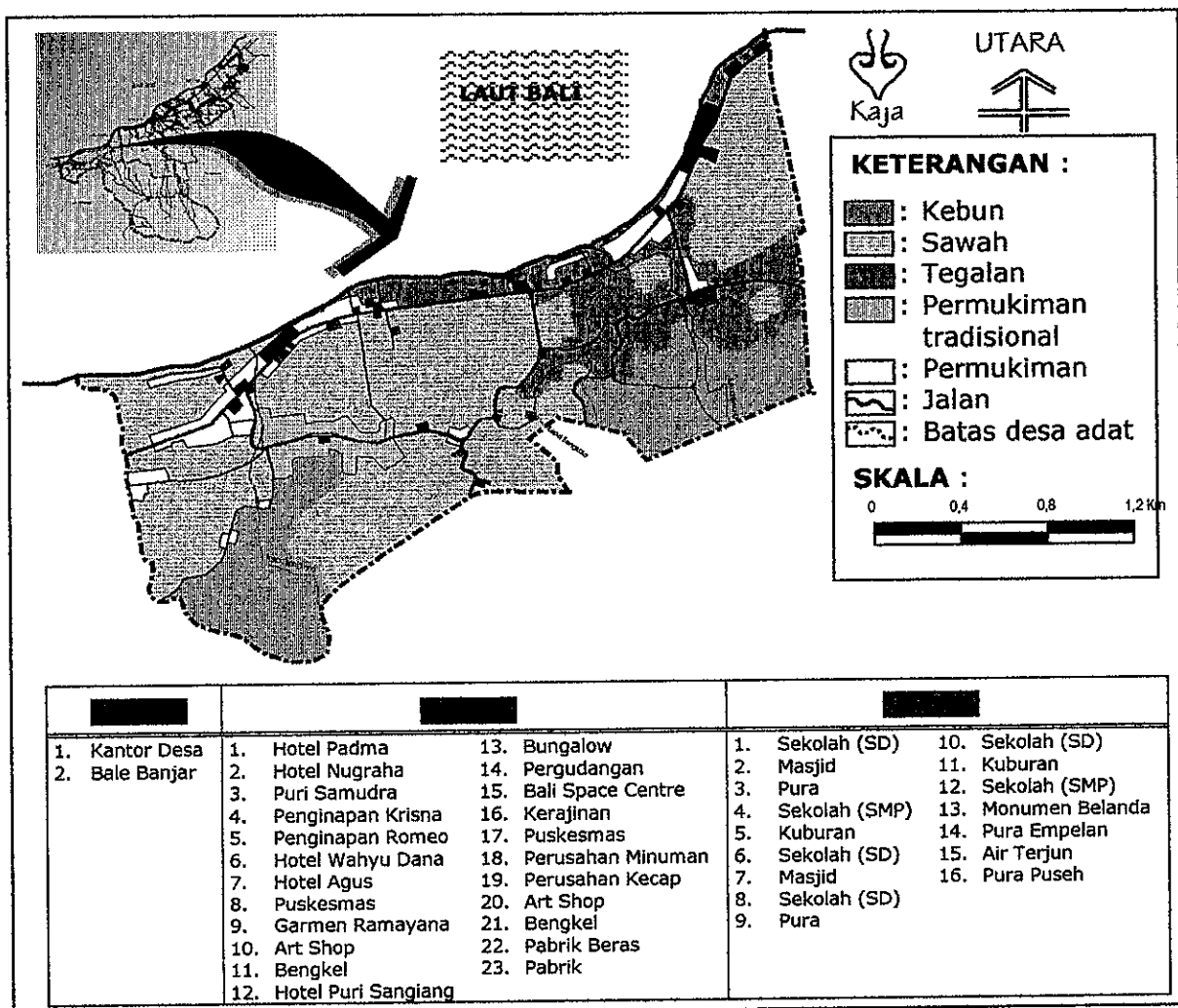
Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2000

Dari gambar 3.13 terlihat akomodasi pariwisata yang ada berupa hotel sebanyak 20 buah, restoran 11 buah, *art shop* 5 buah, *caffe* 2 buah, sedangkan atribut desa adat yang ada adalah pura puseh, pura desa, pura dalem, bale banjar dan *setra* (kuburan).

g. *Land Use* Desa Adat Temukus

Penggunaan lahan (*land use*) pada Desa Adat Temukus adalah seperti pada gambar 3.14 berikut :

GAMBAR 3.14
PENGUNAAN LAHAN DESA ADAT TEMUKUS



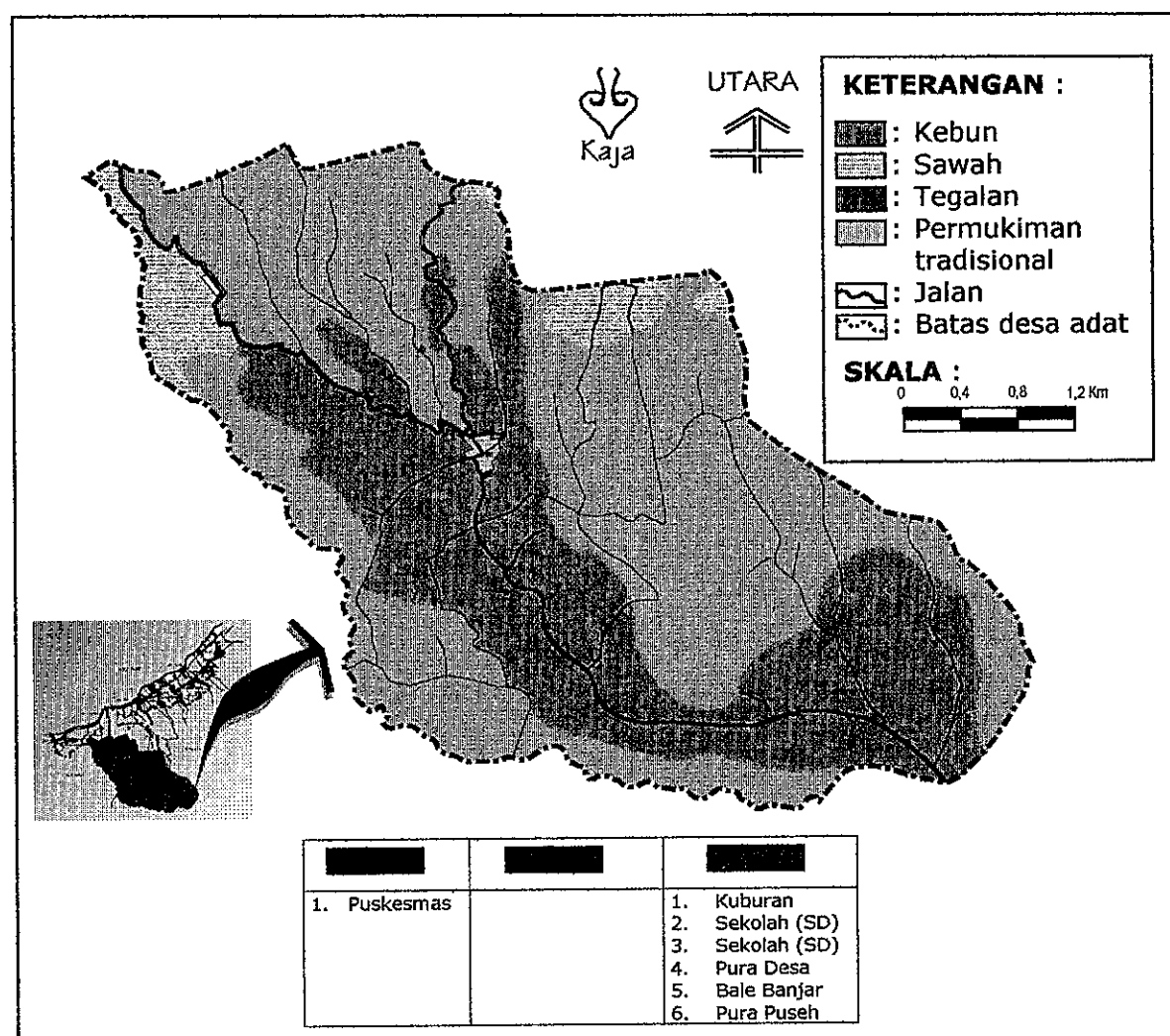
Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2000

Dari gambar 3.14 terlihat akomodasi pariwisata yang ada berupa hotel sebanyak 9 buah, *art shop* 2 buah, sedangkan atribut desa adat yang ada adalah pura puseh, bale banjar dan *setra* (kuburan).

h. *Land Use* Desa Adat Tigawasa

Penggunaan lahan (*land use*) pada Desa Adat Tigawasa adalah seperti pada gambar 3.15 berikut :

GAMBAR 3.15
PENGUNAAN LAHAN DESA ADAT TIGAWASA



Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2000

Dari gambar 3.15 terlihat, di Desa Adat Tigawasa tidak ada akomodasi pariwisata, sedangkan atribut desa adat yang ada adalah pura puseh, pura desa, bale banjar dan kuburan.

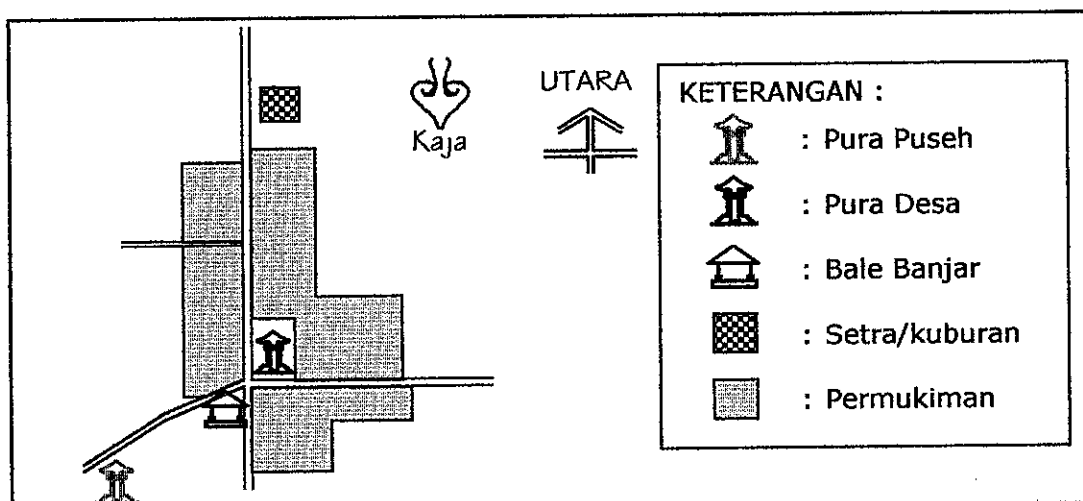
3.6. Pola Desa Adat pada Kawasan Pariwisata Lovina

Pada kawasan pariwisata Lovina terdapat 8 Desa adat yang masing – masing mempunyai pola desa dengan variasi yang berbeda, akan tetapi secara umum pola yang digunakan adalah pola linier dengan orientasi arah *kaja* (selatan) sebagai daerah utama dan arah ke laut di bagian *kelod* (utara) sebagai daerah nista. Pola dari masing-masing desa adat yang ada di Lovina adalah sebagai berikut :

a. Pola Desa Adat Pemaron

Pola Desa Adat Pemaron cenderung merupakan campuran dari pola linier dan pola *pempatan*. Pola Desa Adat Pemaron dapat digambarkan seperti pada gambar 3.16 berikut :

GAMBAR 3.16
POLA DESA ADAT PEMARON



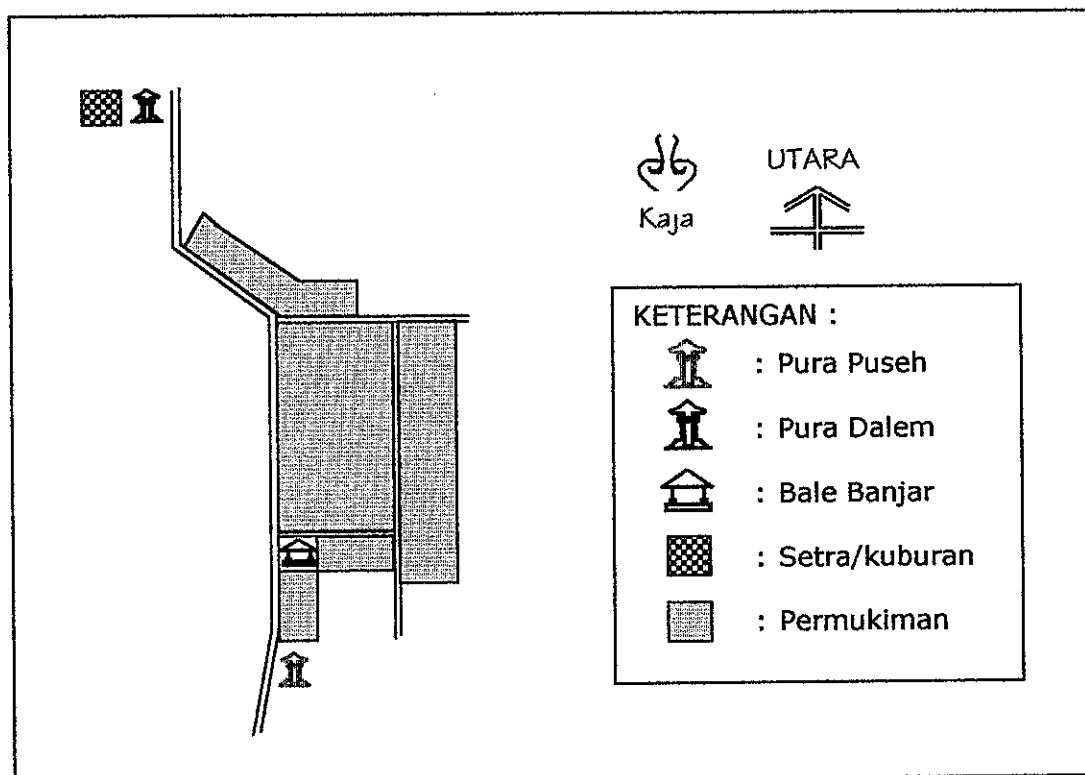
Sumber : Interpretasi Dari Gambar 3.7, 2002

Dari gambar 3.16 terlihat jalan utama desa dengan arah *kaja* dan *kelod* merupakan sumbu desa dan pada pusat desa terdapat persimpangan (*pempatan*) yang terdapat bale banjar dan pura desa.

b. Pola Desa Adat Tukad Mungga

Pola Desa Adat Tukad Mungga cenderung merupakan pola linier. Pola Desa Adat Tukad Mungga dapat digambarkan seperti pada gambar 3.17 berikut :

GAMBAR 3.17
POLA DESA ADAT TUKAD MUNGGA



Sumber : Interpretasi dari Gambar 3.8, 2002

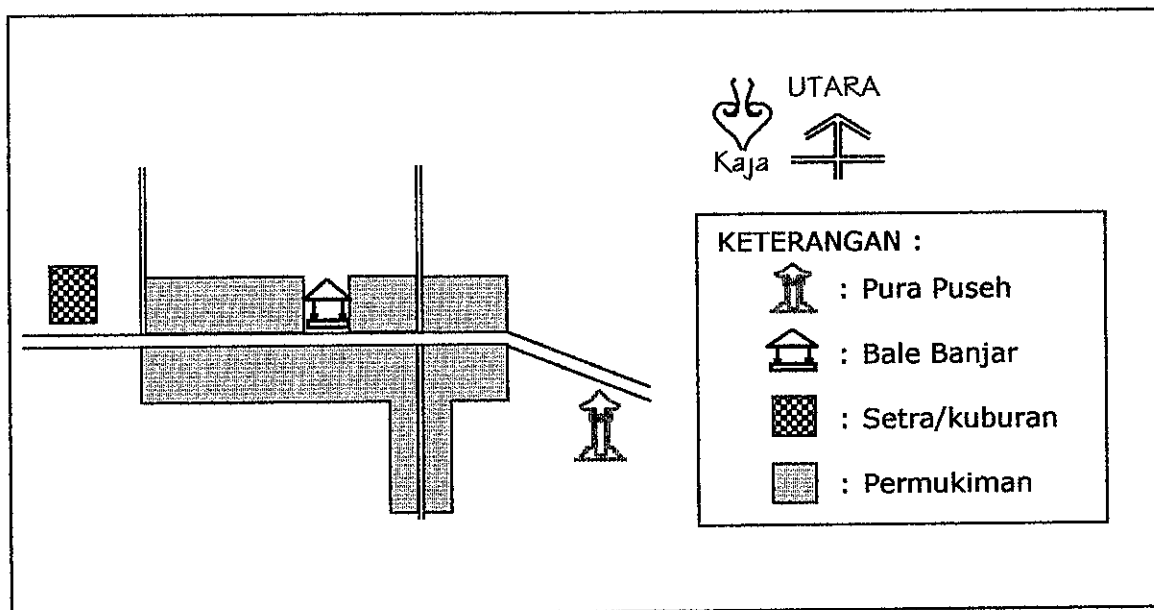
Dari gambar 3.17 terlihat jalan utama desa dengan arah *kaja* dan *kelod* merupakan sumbu desa dan pada pusat desa terdapat bale banjar dan pada arah *kaja* (arah selatan)

terdapat pura puseh sedangkan pada arah kelod (arah utara) terdapat pura dalem dan *setra* (kuburan desa adat).

c. Pola Desa Adat Anturan

Pola Desa Adat Anturan cenderung merupakan pola linier. Pola Desa Adat Anturan dapat digambarkan seperti pada gambar 3.18 berikut :

GAMBAR 3.18
POLA DESA ADAT ANTURAN



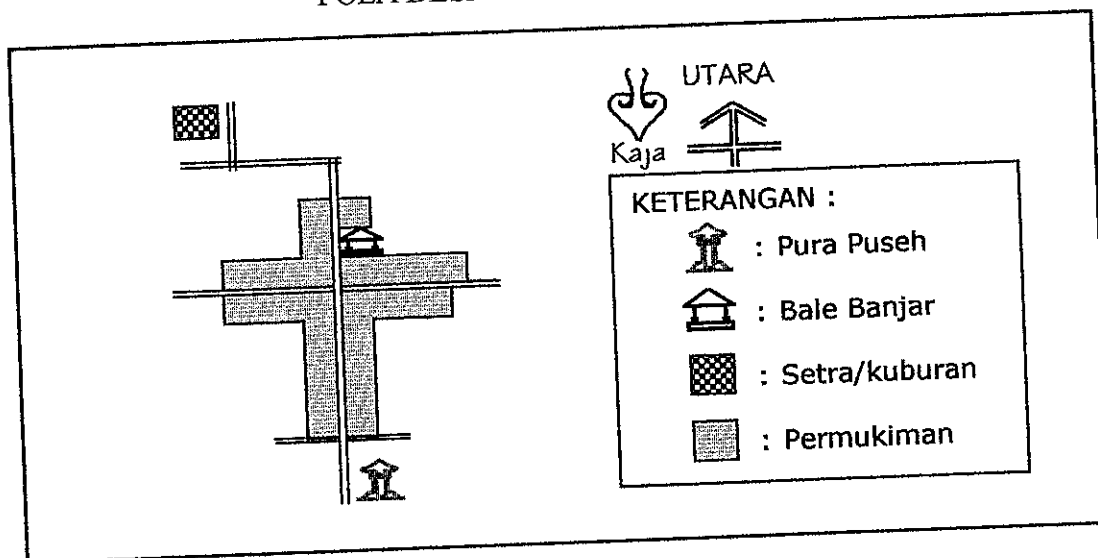
Sumber : Interpretasi dari Gambar 3.9, 2002

Dari gambar 3.18 terlihat jalan utama desa dengan arah *kaja* dan *kelod* merupakan sumbu desa dan pada pusat desa terdapat bale banjar dan pada arah *kaja* terdapat pura puseh sedangkan pada arah *kelod* terdapat *setra* (kuburan desa adat).

d. Pola Desa Adat Banyualit

Pola Desa Adat Banyualit cenderung merupakan pola *pempatan* karena pada pusat desa terdapat *pempatan* (persimpangan jalan) sebagai pusat orientasi desa adat. Pola Desa Adat Banyualit dapat digambarkan seperti pada gambar 3.19 berikut.

GAMBAR 3.19
POLA DESA ADAT BANYUALIT



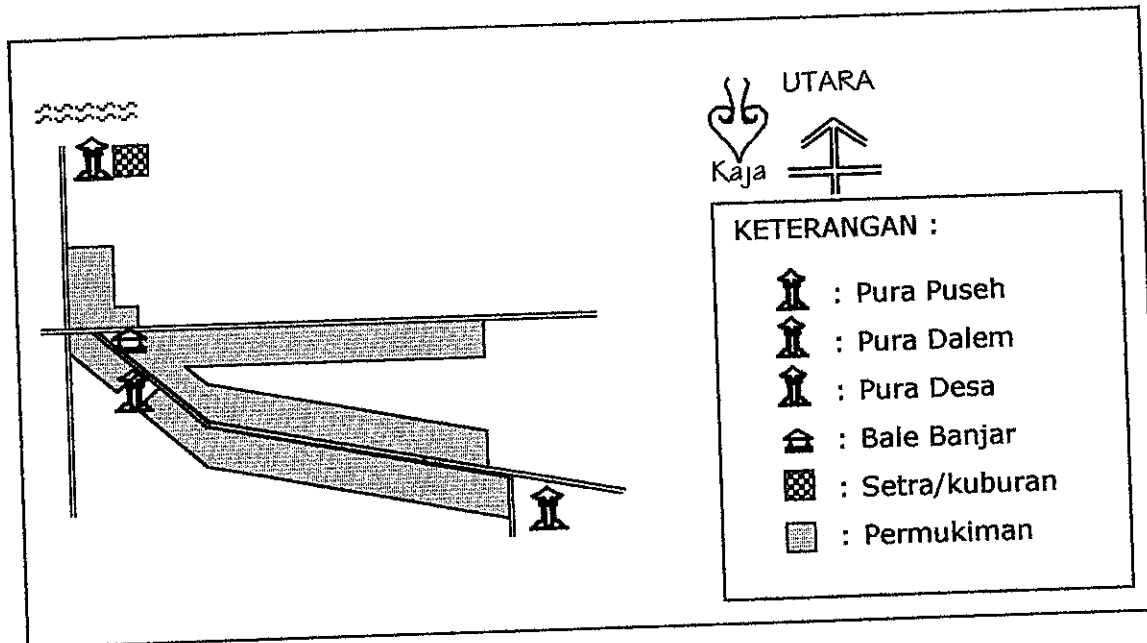
Sumber : Interpretasi dari Gambar 3.10, 2002

Dari gambar 3.19 terlihat jalan utama desa dengan arah *kaja* dan *kelod* merupakan sumbu desa dan pada pusat desa terdapat *pempatan* (persimpangan) dan bale banjar, sedangkan pada arah *kaja* terdapat pura puseh dan pada arah *kelod* terdapat *setra* (kuburan).

e. Pola Desa Adat Kalibukbuk

Pola Desa Adat Kalibukbuk merupakan campuran dari pola linier dan *pempatan*. Pola Desa Adat Kalibukbuk dapat digambarkan seperti pada gambar 3.20 berikut :

GAMBAR 3.20
POLA DESA ADAT KALIBUKBUK



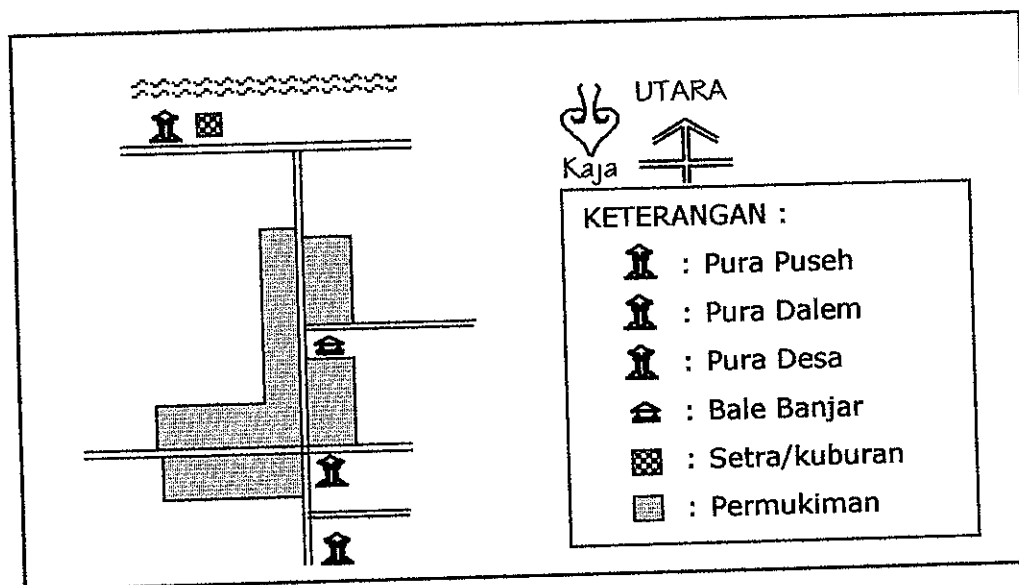
Sumber : Interpretasi dari Gambar 3.11, 2002

Dari gambar 3.20 terlihat jalan utama desa dengan arah *kaja* dan *kelod* merupakan sumbu desa dan pada pusat desa terdapat *pempatan* (persimpangan), bale banjar dan pura desa sedangkan pada arah *kaja* terdapat pura puseh dan pada arah *kelod* terdapat *setra* (kuburan) dan pura dalem.

f. Pola Desa Adat Kaliasem

Pola Desa Adat Kaliasem merupakan campuran dari pola linier dan *pempatan*. Pola Desa Adat Kaliasem dapat digambarkan seperti pada gambar 3.21 berikut :

GAMBAR 3.21
POLA DESA ADAT KALIASEM



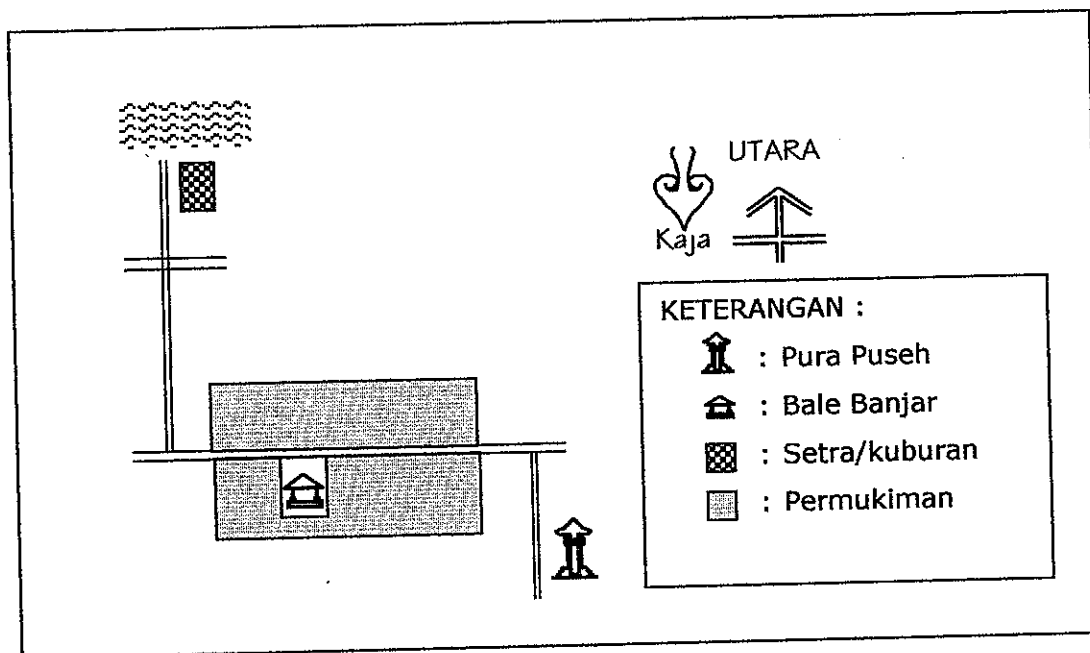
Sumber : Interpretasi dari Gambar 3.12, 2002

Dari gambar 3.21 terlihat jalan utama desa dengan arah *kaja* dan *kelod* merupakan sumbu desa dan pada pusat desa terdapat *pempatan* (persimpangan), bale banjar dan pura desa sedangkan pada arah *kaja* terdapat pura puseh dan pada arah *kelod* terdapat *setra* (kuburan) dan pura dalem.

g. Pola Desa Adat Temukus

Pola Desa Adat Temukus merupakan pola linier dengan adanya jalan sebagai sumbu desa. Pola Desa Adat Temukus dapat digambarkan seperti pada gambar 3.22 berikut :

GAMBAR 3.22
POLA DESA ADAT TEMUKUS



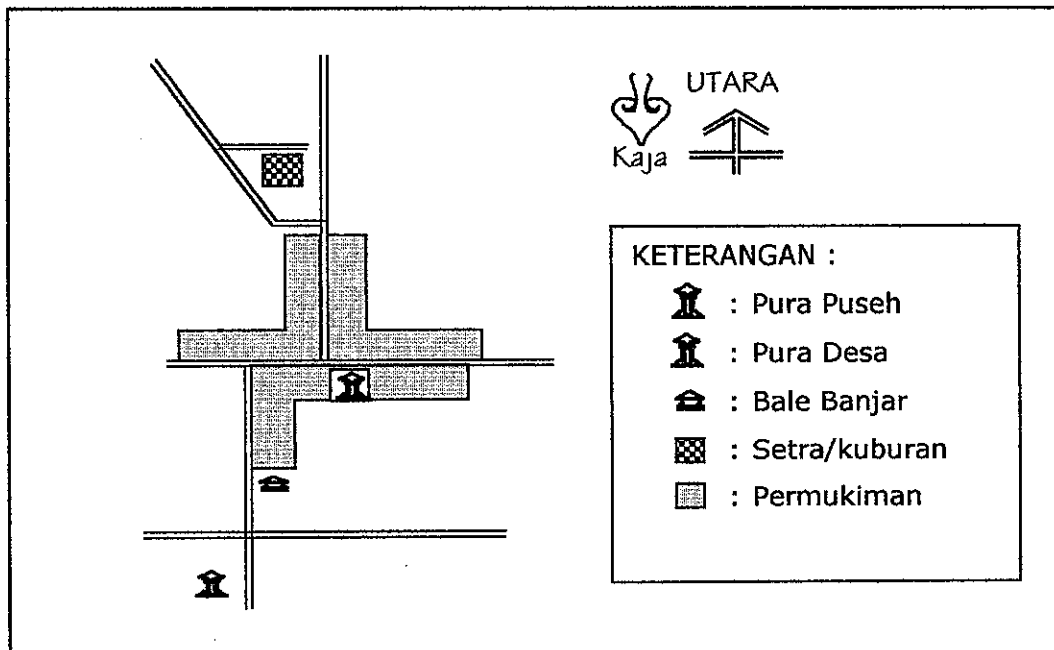
Sumber : Interpretasi dari Gambar 3.13, 2002

Dari gambar 3.22 terlihat jalan utama desa merupakan sumbu desa dan pada pusat desa terdapat bale banjar sedangkan pada arah *kaja* terdapat pura puseh dan pada arah *kelod* terdapat *setra* (kuburan).

h. Pola Desa Adat Tigawasa

Pola Desa Adat Tigawasa merupakan campuran dari pola linier dan *pempatan*. Pola Desa Adat Tigawasa dapat digambarkan seperti pada gambar 3.23 berikut.

GAMBAR 3.23
POLA DESA ADAT TIGAWASA



Sumber : Interpretasi dari Gambar 3.14, 2002

Dari gambar 3.23 terlihat jalan utama desa merupakan sumbu desa dan pada pusat desa terdapat bale banjar sedangkan pada arah *kaja* terdapat pura puseh dan pada arah *kelod* terdapat *setra* (kuburan).

BAB IV

POLA TATA RUANG VERNAKULAR DESA ADAT PADA KAWASAN PARIWISATA LOVINA

4.1. Analisis Zonasi Kawasan Masing – masing Desa Adat

Konsep hierarki ruang dalam konsep pola tata ruang tradisional Bali terbagi kedalam 3 bagian yaitu utama, madya dan nista, masih sangat relevan untuk diterapkan pada kawasan pariwisata Lovina. Hal ini didukung oleh persepsi dari tokoh – tokoh desa adat pada kawasan pariwisata Lovina. Pendapat tokoh masyarakat desa adat (8 desa adat) di kawasan pariwisata Lovina, mengenai perlu tidaknya menerapkan konsep hierarki ruang sesuai dengan pola tata ruang tradisional Bali, semua responden (100%) menyatakan setuju untuk tetap dipertahankan dan diterapkan pada desa adat masing – masing.

Lebih lanjut semua tokoh desa adat setuju dan sepakat untuk menetapkan bahwa zona utama dari masing – masing desa adat adalah di hulu desa adat (pada arah *kaja*), zona madya adalah pada daerah permukiman desa adat (*palemahan* desa adat) sedangkan zona nista adalah pada *tebenan* (hilir) yaitu pada arah *kelod* (arah ke laut) yang untuk kawasan pariwisata Lovina arah *kelod* adalah arah utara sedangkan arah *kaja* adalah pada arah selatan (tabel IV.10).

Didalam menentukan zonasi kawasan desa adat perlu dilihat keberadaan dari atribut desa adat seperti *tri khayangan* (pura puseh, pura desa, pura dalem), kuburan desa (*setra*), dan bale banjar. Dari hasil penelitian terhadap persepsi tokoh desa adat diketahui bahwa, semua responden (100%) menyatakan bahwa letak pura puseh adalah pada daerah utama, letak pura desa pada daerah madya, letak pura dalem pada daerah nista, bale banjar desa

terletak pada daerah madya sedangkan kuburan desa (*setra*) terletak pada daerah nista.

Persepsi tokoh desa adat tersebut disajikan pada tabel IV.1 berikut.

TABEL IV.1
PENDAPAT TOKOH DESA ADAT TENTANG ZONASI DESA ADAT

ZONA	KRITERIA	PENDAPAT RESPONDEN			
		SETUJU		TIDAK SETUJU	
		FREKUENSI	PERSEN(%)	FREKUENSI	PERSEN(%)
UTAMA	Arah <i>Kaja</i> (hulu desa)	32	100%	-	-
	Adanya Pura Puseh	32	100%	-	-
MADYA	Arah tengah (permukiman)	32	100%	-	-
	Adanya Pura Desa	32	100%	-	-
	Adanya Bale Banjar	32	100%	-	-
NISTA	Arah kelod	32	100%	-	-
	Adanya Pura Dalem	32	100%	-	-
	Adanya Setra (kuburan)	32	100%	-	-

Sumber : Data Primer, 2002

Dari uraian mengenai zonasi masing – masing desa adat yang terkait dengan arah kosmologis (*kaja, kelod*) dan posisi atribut desa adat, dapat disimpulkan bahwa zona utama dari desa adat adalah pada arah *kaja* (arah ke gunung) yang ditandai dengan adanya pura puseh, zona madya adalah pada daerah tengah yang ditandai dengan adanya permukiman, bale banjar, dan pura desa, zona nista adalah pada arah *kelod* (arah ke laut) yang ditandai dengan adanya kuburan dan pura dalem.

Untuk memberikan ketegasan mengenai batasan antara zona utama, madya dan nista perlu adanya kesepakatan dari masing masing tokoh desa adat untuk menentukan batasan – batasan tersebut. Sebagai perbandingan dapat digunakan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 640/27326/Bangda Tahun 1989 Tentang Pengamanan Pura. Menurut surat edaran tersebut ditegaskan dalam rangka memudahkan pengamanan pura, digunakan batas alam seperti jurang, sungai dan lain lainnya sebagai pembatas. Dari penelitian yang telah

dilakukan, semua responden (100%) menyatakan setuju bahwa batas alam seperti jurang atau sungai juga dapat dijadikan sebagai batasan untuk masing – masing zona dalam desa adat.

Karena tidak semua wilayah desa adat mempunyai batas – batas alam seperti yang dimaksudkan dalam surat edaran tersebut dan juga belum tentu bahwa batasan – batasan alam tersebut lokasinya bertepatan dengan batasan masing – masing zona yang dikehendaki maka sebagai alternatif lain jalan raya juga bisa dipakai sebagai batasan untuk masing – masing zona desa adat. Dalam penelitian yang telah dilakukan terhadap tokoh desa adat ternyata sebagian besar dari mereka (27 orang dari 32 orang responden atau 84,4%) mengatakan bahwa jalan bisa dipakai sebagai batasan, sedangkan yang menyatakan bahwa jalan tidak bisa dipakai sebagai batasan zona utama, madya dan nista dalam desa adat adalah 5 orang dari 32 orang responden (15,6%). Persepsi tokoh desa adat tersebut disajikan pada tabel IV.2 berikut.

TABEL IV.2
PENDAPAT TOKOH DESA ADAT TENTANG BATAS ZONASI

NO	PENDAPAT	FREKUENSI	PERSEN (%)
1	Setuju	27	84,4%
2	Tidak Setuju	5	15,6%
JUMLAH		32	100%

Sumber : Data Primer, 2002

Khusus untuk batasan daerah suci dalam rangka pengamanan kawasan suci suatu pura, dalam hal ini pura *tri khayangan/khayangan tiga* terutama untuk pengamanan dan memberikan batasan terhadap kesucian pura puseh dan pura dalem, bisama PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) tentang kesucian pura dapat dipakai sebagai suatu pedoman. Hal ini diperkuat dengan persepsi dari tokoh desa adat dimana semua responden (100%) setuju

dengan bisama PHDI tersebut, termasuk jarak (radius) kesucian pura yaitu *apenimpug* dan *apenyengker*. *Apenimpug* adalah jarak untuk orang dewasa normal melempar yang didalam bisama PHDI belum diterjemahkan kedalam suatu satuan panjang yang pasti. Untuk mendapatkan ukuran yang lebih pasti maka dalam penelitian telah ditanyakan kepada tokoh desa adat tentang jarak *apenimpug* tersebut dan untuk memudahkan dipakai (diasumsikan) jarak dalam meter dibagi kedalam 4 ring yaitu 0 – 20 meter, 21 – 40 meter, 41 – 60 meter dan diatas 60 meter. Hasil penelitian menunjukkan responden sebanyak 21,9% (7 orang dari 32 orang responden) menyatakan bahwa *apenimpug* setara dengan 0 – 20 meter, sebanyak 65,6% menyatakan setara dengan 21 – 40 meter, dan sisanya sebanyak 12,5% menyatakan 41 – 60 meter. Dari persepsi tokoh desa adat tersebut dapat disimpulkan bahwa jarak *apenimpug* yang disepakati adalah 21 – 40 meter. Persepsi tokoh desa adat tersebut disajikan pada tabel IV.3 berikut.

TABEL IV.3
PENDAPAT TOKOH DESA ADAT TENTANG RADIUS KESUCIAN PURA

NO	PENDAPAT	FREKUENSI	PERSEN (%)
1	0 – 20 meter	7	21,9%
2	21 – 40 meter	21	65,6%
3	41 – 60 meter	4	12,5%
4	Lebih dari 60 meter		
JUMLAH		32	100%

Sumber : Data Primer, 2002

Sedangkan *apenyengker* maksudnya adalah sebatas tembok pembatas (*penyengker*) dari suatu pura, dalam hal ini adalah tembok pembatas dari pura khayangan tiga. Batasan *apenimpug* dan *apenyengker* ini bisa diterapkan untuk membatasi daerah kesucian pura dengan bangunan lain diluar pura. Dalam penelitian telah ditanyakan kepada tokoh desa adat mengenai penerapan batasan *apenimpug* dan *apenyengker*. Ternyata semua responden

(100%) menyatakan setuju bahwa jarak *apenimpug* dapat dipakai untuk membatasi antara pura dengan daerah permukiman penduduk desa adat dan juga bisa dipakai untuk batasan antara pura dengan fasilitas akomodasi pariwisata yang berada didekat pura. Sedangkan untuk jarak *apenyengker*, semua responden juga setuju untuk batasan antara pura dengan permukiman penduduk sedangkan untuk jarak antara pura dengan fasilitas akomodasi pariwisata, semua responden menyatakan tidak bisa memakai jarak *apenyengker*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antara pura dengan fasilitas akomodasi pariwisata dipakai jarak *apenimpug* (21 – 40 meter) sedangkan jarak antara pura dengan permukiman penduduk bisa dipakai jarak *apenimpug* atau *apenyengker*, tergantung ruang yang ada. Persepsi tokoh desa adat tersebut disajikan dalam tabel IV.4 berikut :

TABEL IV.4
PENDAPAT TOKOH DESA ADAT TENTANG PENERAPAN
JARAK *APENIMPUG* DAN *APENYENGKER*

JARAK	<i>APENYENGKER</i>				<i>APENIMPUG</i>			
	Bisa		Tidak bisa		Bias		Tidak bisa	
	frekuensi	persen	frekuensi	persen	frekuensi	persen	frekuensi	persen
Pura-permukiman	32	100%	-	-	32	100%	-	-
Pura-akomodasi par.	-	-	32	100%	32	100%	-	-

Sumber : Data Primer, 2002

Dari uraian mengenai persepsi tokoh desa adat dapat disimpulkan bahwa masing – masing zona (utama, madya, dan nista) pada masing – masing desa adat dicirikan dengan arah orientasi *kaja kelod* dan atribut desa adat yang ada yaitu :

- Utama : – pada arah *kaja* (arah ke gunung)
- terdapat pura puseh

- Madya : – pada daerah permukiman warga desa adat (arah ditengah desa adat)
 - terdapat pura desa
 - terdapat bale banjar
- Nista : – pada arah kelod (arah ke laut)
 - terdapat pura dalem
 - terdapat setra (kuburan desa)

4.2. Analisis Persepsi Masyarakat Desa Adat

Dalam analisis persepsi masyarakat desa adat berikut akan diuraikan mengenai persepsi masyarakat desa adat tentang atribut desa adat dan fasilitas akomodasi pariwisata yang memungkinkan pada masing – masing zona (zona utama, madya dan nista).

4.2.1. Atribut Desa Adat

Dalam konsep pola tata ruang tradisional Bali, salah satu atribut desa adat adalah Pura Puseh yang posisinya berada di hulu desa adat. Persepsi masyarakat mengenai keberadaan pura puseh 100% menyatakan bahwa pura puseh tidak boleh dipindah atau digusur. Ini berarti bahwa pura puseh harus tetap berada pada tempatnya semula yaitu pada hulu desa (zone utama).

Pura desa adalah merupakan salah satu atribut desa adat yang posisinya berada di tengah – tengah desa adat (zona madya). Persepsi masyarakat mengenai keberadaan pura desa 100% menyatakan bahwa pura desa tidak boleh dipindah atau digusur. Selain pura desa, bale banjar adalah merupakan salah satu atribut desa adat yang posisinya berada ditengah – tengah permukiman desa adat (*palemahan desa*) atau berada pada zona madya

dari desa adat. Persepsi masyarakat mengenai keberadaan bale banjar 24,6% menyatakan bahwa bale banjar tidak boleh dipindah atau digusur, sedangkan sisanya sebesar 75,4% berpendapat bahwa bale banjar bisa saja dipindahkan dari posisi semula akan tetapi masih tetap dalam lingkungan permukiman desa adat (*palemahan desa*) atau berada pada zona madya dari desa adat.

Dalam konsep pola tata ruang tradisional Bali, kuburan desa (*setra*) adalah merupakan salah satu atribut desa adat yang terletak pada arah *kelod* dari desa adat atau berada pada zona Nista dari desa adat. Persepsi masyarakat mengenai keberadaan kuburan desa adalah 100% menyatakan bahwa kuburan desa tidak boleh dipindah atau digusur. Selain adanya *setra* (kuburan desa), Pura Dalem adalah merupakan salah satu atribut desa adat yang letaknya di zona nista dari desa adat. Persepsi masyarakat mengenai keberadaan Pura Dalem adalah 100% menyatakan bahwa Pura Dalem tidak boleh dipindah atau digusur. Persepsi masyarakat tersebut disajikan dalam tabel IV.5 berikut.

TABEL IV.5
PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG BOLEH TIDAKNYA
PERUBAHAN LOKASI ATRIBUT DESA ADAT

ZONA	ATRIBUT DESA ADAT	PENDAPAT RESPONDEN			
		BOLEH		TIDAK BOLEH	
		FREKUENSI	PERSEN(%)	FREKUENSI	PERSEN(%)
UTAMA	Pura Puseh	-	-	171	100%
MADYA	Pura Desa	-	-	171	100%
	Bale Banjar	129	75,4%	42	24,6%
NISTA	Pura Dalem	-	-	-	100%
	Setra (kuburan)	-	-	-	100%

Sumber : Data Primer, 2002

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan atribut desa adat tidak dapat dipindahkan posisinya yaitu pura pusah pada zona utama, pura desa pada zona madya, pura dalem dan kuburan pada zona nista, kecuali bale banjar masih bisa dipindahkan lokasinya namun masih dalam zona madya.

4.2.2. Akomodasi Pariwisata

Untuk mengetahui fasilitas akomodasi pariwisata apa saja yang dapat dibangun pada masing – masing zona desa adat, berikut ini akan diuraikan mengenai persepsi dari masyarakat desa adat mengenai akomodasi pariwisata yang bisa diterima oleh warga desa adat pada masing – masing zona desa adat. Untuk dapat menyimpulkan kesepakatan dari responden maka dalam analisa, akan diasumsikan bahwa suatu pendapat bisa dikatakan sebagai suatu kesepakatan apabila 50% - 100% responden menyatakan setuju atau tidak setuju, maksudnya adalah responden disimpulkan sepakat mengatakan “boleh” apabila 50% - 100% responden menyatakan “boleh” dan responden disimpulkan sepakat mengatakan “tidak boleh” apabila 50% - 100% responden menyatakan “tidak boleh”. Persepsi masyarakat tersebut disajikan dalam tabel IV.6 berikut.

TABEL IV.6

PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG LOKASI AKOMODASI PARIWISATA PADA MASING – MASING ZONA DESA ADAT

AKOMODASI PARIWISATA	UTAMA				MADYA				NISTA			
	boleh		Tidak		Boleh		Tidak		Boleh		tidak	
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%
Hotel	16	9,4	155	90,6	140	81,9	31	18,1	162	94,7	9	5,3
Restoran	39	22,8	132	77,2	158	92,4	13	7,6	157	91,8	14	8,2
T. hib. Malam	-	-	171	100	-	-	171	100	166	97,1	5	2,9
Art shop	21	22,3	150	87,7	165	96,5	6	3,5	163	95,3	8	4,7

Sumber : Data Primer, 2002

a. Zona Utama

Pura puseh yang terletak pada zona utama dari desa adat mempunyai nilai kesakralan yang tinggi bagi masyarakat desa adat. Dalam rangka menjaga kesakralan dan kesucian pura serta untuk mengkaji pola tata ruang vernakular kawasan pariwisata Lovina, perlu diketahui fasilitas akomodasi pariwisata apa saja yang bisa diterima oleh masyarakat desa adat ditempatkan pada zona utama yang berarti berdekatan dengan pura puseh, seperti pada tabel IV.6.

– Hotel

Pendapat responden mengenai keberadaan hotel yang berdekatan dengan pura puseh adalah 90,6% menyatakan hotel tidak boleh berdekatan dengan pura puseh dengan alasan kegiatan didalam hotel tidak sesuai untuk berada pada zona utama dan akan bisa mengurangi kesucian pura puseh, sedangkan sisanya sebesar 9,4% responden (16 orang dari 171 orang) menyatakan bahwa hotel boleh berdekatan dengan pura puseh dengan alasan kegiatan hotel tidak akan mengganggu kegiatan ritual dalam pura puseh. Bila dihubungkan dengan nilai tata ruang tradisional Bali, dimana pada arah kaja (zona utama) adalah diperuntukkan pada hal – hal yang bersifat suci dan didukung oleh sebagian besar responden (90,6%), maka dapat disimpulkan bahwa pada zona utama tidak bisa dibangun akomodasi pariwisata berupa hotel.

– Restoran

Pendapat responden mengenai keberadaan restoran pada zona utama adalah sebesar 77,2% menyatakan restoran tidak boleh berdekatan dengan pura puseh (berada pada Zona utama) dengan alasan kegiatan didalam restoran tidak sesuai untuk berada pada zona utama

dan akan bisa mengurangi kesucian pura puseh, sedangkan sisanya 22,8% responden (39 orang dari 171 orang) menyatakan bahwa restoran boleh berdekatan dengan pura puseh (berada pada Zona utama) dengan alasan restoran tidak akan mengganggu kegiatan ritual dalam pura puseh. Bila dihubungkan dengan nilai tata ruang tradisional Bali, dimana pada arah kaja (zona utama) adalah diperuntukkan pada hal – hal yang bersifat suci dan didukung oleh sebagian besar responden (77,2%), maka dapat disimpulkan bahwa pada zona utama tidak bisa dibangun akomodasi pariwisata berupa restoran.

– *Art Shop*

Pendapat responden mengenai keberadaan art shop pada zona utama yang berarti berdekatan dengan pura puseh adalah sebesar 87,7% menyatakan *art shop* tidak boleh berada pada zona utama (berdekatan dengan pura puseh) dengan alasan kegiatan didalam *art shop* tidak sesuai untuk berada pada zona utama dan akan bisa mengurangi kesucian pura puseh, sedangkan sisanya 22,3% responden (21 orang dari 171 orang) menyatakan bahwa *art shop* boleh berdekatan dengan pura puseh (berada pada Zona utama) dengan alasan kegiatan *art shop* tidak akan mengganggu kegiatan ritual dalam pura puseh. Bila dihubungkan dengan nilai tata ruang tradisional Bali, dimana pada arah kaja (zona utama) adalah diperuntukkan pada hal – hal yang bersifat suci dan didukung oleh sebagian besar responden (87,7%), maka dapat disimpulkan bahwa pada zona utama tidak bisa dibangun akomodasi pariwisata berupa *art shop*.

– Tempat Hiburan Malam

Pendapat responden mengenai keberadaan diskotik/tempat hiburan malam yang berdekatan dengan pura puseh adalah sebesar 100% responden menyatakan diskotik/

tempat hiburan malam tidak boleh berada pada zona utama (berdekatan dengan pura puseh) dengan alasan kegiatan didalam diskotik/tempat hiburan malam tidak sesuai untuk berada pada zona utama dan akan bisa mengurangi kesucian pura puseh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada zona utama tidak bisa dibangun akomodasi pariwisata berupa diskotik/tempat hiburan malam.

b. Zona Madya

Untuk dapat mengetahui fasilitas akomodasi pariwisata pada zona madya, perlu diketahui akomodasi pariwisata yang bisa diterima oleh masyarakat desa adat ditempatkan pada zona madya yang berarti berada ditengah – tengah atau disekitar permukiman penduduk (tabel IV.6). Berikut ini akan diuraikan pendapat dari responden (warga masyarakat desa adat) mengenai keberadaan akomodasi pariwisata pada zona madya sebagai berikut :

– Hotel

Pendapat responden mengenai keberadaan hotel yang berada di permukiman penduduk adalah sebesar 81,9% responden (140 orang dari 171 orang) menyatakan bahwa hotel boleh berada di permukiman penduduk sedangkan sisanya sebesar 18,1% menyatakan bahwa hotel tidak boleh berada pada permukiman penduduk dengan alasan kegiatan didalam hotel akan berpengaruh pada ketenangan penduduk dan bisa memicu kesenjangan sosial. Bila dihubungkan dengan nilai tata ruang tradisional Bali, dimana pada daerah antara arah kaja dan arah kelod (daerah permukiman penduduk) adalah bersifat netral dan digunakan untuk aktivitas kehidupan manusia dan didukung oleh sebagian besar

responden (81,9%), maka dapat disimpulkan bahwa pada zona madya masih bisa dibangun akomodasi pariwisata berupa hotel.

– Restoran

Pendapat responden mengenai keberadaan restoran yang berada di permukiman penduduk adalah sebesar 92,4% responden (158 orang dari 171 orang) menyatakan bahwa restoran boleh berada di permukiman penduduk sedangkan sisanya sebesar 7,6% menyatakan bahwa restoran tidak boleh berada pada permukiman penduduk. Bila dihubungkan dengan nilai tata ruang tradisional Bali, dimana pada daerah antara arah kaja dan arah kelod (daerah permukiman penduduk) adalah bersifat netral dan digunakan untuk aktivitas kehidupan manusia dan didukung oleh sebagian besar responden (92,4%), maka dapat disimpulkan bahwa pada zona madya masih bisa dibangun akomodasi pariwisata berupa restoran.

– *Art Shop*

Pendapat responden mengenai keberadaan *art shop* yang berada di permukiman penduduk adalah sebesar 96,5% responden (165 orang dari 171 orang) menyatakan bahwa *art shop* boleh berada di permukiman penduduk sedangkan sisanya sebesar 3,5% menyatakan bahwa *art shop* tidak boleh berada pada permukiman penduduk. Bila dihubungkan dengan nilai tata ruang tradisional Bali, dimana pada daerah antara arah kaja dan arah kelod (daerah permukiman penduduk) adalah bersifat netral dan digunakan untuk aktivitas kehidupan manusia dan didukung oleh sebagian besar responden (96,5%), maka dapat disimpulkan bahwa pada zona madya masih bisa dibangun akomodasi pariwisata berupa *art shop*.

– Tempat Hiburan Malam

Pendapat responden mengenai keberadaan diskotik/tempat hiburan malam yang berada di permukiman penduduk adalah semua responden menyatakan bahwa diskotik/tempat hiburan malam tidak boleh berada pada permukiman penduduk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada zona madya tidak bisa dibangun akomodasi pariwisata berupa diskotik/tempat hiburan malam lainnya.

c. Zona Nista

Untuk dapat mengetahui fasilitas akomodasi pariwisata pada zona Nista, perlu diketahui akomodasi pariwisata yang bisa diterima oleh masyarakat desa adat ditempatkan pada zona Nista yang berarti berdekatan dengan pura dalem dan kuburan desa (tabel IV.6). Berikut ini akan diuraikan pendapat dari responden (warga masyarakat desa adat) mengenai keberadaan akomodasi pariwisata pada zona Nista sebagai berikut :

– Hotel

Pendapat responden mengenai keberadaan hotel yang berdekatan dengan kuburan desa adalah sebesar 94,7% responden (162 orang dari 171 orang) menyatakan bahwa hotel boleh berada pada zona nista (berdekatan dengan kuburan desa) sedangkan sisanya sebesar 5,3% menyatakan bahwa hotel tidak boleh berada pada zona nista (berdekatan dengan kuburan desa). Zona nista adalah zona yang terletak pada arah *kelod* dari desa adat yang diperuntukkan pada hal – hal yang kotor dan dalam hal ini kotor bisa diartikan sebagai kegiatan yang bersifat hingar – bingar atau ramai sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada zona nista bisa dibangun hotel.

– Restoran

Pendapat responden mengenai keberadaan restoran yang berdekatan dengan kuburan desa (pada zona nista) adalah sebesar 91,8% responden (157 orang dari 171 orang) menyatakan bahwa restoran boleh berdekatan dengan kuburan desa sedangkan sisanya sebesar 8,2% menyatakan bahwa restoran tidak boleh berdekatan dengan kuburan desa. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada zona nista bisa dibangun Restoran

– *Art Shop*

Pendapat responden mengenai keberadaan *art shop* yang berdekatan dengan kuburan desa adalah sebesar 95,3% responden (163 orang dari 171 orang) menyatakan bahwa *art shop* boleh berdekatan dengan kuburan desa sedangkan sisanya sebesar 4,7% menyatakan bahwa *art shop* tidak boleh berdekatan dengan kuburan desa. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada zona nista bisa dibangun *art shop*

– Tempat Hiburan Malam

Pendapat responden mengenai keberadaan tempat hiburan malam yang berdekatan dengan kuburan desa adalah sebesar 97,1% responden (166 orang dari 171 orang) menyatakan bahwa tempat hiburan malam boleh berdekatan dengan kuburan desa sedangkan sisanya sebesar 2,9% menyatakan bahwa tempat hiburan malam tidak boleh berdekatan dengan kuburan desa. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada zona nista bisa dibangun tempat hiburan malam.

Secara keseluruhan dari analisis persepsi masyarakat desa adat, dapat diketahui bahwa fasilitas akomodasi pariwisata yang bisa diterima oleh masyarakat desa adat pada masing – masing zona adalah sebagai berikut :

- Zona Utama : tidak bisa dipergunakan untuk pembangunan fasilitas akomodasi pariwisata
- Zona Madya : sudah bisa dipergunakan untuk pembangunan fasilitas akomodasi pariwisata yaitu untuk fasilitas berupa hotel, restoran dan *art shop*.
- Zona Nista : bisa digunakan untuk pembangunan semua fasilitas akomodasi pariwisata baik berupa hotel, restoran, *art shop* maupun tempat hiburan malam.

Dengan diketahuinya orientasi *kaja kelod* dan atribut desa adat yang terdapat dalam masing – masing zona dan fasilitas akomodasi pariwisata yang bisa diterima oleh masyarakat desa adat pada masing – masing zona, dapat dijadikan dasar dalam menentukan zonasi dari masing – masing desa adat dan batasan dari masing – masing desa adat. Gambaran dari zonasi pada masing – masing desa adat tersebut akan di uraikan sebagai berikut :

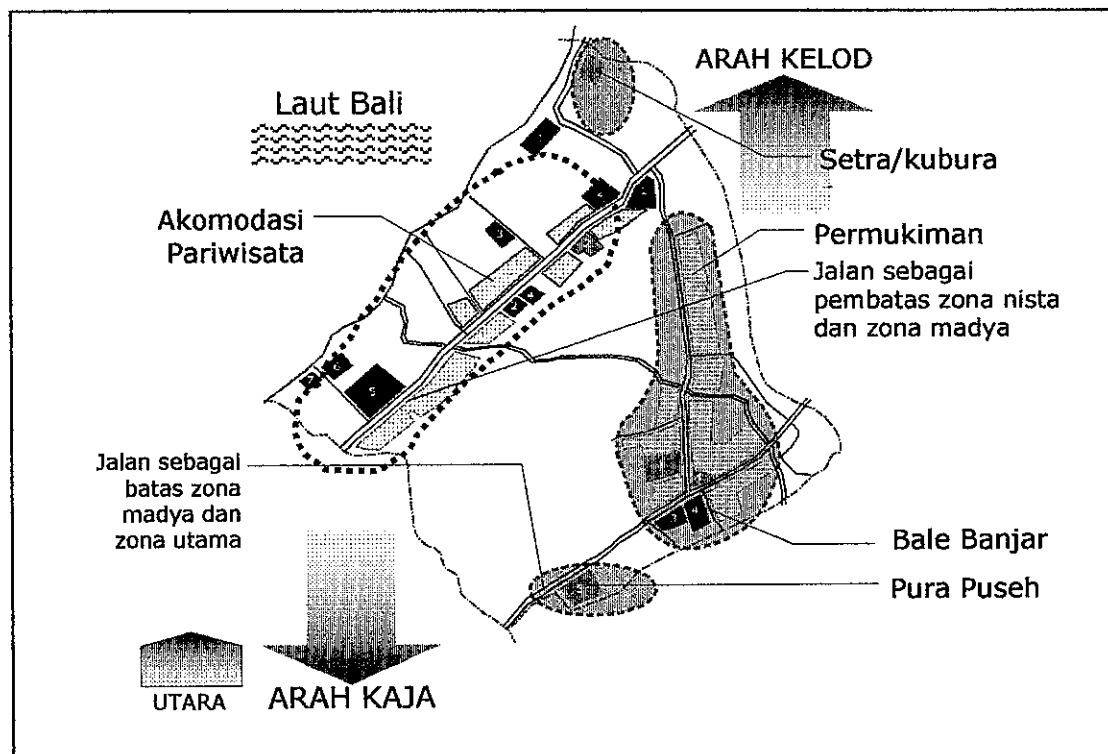
- Desa Adat Pemaron

Zona utama pada Desa Adat Pemaron adalah pada arah *kaja* yang dicirikan dengan adanya Pura Puseh dengan batas jalan lingkungan yang terdapat disebelah utara Pura Puseh, jalan disebelah barat sekolah dan Pura Desa. Zona nista adalah pada arah *kelod* desa, yang dicirikan dengan adanya kuburan dan akomodasi pariwisata yang dibatasi oleh

jalan raya sampai pantai. Sedangkan zona madya berada diantara zona utama dan nista.

Seperti pada gambar 4.1 berikut :

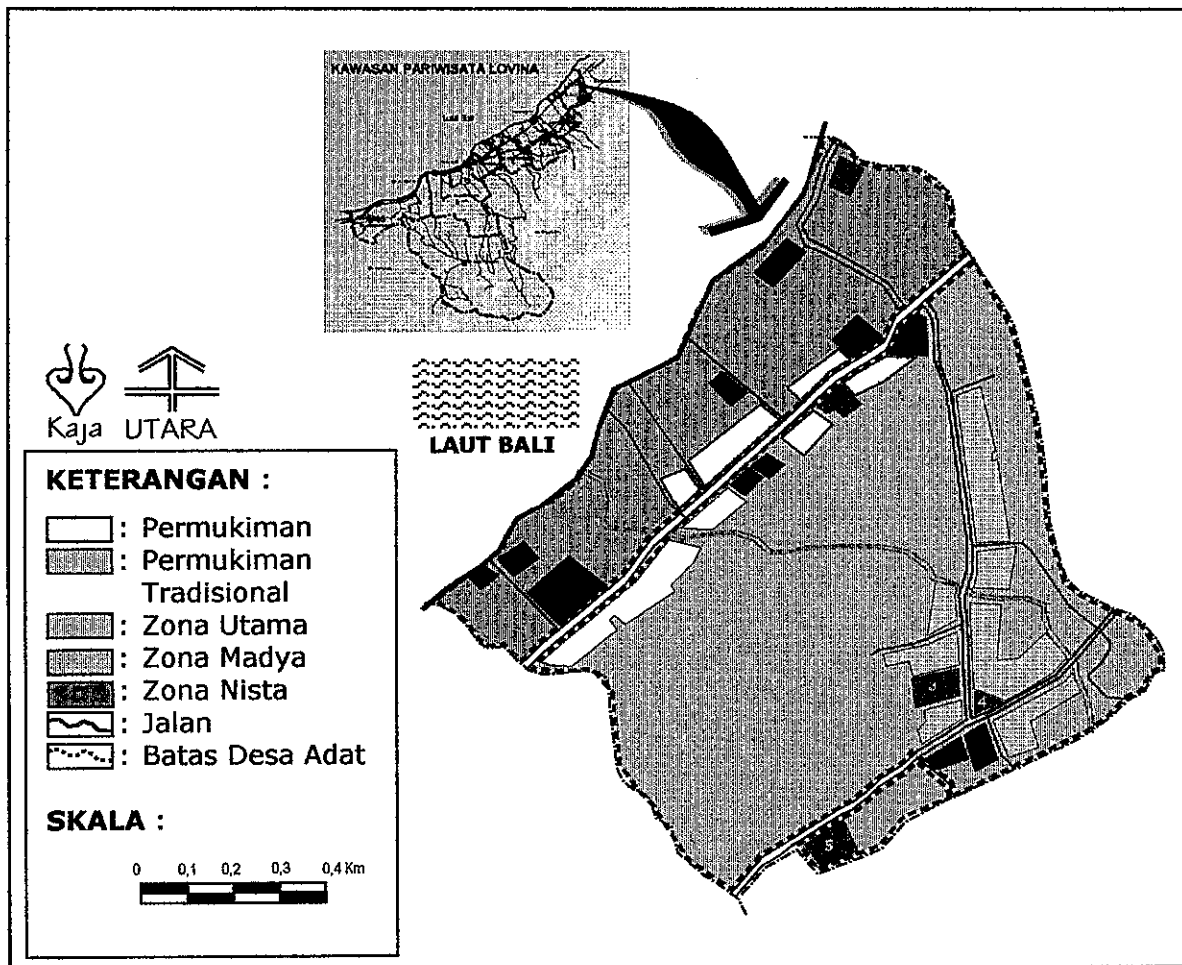
GAMBAR 4.1
ARAH KOSMOLOGI DAN ATRIBUT DESA ADAT PEMARON



Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambaran mengenai arah kosmologi dan atribut Desa Adat Pamaron, maka zonasi desa adat Pamaron dapat digambarkan seperti pada gambar 4.2 berikut :

GAMBAR 4.2
ZONASI DESA ADAT PEMARON



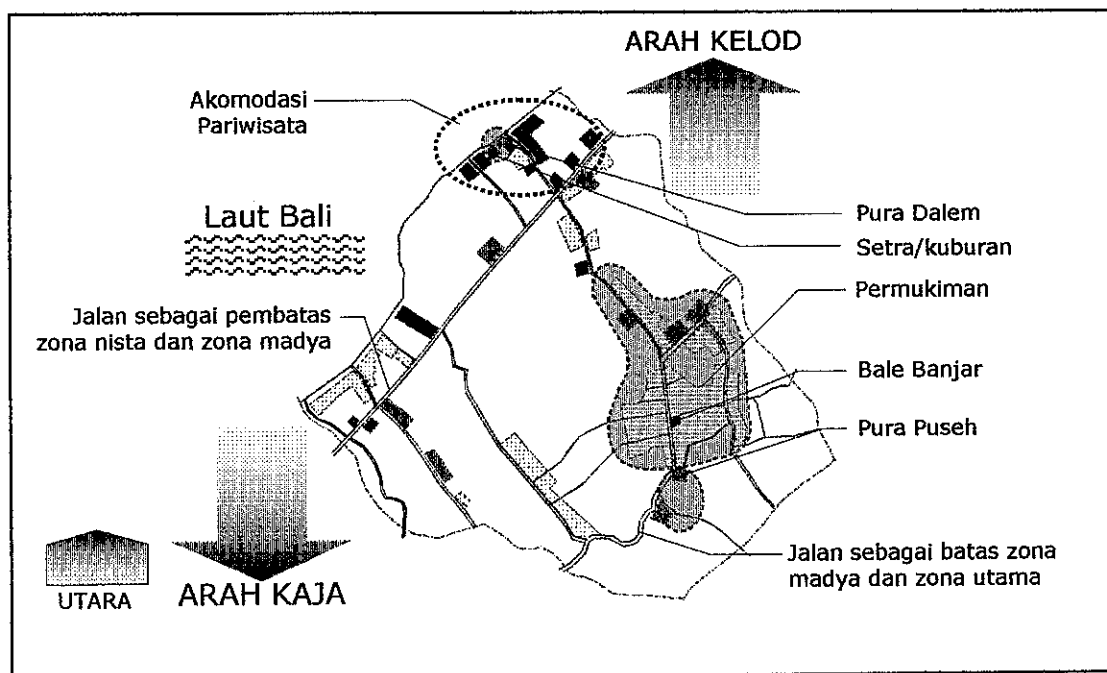
Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambar 4.2 terlihat zonasi Desa Adat Pemaron adalah pada arah selatan atau pada arah *kaja* (arah ke gunung) di sekitar Pura puseh adalah zona utama yang dibatasi dengan jalan lingkungan. Zona Madya di sekitar permukiman tradisional yang mencakup daerah sebelah utara zona utama sampai jalan utama, sedangkan zona nista adalah pada daerah sekitar pantai (arah *kelod* desa adat) yang dibatasi oleh jalan utama sampai dengan pinggir pantai.

– Desa Adat Tukad Mungga

Zona utama pada Desa Adat Tukad Mungga adalah pada arah kaja dicirikan dengan adanya Pura Puseh dan dibatasi oleh jalan lingkungan yang terdapat disebelah utara Pura Puseh dan permukiman dengan jarak terhadap permukiman adalah *apenimpug*. Zona nista, pada arah kelod desa, yang dicirikan dengan adanya kuburan, pura dalem dan terdapat fasilitas akomodasi pariwisata yang dibatasi oleh jalan raya sampai pantai. Zona madya berada diantara zona utama dan zona nista seperti pada gambar 4.3 berikut :

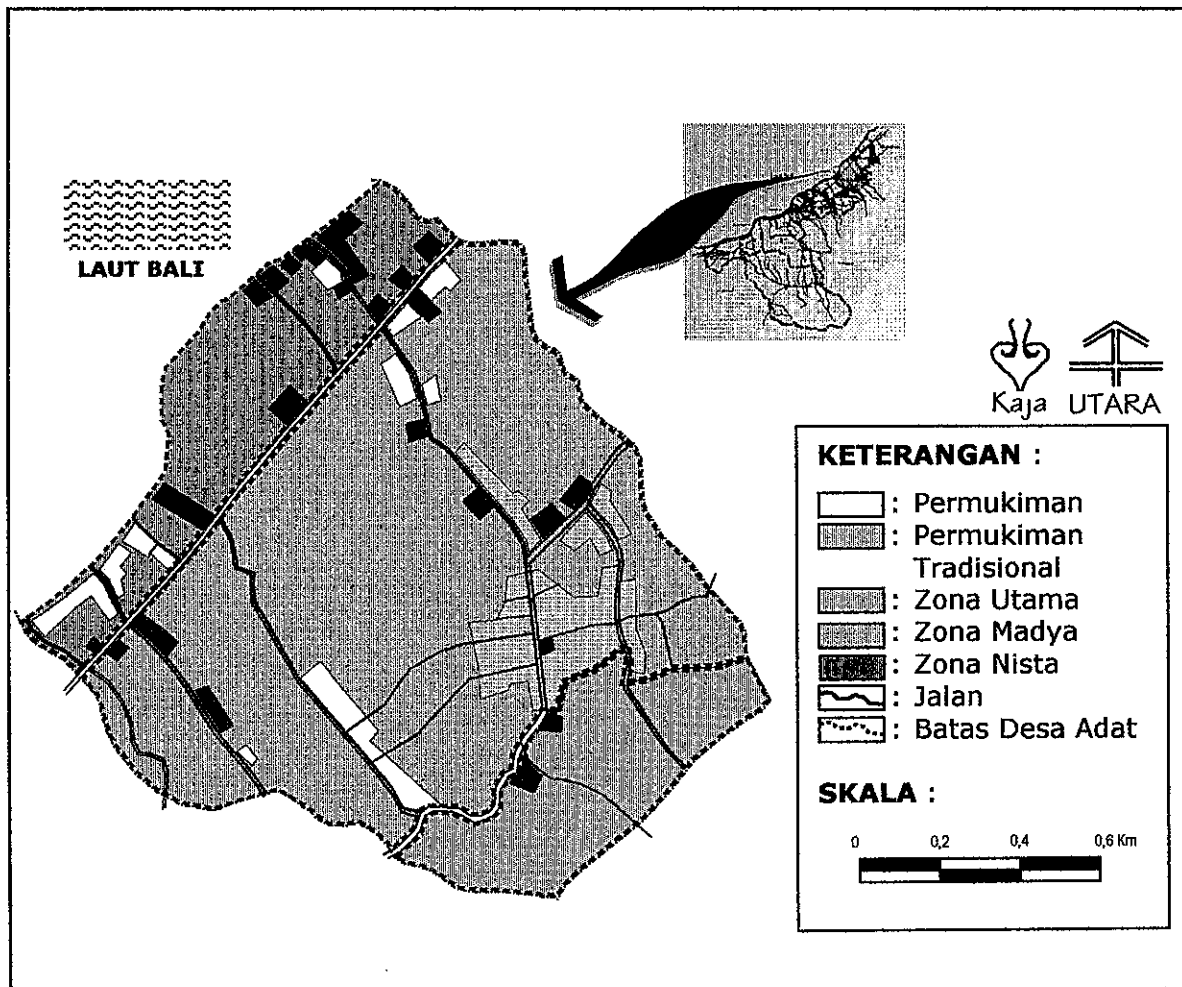
GAMBAR 4.3
ARAH KOSMOLOGI DAN ATRIBUT DESA ADAT TUKAD MUNGGA



Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambaran mengenai arah kosmologi dan atribut Desa Adat Tukad Mungga, maka zonasi desa adat Tukad Mungga dapat digambarkan seperti pada gambar 4.4 berikut :

GAMBAR 4.4
ZONASI DESA ADAT TUKAD MUNGGA



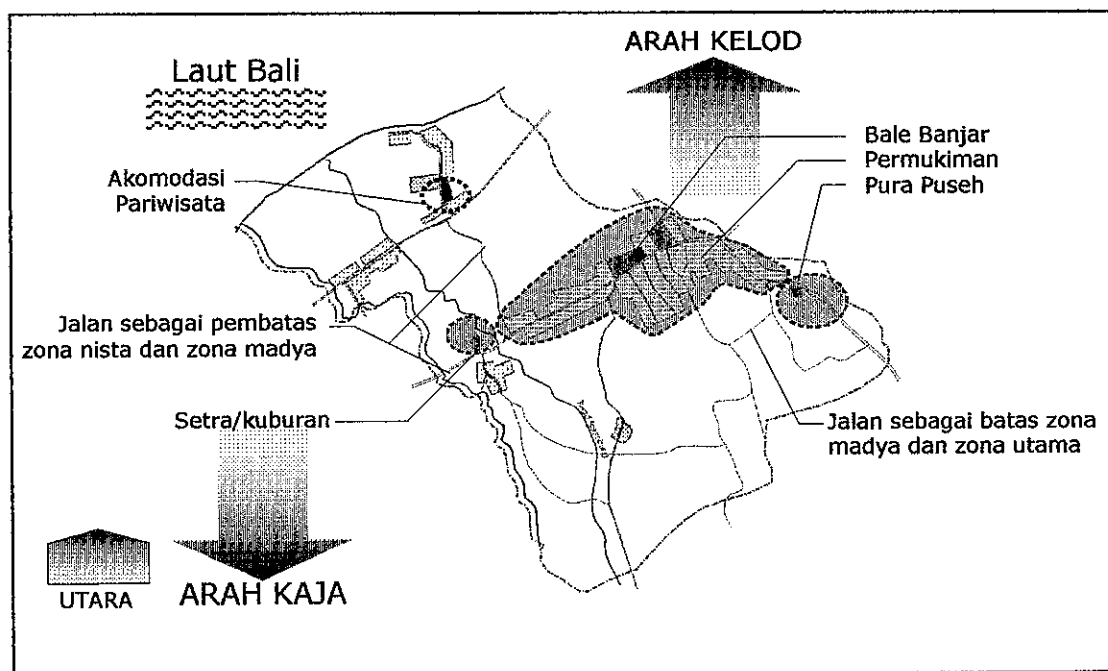
Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambar 4.4 terlihat zonasi Desa Adat Tukad Mungga adalah pada arah selatan atau pada arah *kaja* (arah ke gunung) di sekitar Pura puseh adalah zona utama yang dibatasi dengan jalan lingkungan dan permukiman penduduk. Zona Madya di sekitar permukiman tradisional yang mencakup daerah sebelah utara zona utama sampai jalan utama, sedangkan zona nista adalah pada daerah sekitar pantai (arah *kelod* desa adat) yang dibatasi oleh jalan utama sampai dengan pinggir pantai.

– Desa Adat Anturan

Zona utama pada Desa Adat Anturan adalah pada arah kaja dicirikan dengan adanya Pura Puseh dan dibatasi oleh jalan lingkungan yang terdapat disebelah timur dan utara Pura Puseh serta permukiman dengan jarak terhadap permukiman adalah *apenimpug*. Zona nista, pada arah kelod desa, yang dicirikan dengan adanya kuburan dan terdapat fasilitas akomodasi pariwisata yang dibatasi oleh jalan raya sampai pantai. Zona madya berada diantara zona utama dan zona nista seperti pada gambar 4.5 berikut :

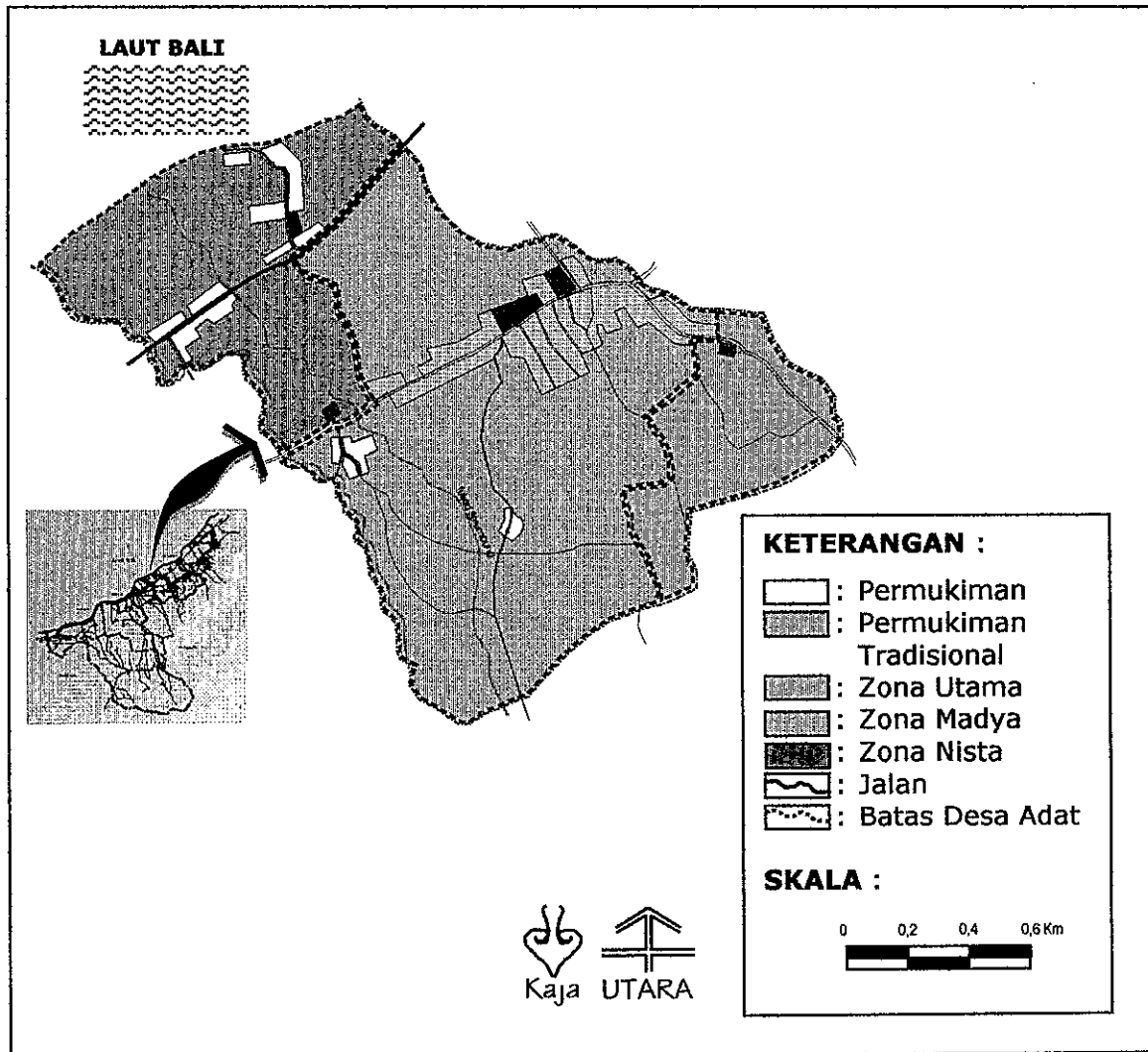
GAMBAR 4.5
ARAH KOSMOLOGI DAN ATRIBUT DESA ADAT ANTURAN



Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambaran mengenai arah kosmologi dan atribut Desa Adat Anturan, maka zonasi desa adat Anturan dapat digambarkan seperti pada gambar 4.6 berikut :

GAMBAR 4.6
ZONASI DESA ADAT ANTURAN



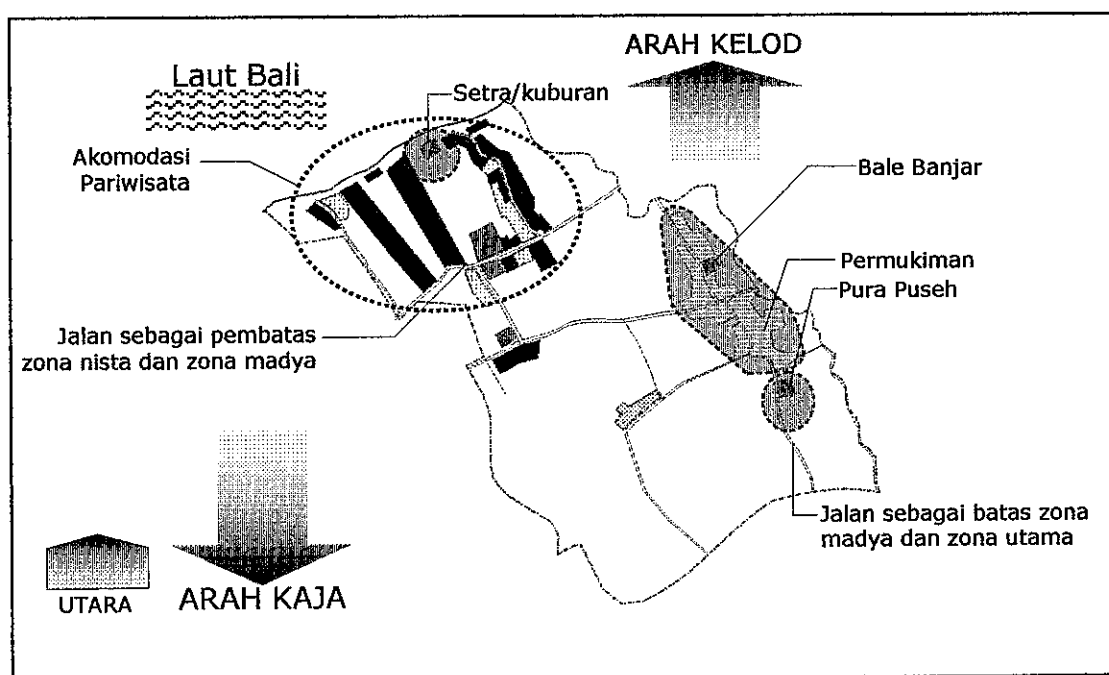
Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambar 4.6 terlihat zonasi Desa Adat Anturan adalah pada arah selatan atau pada arah *kaja* di sekitar Pura puseh adalah zona utama. Zona Madya di sekitar permukiman tradisional yang mencakup daerah sebelah utara zona utama sampai jalan utama, sedangkan zona nista adalah pada daerah sekitar pantai (arah *kelod* desa adat) yang dibatasi oleh jalan utama sampai dengan pinggir pantai.

– Desa Adat Banyualit

Zona utama pada Desa Adat Banyualit adalah pada arah kaja dicirikan dengan adanya Pura Puseh dan dibatasi oleh jalan lingkungan yang terdapat disebelah barat dan utara Pura Puseh serta permukiman dengan jarak terhadap permukiman adalah *apenimpug*. Zona nista, pada arah kelod desa, yang dicirikan dengan adanya kuburan dan terdapat fasilitas akomodasi pariwisata yang dibatasi oleh jalan raya sampai pantai. Zona madya berada diantara zona utama dan zona nista seperti pada gambar 4.7 berikut :

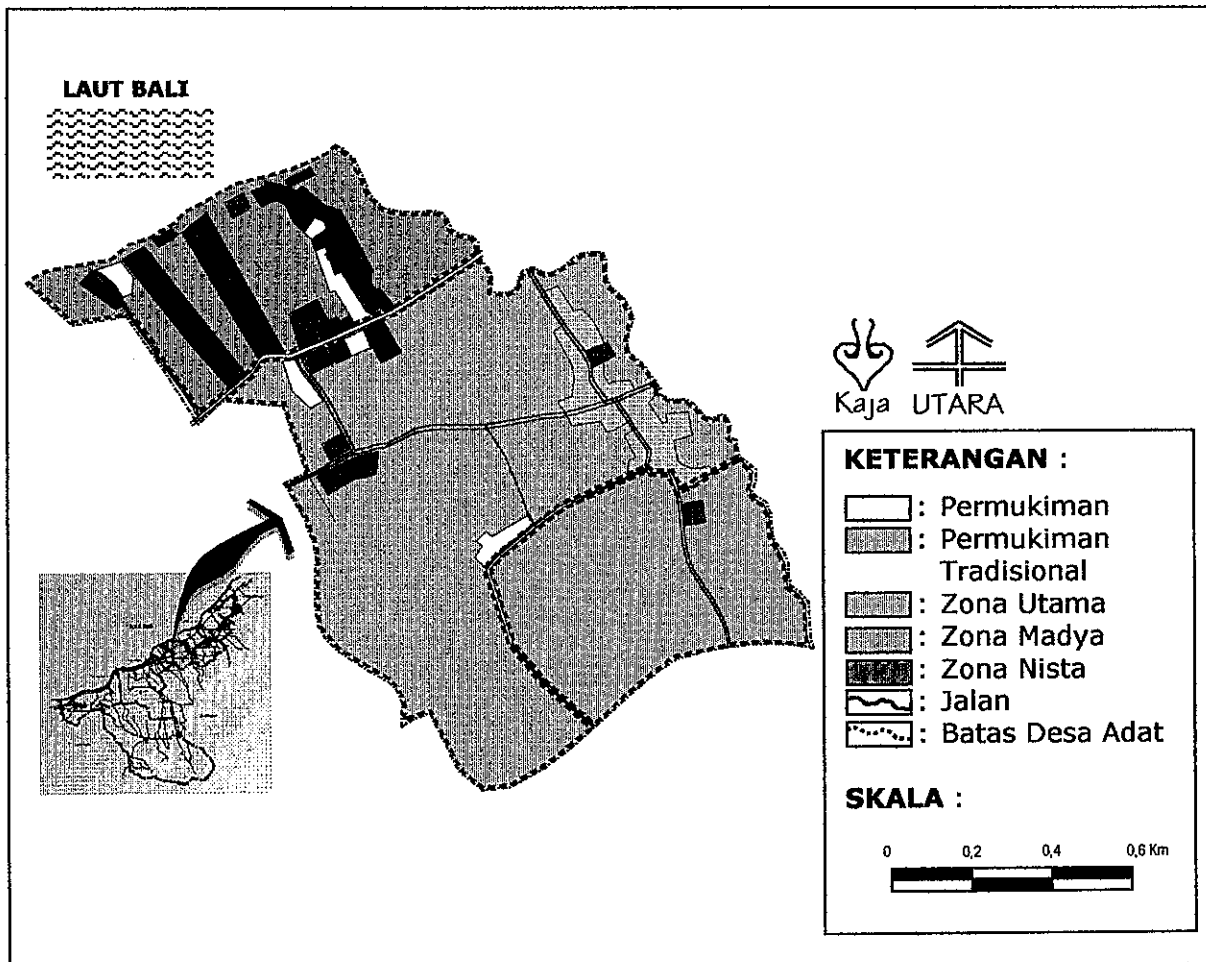
GAMBAR 4.7
ARAH KOSMOLOGI DAN ATRIBUT DESA ADAT BANYUALIT



Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambaran mengenai arah kosmologi dan atribut Desa Adat Banyualit, maka zonasi Desa Adat Banyualit dapat digambarkan seperti pada gambar 4.8 berikut :

GAMBAR 4.8
ZONASI DESA ADAT BANYUALIT



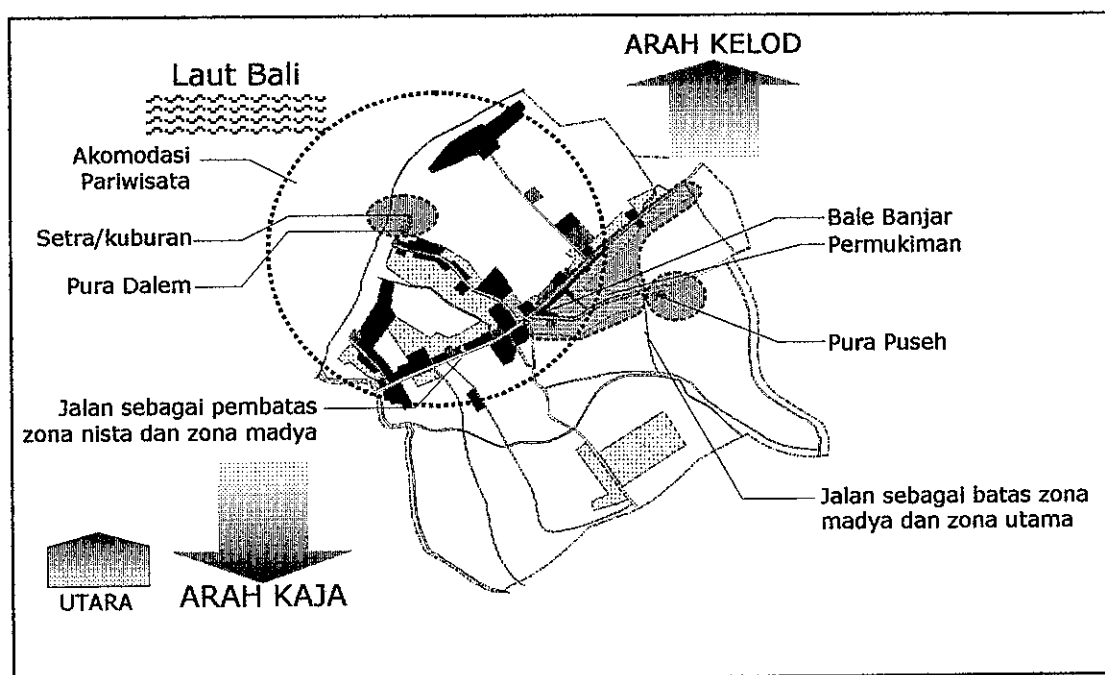
Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambar 4.8 terlihat zonasi Desa Adat Banyualit adalah pada arah selatan atau pada arah *kaja* (arah ke gunung) di sekitar Pura puseh adalah zona utama yang dibatasi dengan jalan lingkungan dan permukiman penduduk. Zona Madya di sekitar permukiman tradisional yang mencakup daerah sebelah utara zona utama sampai jalan utama, sedangkan zona nista adalah pada daerah sekitar pantai (arah *kelod* desa adat) yang dibatasi oleh jalan utama sampai dengan pinggir pantai.

– Desa Adat Kalibukbuk

Zona utama pada Desa Adat Kalibukbuk adalah pada arah kaja dicirikan dengan adanya Pura Puseh dan dibatasi oleh jalan lingkungan yang terdapat disebelah barat dan utara Pura Puseh serta permukiman dengan jarak terhadap permukiman adalah *apenimpug*. Zona nista, pada arah kelod desa, yang dicirikan dengan adanya kuburan dan pura dalem serta terdapat fasilitas akomodasi pariwisata yang dibatasi oleh jalan raya sampai pantai. Zona madya berada diantara zona utama dan zona nista yang dicirikan dengan adanya bale banjar dan pura desa, seperti pada gambar 4.9 berikut :

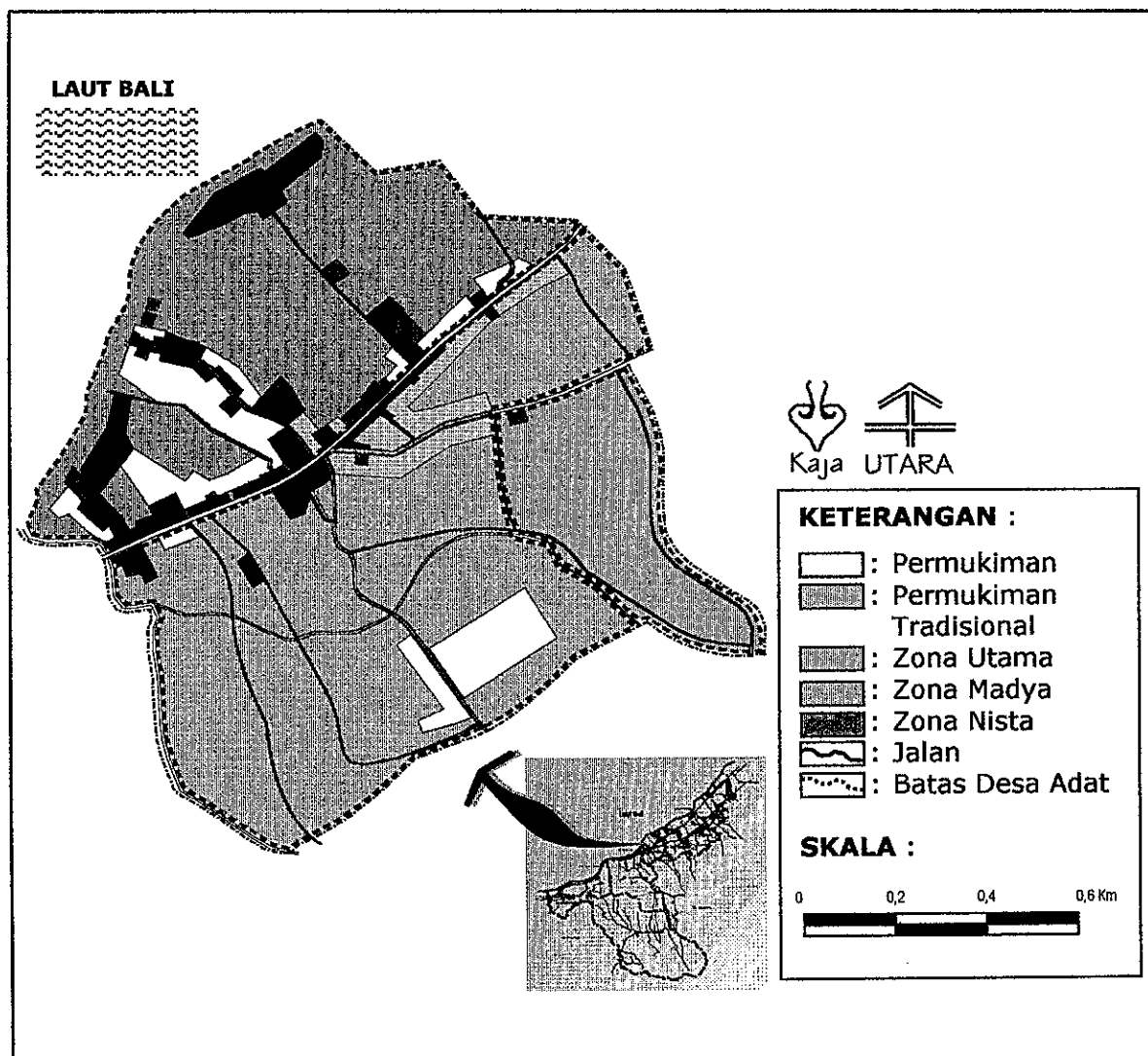
GAMBAR 4.9
ARAH KOSMOLOGI DAN ATRIBUT DESA ADAT KALIBUKBUK



Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambaran mengenai arah kosmologi dan atribut Desa Adat Kalibukbuk, maka zonasi Desa Adat Kalibukbuk dapat digambarkan seperti pada gambar 4.10 berikut :

GAMBAR 4.10
ZONASI DESA ADAT KALIBUKBUK



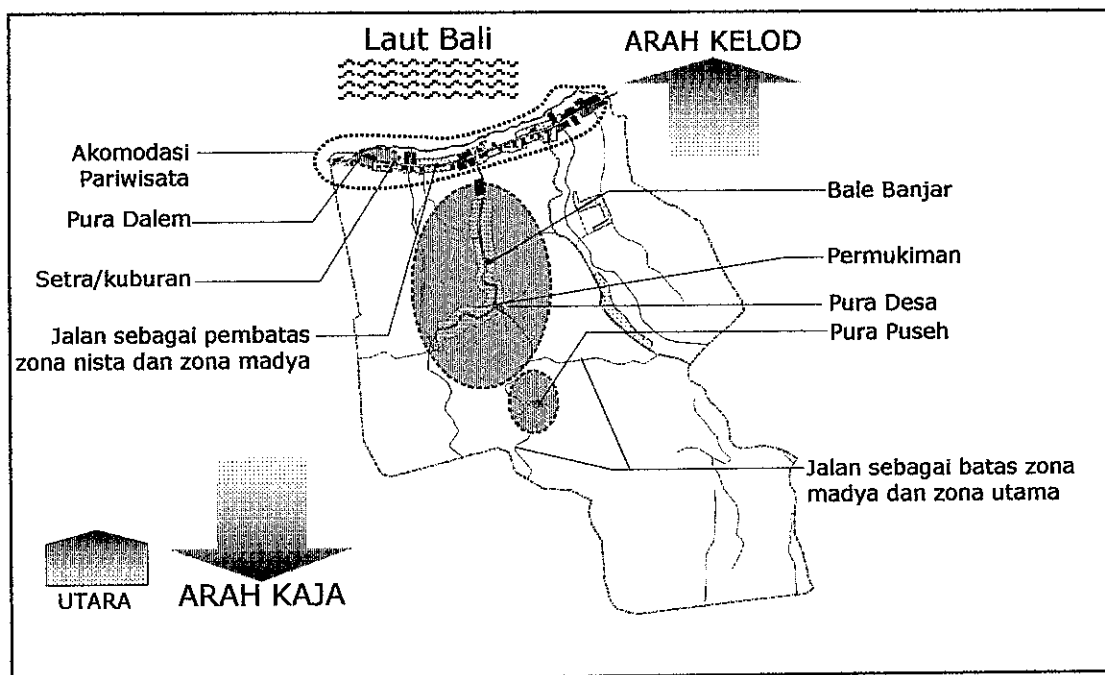
Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambar 4.10 terlihat zonasi Desa Adat Kalibukbuk adalah pada arah selatan atau pada arah *kaja* (arah ke gunung) dari permukiman penduduk adalah zona utama. Zona Madya di sekitar permukiman tradisional yang mencakup daerah sebelah utara dan barat zona utama sampai jalan utama, sedangkan zona nista adalah pada daerah sekitar pantai (arah *kelod* desa adat) yang dibatasi oleh jalan utama sampai dengan pinggir pantai.

– Desa Adat Kaliasem

Zona utama pada Desa Adat Kaliasem adalah pada arah kaja dicirikan dengan adanya Pura Puseh dan dibatasi oleh jalan lingkungan yang terdapat disebelah barat dan utara Pura Puseh. Zona nista, pada arah kelod desa, yang dicirikan dengan adanya kuburan dan pura dalem serta terdapat fasilitas akomodasi pariwisata yang dibatasi oleh jalan raya sampai pantai. Zona madya berada diantara zona utama dan zona nista yang dicirikan dengan adanya bale banjar dan pura desa, seperti pada gambar 4.11 berikut :

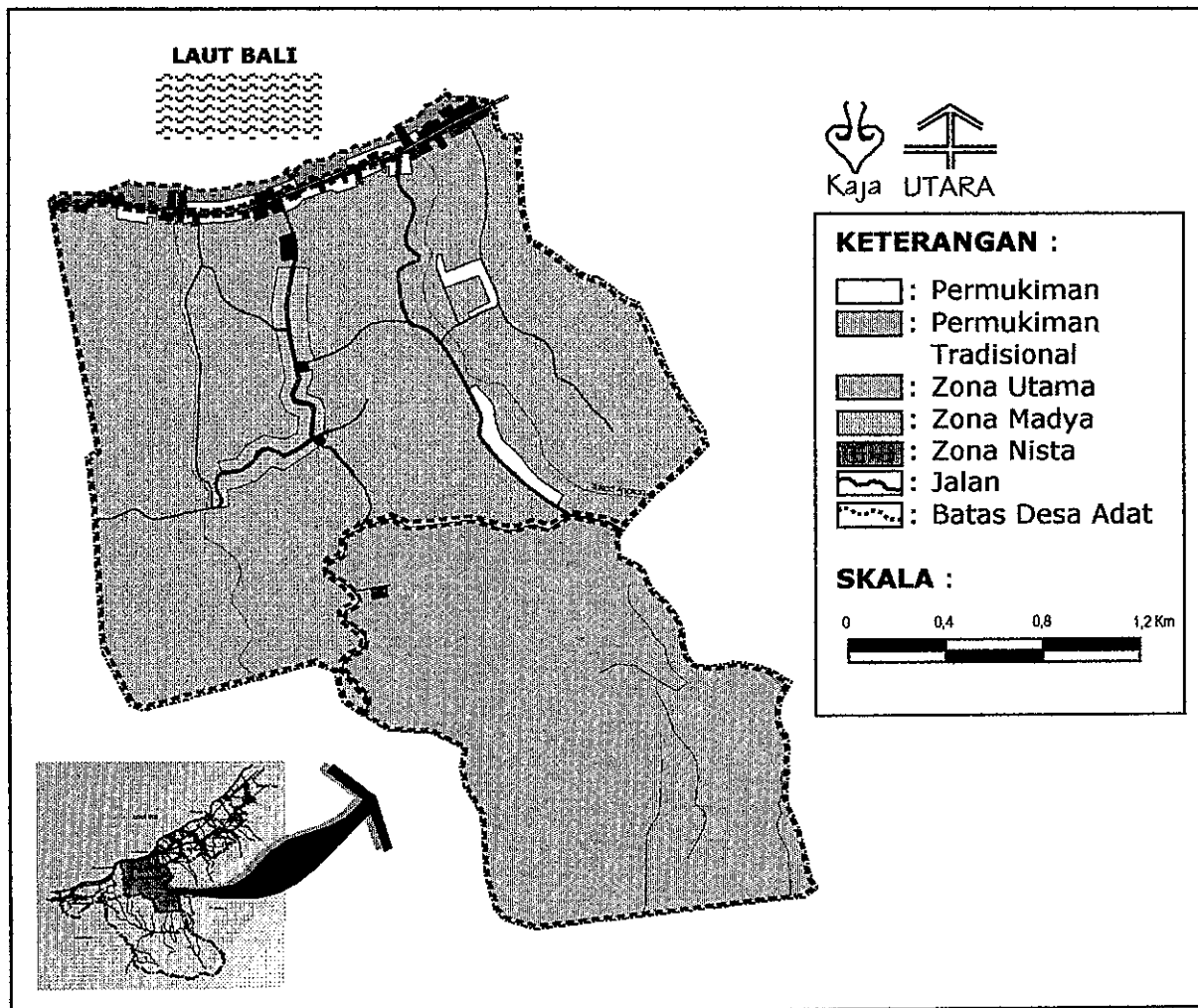
GAMBAR 4.11
ARAH KOSMOLOGI DAN ATRIBUT DESA ADAT KALIASEM



Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambaran mengenai arah kosmologi dan atribut Desa Adat Kaliasem, maka zonasi Desa Adat Kaliasem dapat digambarkan seperti pada gambar 4.12 berikut :

GAMBAR 4.12
ZONASI DESA ADAT KALIASSEM



Sumber : Hasil Analisis, 2002

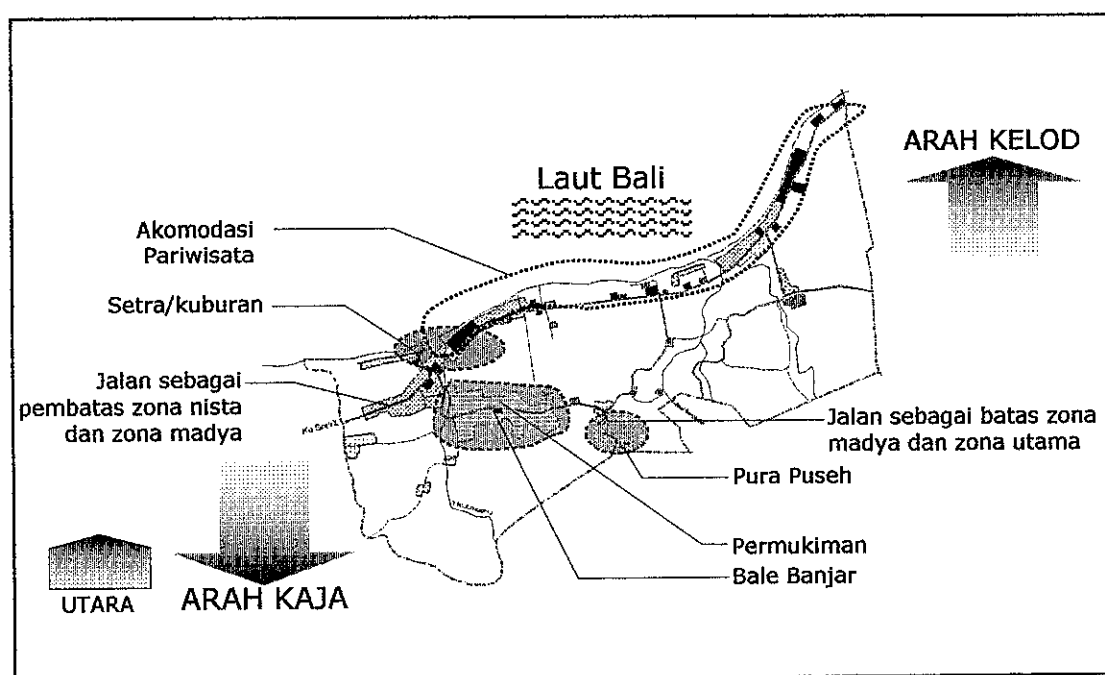
Dari gambar 4.12 terlihat zonasi Desa Adat Kaliasem adalah pada arah selatan atau pada arah *kaja* (arah ke gunung) di sekitar Pura puseh adalah zona utama yang dibatasi dengan jalan lingkungan. Zona Madya di sekitar permukiman tradisional yang mencakup daerah sebelah utara zona utama sampai jalan utama, sedangkan zona nista adalah pada daerah sekitar pantai (arah *kelod* desa adat) yang dibatasi oleh jalan utama sampai dengan pinggir pantai.

– Desa Adat Temukus

Zona utama pada Desa Adat Temukus adalah pada arah kaja dicirikan dengan adanya Pura Puseh dan dibatasi oleh jalan lingkungan yang terdapat disebelah barat dan utara Pura Puseh. Zona nista, pada arah kelod desa yang dicirikan dengan adanya kuburan dan terdapat fasilitas akomodasi pariwisata yang dibatasi oleh jalan raya sampai pada batas pantai. Zona madya berada diantara zona utama dan zona nista pada daerah permukiman penduduk yang dicirikan dengan adanya bale banjar , seperti pada gambar 4.13 berikut :

GAMBAR 4.13

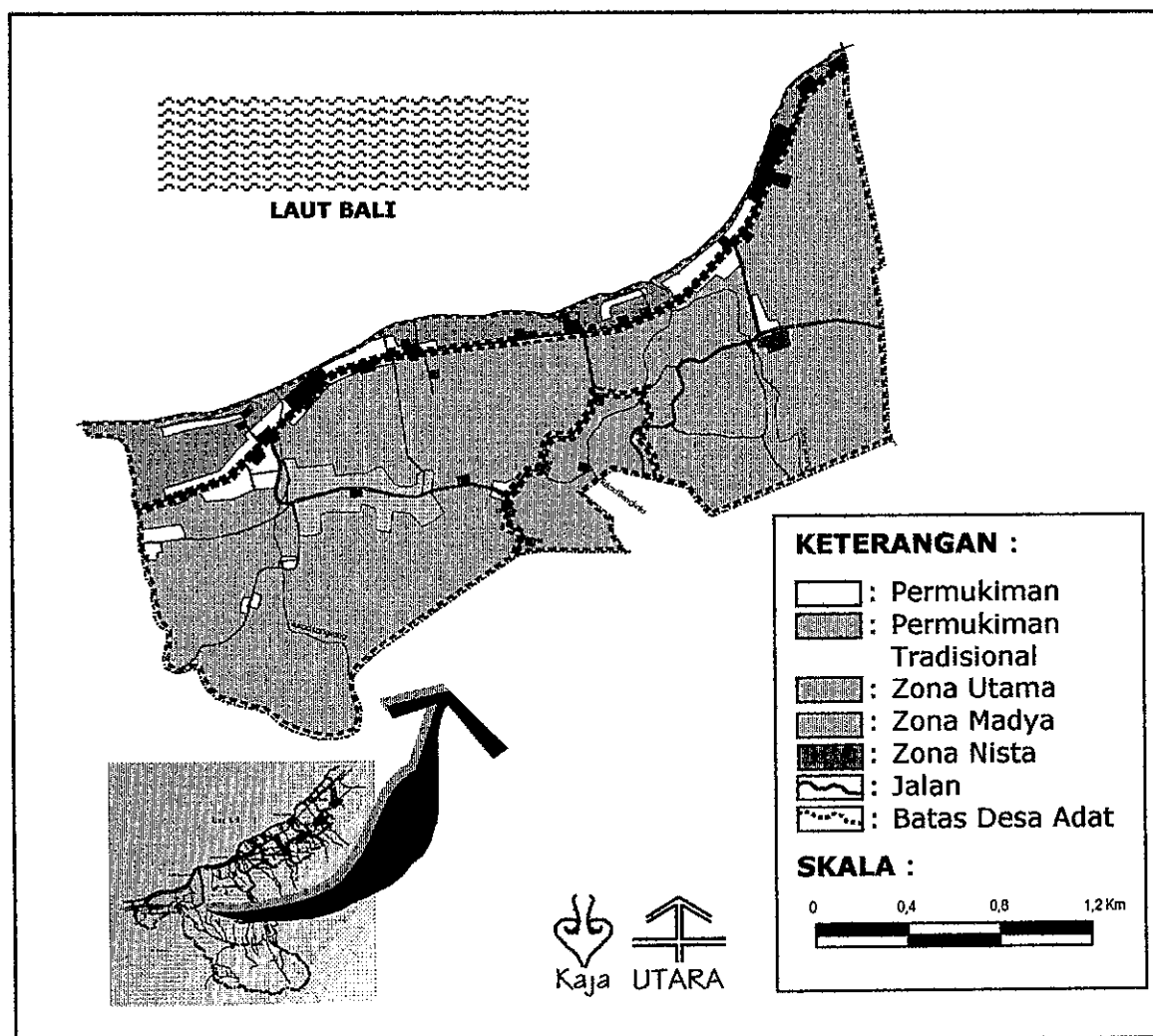
ARAH KOSMOLOGI DAN ATRIBUT DESA ADAT TEMUKUS



Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambaran mengenai arah kosmologi dan atribut Desa Adat Temukus, maka zonasi Desa Adat Temukus dapat digambarkan seperti pada gambar 4.14 berikut :

GAMBAR 4.14
ZONASI DESA ADAT TEMUKUS



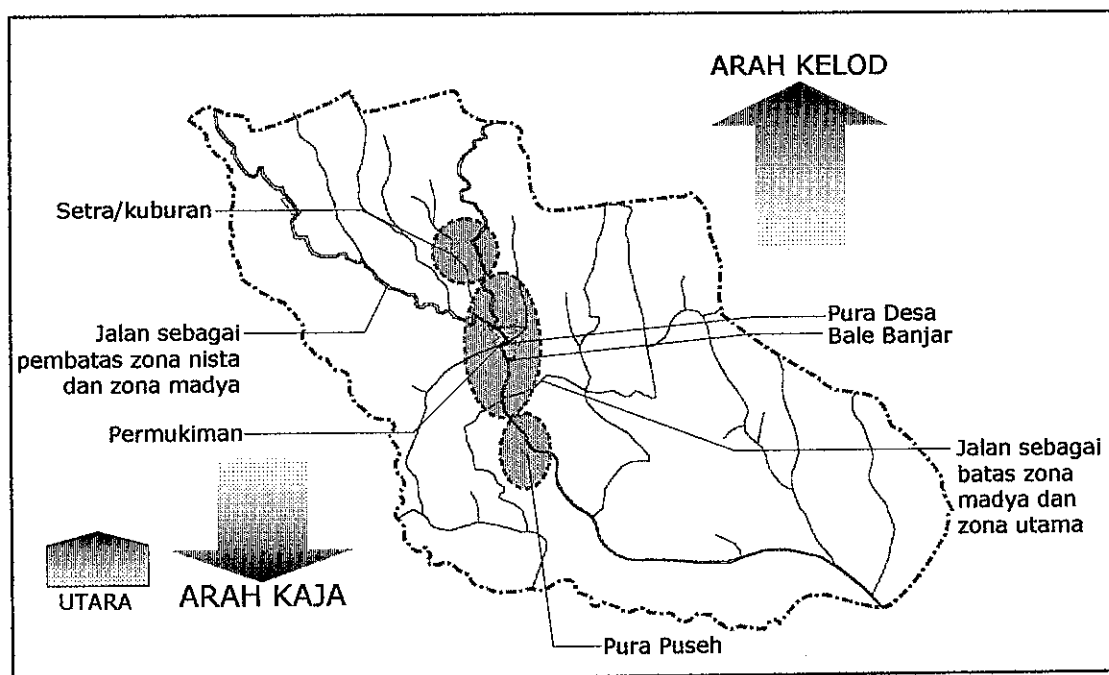
Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambar 4.14 terlihat zonasi Desa Adat Temukus adalah pada arah selatan atau pada arah *kaja* (arah ke gunung) di sekitar Pura puseh adalah zona utama. Zona Madya di sekitar permukiman tradisional yang mencakup daerah sebelah utara, barat dan timur zona utama sampai jalan utama, sedangkan zona nista adalah pada daerah sekitar pantai (arah *kelod* desa adat) yang dibatasi oleh jalan utama sampai dengan pinggir pantai.

— Desa Adat Tigawasa

Zona utama pada Desa Adat Tigawasa adalah pada arah kaja dicirikan dengan adanya Pura Puseh dan dibatasi oleh jalan lingkungan yang terdapat disebelah barat dan utara Pura Puseh. Zona nista, pada arah kelod desa yang dicirikan dengan adanya kuburan. Zona madya berada diantara zona utama dan zona nista pada daerah permukiman penduduk yang dicirikan dengan adanya bale banjar dan pura desa, seperti pada gambar 4.15 berikut :

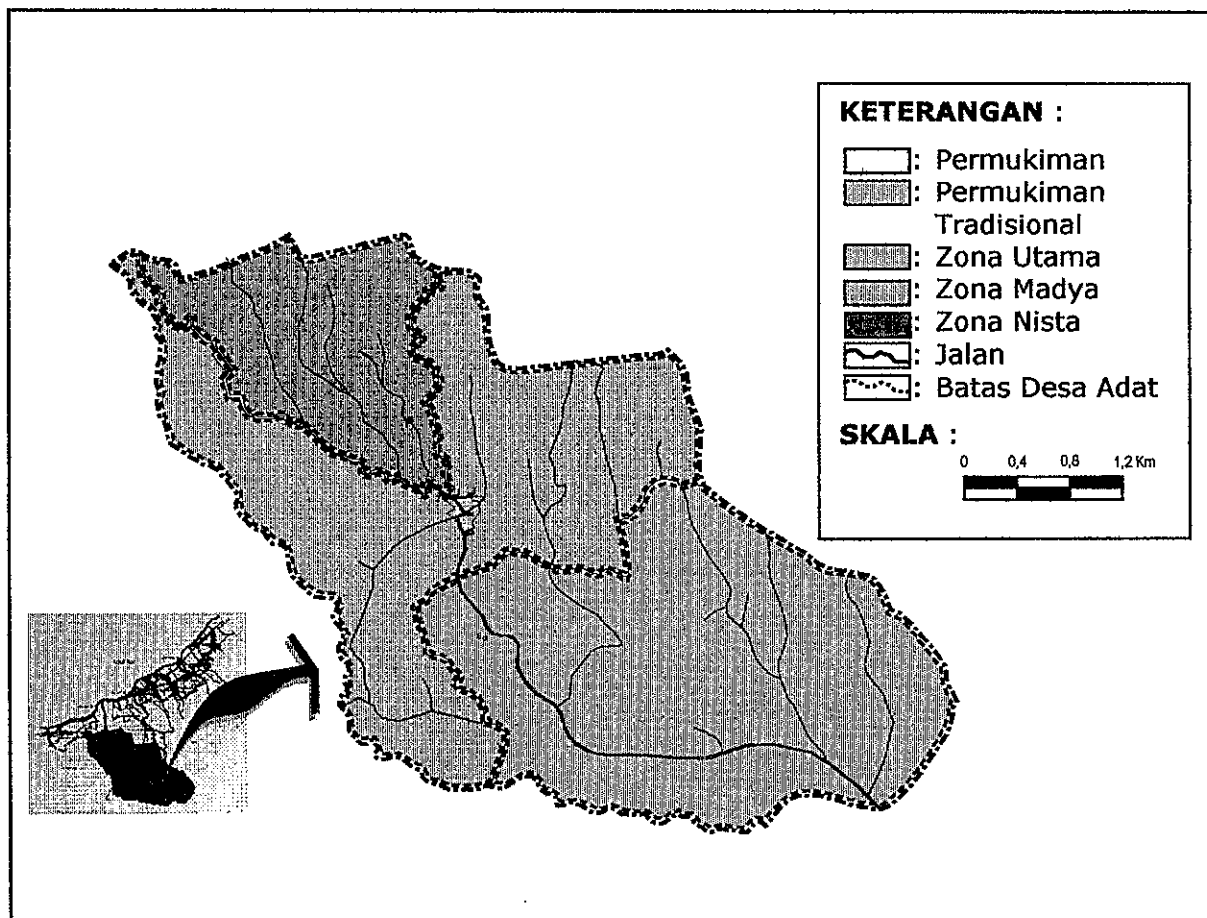
GAMBAR 4.15
ARAH KOSMOLOGI DAN ATRIBUT DESA ADAT TIGAWASA



Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambaran mengenai arah kosmologi dan atribut Desa Adat Tigawasa, maka zonasi Desa Adat Tigawasa dapat digambarkan seperti pada gambar 4.16 berikut :

GAMBAR 4.16
ZONASI DESA ADAT TIGAWASA

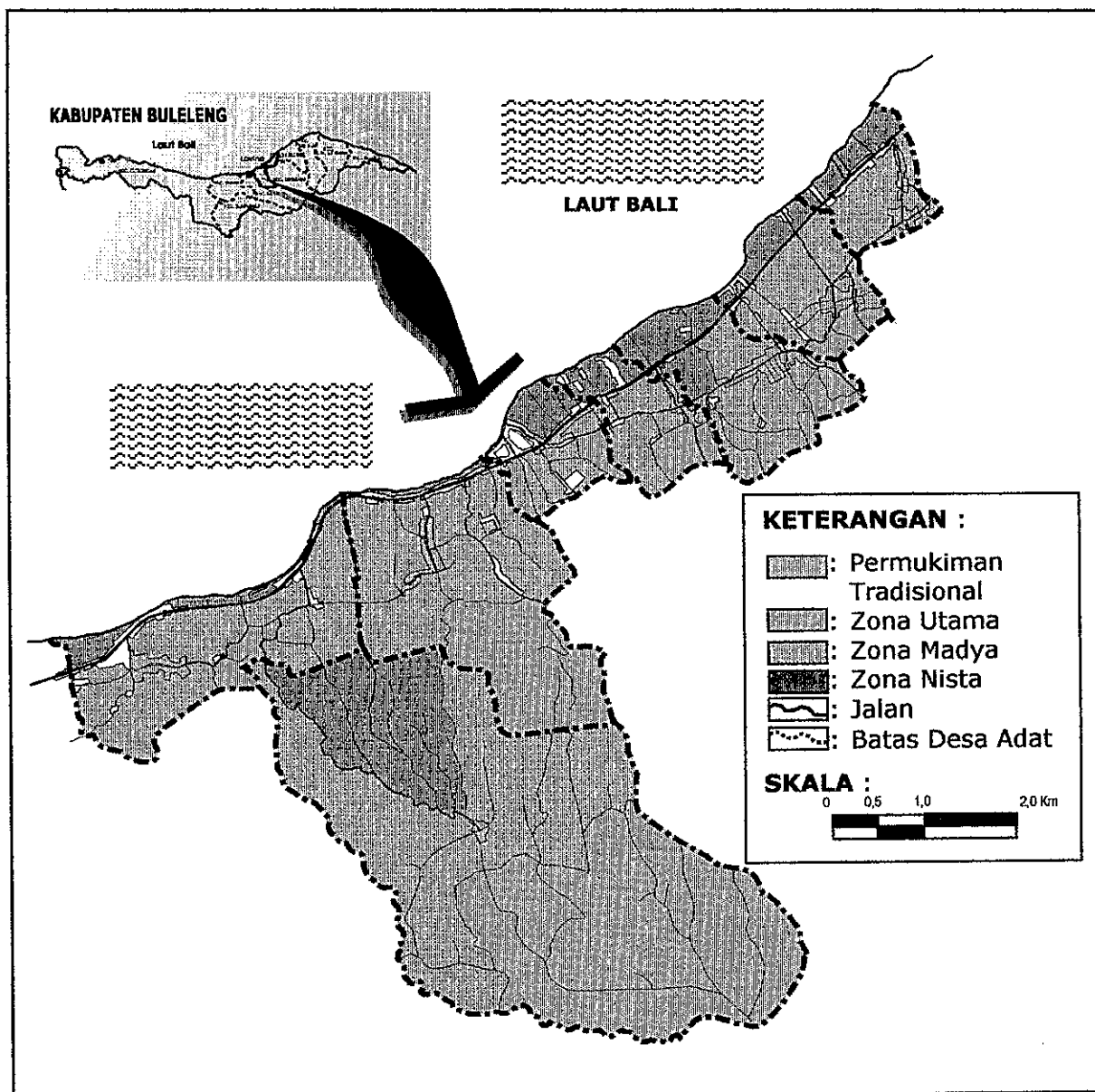


Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambar 4.16 terlihat zonasi Desa Adat Tigawasa adalah pada arah selatan atau pada arah *kaja* (arah ke gunung) di sekitar Pura puseh adalah zona utama yang dibatasi dengan jalan lingkungan. Zona Madya di sekitar permukiman tradisional yang mencakup daerah sebelah utara dan barat zona, sedangkan zona nista adalah pada daerah sekitar *setra*/kuburan (arah *kelod* desa adat) yang dibatasi oleh jalan lingkungan.

Dari gambaran mengenai zonasi dari masing – masing desa adat dapat digambarkan suatu zonasi secara keseluruhan yang mencakup semua desa adat pada kawasan pariwisata Lovina, seperti pada gambar 4.17 berikut :

GAMBAR 4.17
ZONASI DESA ADAT PADA KAWASAN PARIWISATA LOVINA



Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambar 4.17 mengenai zonasi masing – masing desa adat pada kawasan pariwisata Lovina, khususnya untuk zonasi Desa Adat Temukus dan Desa Adat Tigawasa terlihat zona utama dari Desa Adat temukus berbatasan dengan Zona nista dari Desa Adat Tigawasa.

4.3. Analisis Persepsi Wisatawan dan Persepsi Pengusaha

Untuk dapat menentukan ambang batas yang masih bisa diterima didalam masing – masing zona desa adat selain persepsi dari masyarakat dan tokoh desa adat, perlu juga dilihat persepsi dari wisatawan dan pengusaha. Untuk dapat menyimpulkan kesepakatan dari responden maka dalam analisa, akan diasumsikan bahwa suatu pendapat bisa dikatakan sebagai suatu kesepakatan apabila 50% - 100% responden menyatakan suka atau tidak suka, maksudnya adalah responden disimpulkan sepakat mengatakan “boleh” apabila 50% - 100% responden menyatakan “boleh” dan responden disimpulkan sepakat mengatakan “tidak boleh” apabila 50% - 100% responden menyatakan “tidak boleh”.

4.3.1. Analisis Persepsi Wisatawan

Dalam analisis persepsi wisatawan berikut akan diuraikan mengenai persepsi wisatawan tentang fasilitas akomodasi pariwisata yang paling disenangi sehingga akan dapat diketahui perletakan dari akomodasi pariwisata tersebut menurut keinginan dari wisatawan dan terletak pada zona utama, madya atau nista dengan memakai pendekatan zona utama adalah daerah didekat pura dan berada di hulu desa adat, zona madya adalah pada permukiman penduduk dan zona nista adalah daerah disekitar pantai. Hal ini perlu diketahui karena faktor lokasi sangat berpengaruh terhadap minat dari wisatawan. dan

ternyata dari penelitian yang telah dilakukan didalam menentukan fasilitas akomodasi pariwisata yang akan dipilih oleh para wisatawan seperti terlihat dalam tabel IV.7. Sedangkan persepsi wisatawan dalam menentukan lokasi fasilitas akomodasi pariwisata pada masing – masing zona desa adat (zona utama, madya, nista) adalah seperti pada tabel IV.8.

TABEL IV.7
PENDAPAT WISATAWAN TENTANG PERTIMBANGAN LOKASI
DALAM MEMILIH AKOMODASI PARIWISATA

AKOMODASI PARIWISATA	MEMPERTIMBANGKAN		TIDAK	
	FREKUENSI	PERSEN	FREKUENSI	PERSEN
HOTEL	22	100%	-	-
RESTORAN	22	100%	-	-
T. HIBURAN MALAM	22	100%	-	-
ART SHOP	22	100%	-	-

Sumber : Data Primer, 2002

TABEL IV.8
PENDAPAT WISATAWAN TENTANG LOKASI AKOMODASI PARIWISATA

AKOMODASI PARIWISATA	UTAMA				MADYA				NISTA			
	Suka		Tidak		Suka		tidak		Suka		Tidak	
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%
Hotel	2	9,1	20	90,9	15	68,2	7	31,8	20	90,9	2	9,1
Restoran	11	50,0	11	50,0	18	81,8	4	18,2	17	72,3	5	22,7
T. Hib. Malam	1	4,5	21	95,5	2	9,1	20	90,9	21	95,5	1	4,5
Art shop	5	22,7	17	72,3	13	59,1	9	40,9	19	86,4	3	13,6

Sumber : Data Primer, 2002

a. Zona Utama

Dari tabel IV.8 dapat dilihat ternyata hanya 9,2% (2 orang dari 22 orang) responden menyatakan senang menginap pada hotel yang berlokasi di hulu desa adat (zona utama), untuk restoran sebesar 50% (11 orang dari 22 orang), *art shop* sebesar 22,7% responden (5

orang dari 22 orang), dan hanya 4,5% (1 orang dari 22 orang) responden menyatakan senang kalau diskotik yang lokasinya pada zona utama. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada zona utama, fasilitas akomodasi pariwisata yang dikehendaki oleh wisatawan (prosentase 50% atau lebih) adalah berupa restoran.

b. Zona Madya

Pada zona madya, 68,2% (15 orang dari 22 orang) menyatakan senang menginap pada hotel yang lokasinya berbaur dengan permukiman penduduk (zona madya), restoran sebesar 81,8% (18 orang dari 22 orang), *art shop* sebesar 59,1% responden (13 orang dari 22 orang), dan untuk tempat hiburan malam sebesar 9,1% (2 orang dari 22 orang) responden. Dari data tersebut, ternyata persepsi wisatawan dengan prosentase 50% atau lebih adalah untuk akomodasi pariwisata berupa restoran, hotel dan *art shop*, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada zona madya yang disepakati oleh wisatawan adalah fasilitas akomodasi pariwisata berupa restoran, hotel dan *art shop*.

c. Zona Nista

Pada zona nista, sebanyak 20 orang dari 22 orang (90,9%) responden menyatakan menyukai hotel yang berlokasi di sekitar pantai (zona nista), restoran sebanyak 17 orang dari 22 orang (77,3%) responden, *art shop* sebanyak 21 orang dari 22 orang (95,5%) responden dan tempat hiburan malam sebanyak 21 orang dari 22 orang (95,5%) responden. Dari data tersebut, ternyata persepsi wisatawan dengan prosentase 50% atau lebih adalah untuk semua akomodasi pariwisata, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada zona nista

yang disepakati oleh wisatawan adalah fasilitas akomodasi pariwisata berupa hotel, restoran, *art shop* dan tempat hiburan malam.

Dari uraian mengenai persepsi wisatawan, dapat diketahui bahwa pada zona utama yang bisa diterima oleh wisatawan adalah restoran, pada zona madya adalah hotel, restoran dan *art shop*, sedangkan pada zona nista adalah hotel, restoran *art shop* dan tempat hiburan malam. Urutan lokasi akomodasi pariwisata yang bisa diterima oleh wisatawan adalah seperti pada tabel IV. 9 berikut.

TABEL IV.9
URUTAN LOKASI AKOMODASI PARIWISATA
YANG BISA DITERIMA OLEH WISATAWAN PADA TIAP ZONA

ZONA	AKOMODASI PARIWISATA	PROSENTASE
UTAMA	Restoran	50,0%
MADYA	Restoran	81,8%
	Hotel	68,2%
	<i>Art shop</i>	59,1%
NISTA	Tempat hiburan malam	95,5%
	Hotel	90,9%
	<i>Art shop</i>	86,4%
	Restoran	72,3%

Sumber : Hasil Analisis, 2002

4.3.2. Analisis Persepsi Pengusaha

Dalam analisis persepsi pengusaha berikut akan diuraikan mengenai persepsi pengusaha pariwisata di Lovina tentang lokasi fasilitas akomodasi pariwisata yang baik menurut pengusaha sehingga akan dapat diketahui perletakan dari akomodasi pariwisata tersebut menurut keinginan dari pengusaha dan terletak pada zona utama, madya atau nista dengan memakai pendekatan zona utama adalah daerah didekat pura dan berada di hulu

desa adat, zona madya adalah pada permukiman penduduk dan zona nista adalah daerah disekitar pantai.

a. Zona Utama

Dari tabel IV.10 dapat dilihat ternyata hanya 16,7% (5 orang dari 30 orang) responden menyatakan berminat untuk membangun fasilitas akomodasi pariwisata berupa hotel yang berlokasi di hulu desa adat (zona utama), untuk restoran sebesar 56,7% (17 orang dari 30 orang), *art shop* sebesar 23,3% responden (7 orang dari 30 orang), dan tidak ada responden menyatakan berminat untuk membangun fasilitas akomodasi pariwisata berupa tempat hiburan malam yang lokasinya pada zona utama. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada zona utama, fasilitas akomodasi pariwisata yang dikehendaki oleh pengusaha (prosentase 50% atau lebih) adalah berupa restoran.

TABEL IV.10

PENDAPAT PENGUSAHA TENTANG LOKASI AKOMODASI PARIWISATA

AKOMODASI PARIWISATA	UTAMA				MADYA				NISTA			
	Suka		Tidak		Suka		tidak		Suka		Tidak	
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%
Hotel	5	16,7	25	83,3	20	66,7	10	33,3	27	90,0	3	10,0
Restoran	17	56,7	13	43,3	25	83,3	5	16,7	26	86,7	4	13,3
T. hib. Malam	-	-	30	100	5	16,7	25	83,3	30	100	-	-
<i>Art shop</i>	7	23,3	23	76,6	28	93,3	2	6,7	24	80,0	6	20,0

Sumber : Data Primer, 2002

b. Zona Madya

Pada zona madya, 66,7% (20 orang dari 30 orang) menyatakan berminat untuk membangun fasilitas akomodasi pariwisata berupa hotel yang lokasinya berbaur dengan permukiman penduduk (zona madya), restoran sebesar 83,3% (25 orang dari 30 orang), *art*

shop sebesar 93,3% responden (28 orang dari 30 orang), dan untuk tempat hiburan malam sebesar 16,7% (5 orang dari 30 orang) responden. Dari data tersebut, ternyata persepsi pengusaha dengan prosentase 50% atau lebih adalah untuk akomodasi pariwisata berupa restoran, hotel dan *art shop*, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada zona madya yang disepakati oleh pengusaha adalah fasilitas akomodasi pariwisata berupa restoran, hotel dan *art shop*.

c. Zona Nista

Pada zona nista, sebanyak 27 orang dari 30 orang (90,0%) responden menyatakan berminat untuk membangun fasilitas akomodasi pariwisata berupa hotel yang berlokasi di sekitar pantai (zona nista), restoran sebanyak 26 orang dari 30 orang (86,7%) responden, *art shop* sebanyak 24 orang dari 30 orang (80,0%) responden dan tempat hiburan malam sebanyak 30 orang dari 30 orang (100%) responden. Dari data tersebut, ternyata persepsi pengusaha dengan prosentase 50% atau lebih adalah untuk semua akomodasi pariwisata, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada zona nista yang disepakati oleh pengusaha adalah fasilitas akomodasi pariwisata berupa hotel, restoran, *art shop* dan tempat hiburan malam.

Dari uraian mengenai persepsi pengusaha, dapat diketahui bahwa pada zona utama yang bisa diterima oleh pengusaha adalah restoran, pada zona madya adalah hotel, restoran dan *art shop*, sedangkan pada zona nista adalah hotel, restoran *art shop* dan tempat hiburan malam. Urutan lokasi akomodasi pariwisata yang bisa diterima oleh pengusaha adalah seperti pada tabel IV. 11 berikut.

TABEL IV.11
URUTAN LOKASI AKOMODASI PARIWISATA
YANG BISA DITERIMA OLEH PENGUSAHA PADA TIAP ZONA

ZONA	AKOMODASI PARIWISATA	PROSENTASE
UTAMA	Restoran	56,7%
MADYA	<i>Art shop</i>	93,3%
	Restoran	83,3%
	Hotel	66,7%
NISTA	Tempat hiburan malam	100,0%
	Hotel	90,0%
	Restoran	86,7%
	<i>Art shop</i>	80,0%

Sumber : Hasil Analisis, 2002

4.4. Analisis Kesepakatan Masyarakat, Wisatawan dan Pengusaha

Dalam analisa ambang batas, terlebih dahulu dibuat range penilaian terhadap prosentase pendapat dari responden sehingga akan dapat ditentukan sekor dari masing – masing range, sebagai berikut : <10%=1, 11-20=2, 21-30=3, 31-40=4, 41-50=5, 51-60=6, 61-70=7, 71-80=8, 81-90=9, 91-100=10. untuk bisa menentukan suatu kesepakatan antara masyarakat, wisatawan dan pengusaha, dipakai batasan 50% - 100% yang berarti pada level 50% adalah batas minimal yang bisa diterima oleh responden, sehingga dari ketentuan tersebut bisa disimpulkan bahwa kesepakatan adalah apabila dari semua responden (masyarakat, wisatawan dan pengusaha) pendapatnya sama dengan 50% atau lebih. Sedangkan apabila titik temu dari pendapat responden terjadi pada kuadran II dan IV (pada grafik kesepakatan persepsi responden) maka suatu fasilitas pariwisata bisa dibangun dengan pertimbangan dan mendapat persetujuan dari Desa Adat (tokoh desa adat dan warga desa adat).

Berikut akan diuraikan mengenai range dari masing – masing persepsi baik persepsi masyarakat desa adat, persepsi wisatawan dan persepsi pengusaha, seperti pada tabel IV.12 berikut :

TABEL IV.12
NILAI MASING – MASING PERSEPSI RESPONDEN

ZONA	AKOMODASI PARIWISATA	MASYARAKAT		WISATAWAN		PENGUSAHA	
		PERSEN	SKOR	PERSEN	SKOR	PERSEN	SKOR
UTAMA	Hotel	9,4%	1	9,1%	1	16,7	2
	Restoran	22,8%	3	50,0%	5	56,7	6
	Art shop	22,3%	3	22,7%	3	23,3	3
	T. hiburan malam	-	-	4,5%	1	-	-
MADYA	Hotel	81,9%	9	68,2%	7	66,7	7
	Restoran	92,4%	10	81,8%	9	83,3	9
	Art shop	96,5%	10	59,1%	6	93,3	10
	T. hiburan malam	-	-	9,1%	1	16,7	2
NISTA	Hotel	94,7%	10	90,9%	10	90,0	10
	Restoran	91,8%	10	72,3%	8	86,7	9
	Art shop	95,3%	10	86,4%	9	80,0	9
	T. hiburan malam	97,1%	10	95,5%	10	100,0	10

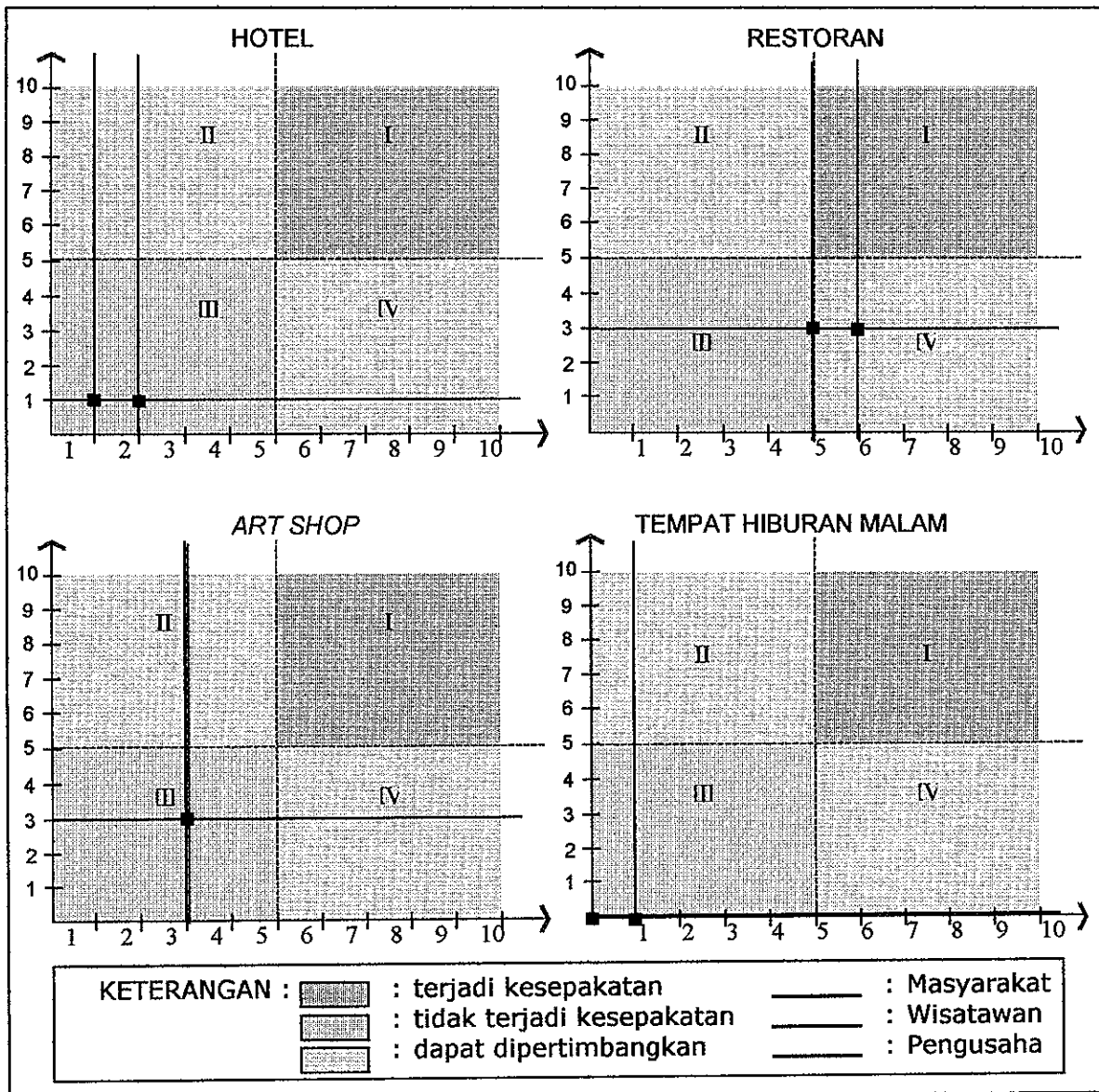
Sumber : Data Primer, 2002

Dari tabel IV.12 dapat dibuat suatu diagram yang menunjukkan batas kesepakatan dari responden baik masyarakat, wisatawan maupun pengusaha mengenai boleh dan tidak bolehnya suatu fasilitas akomodasi pariwisata pada masing – masing zona desa adat, seperti pada gambar berikut :

– Zona Utama

GAMBAR 4.18

GRAFIK KESEPAKATAN MASYARAKAT, WISATAWAN DAN PENGUSAHA
PADA ZONA UTAMA



Sumber : Hasil Analisis, 2002

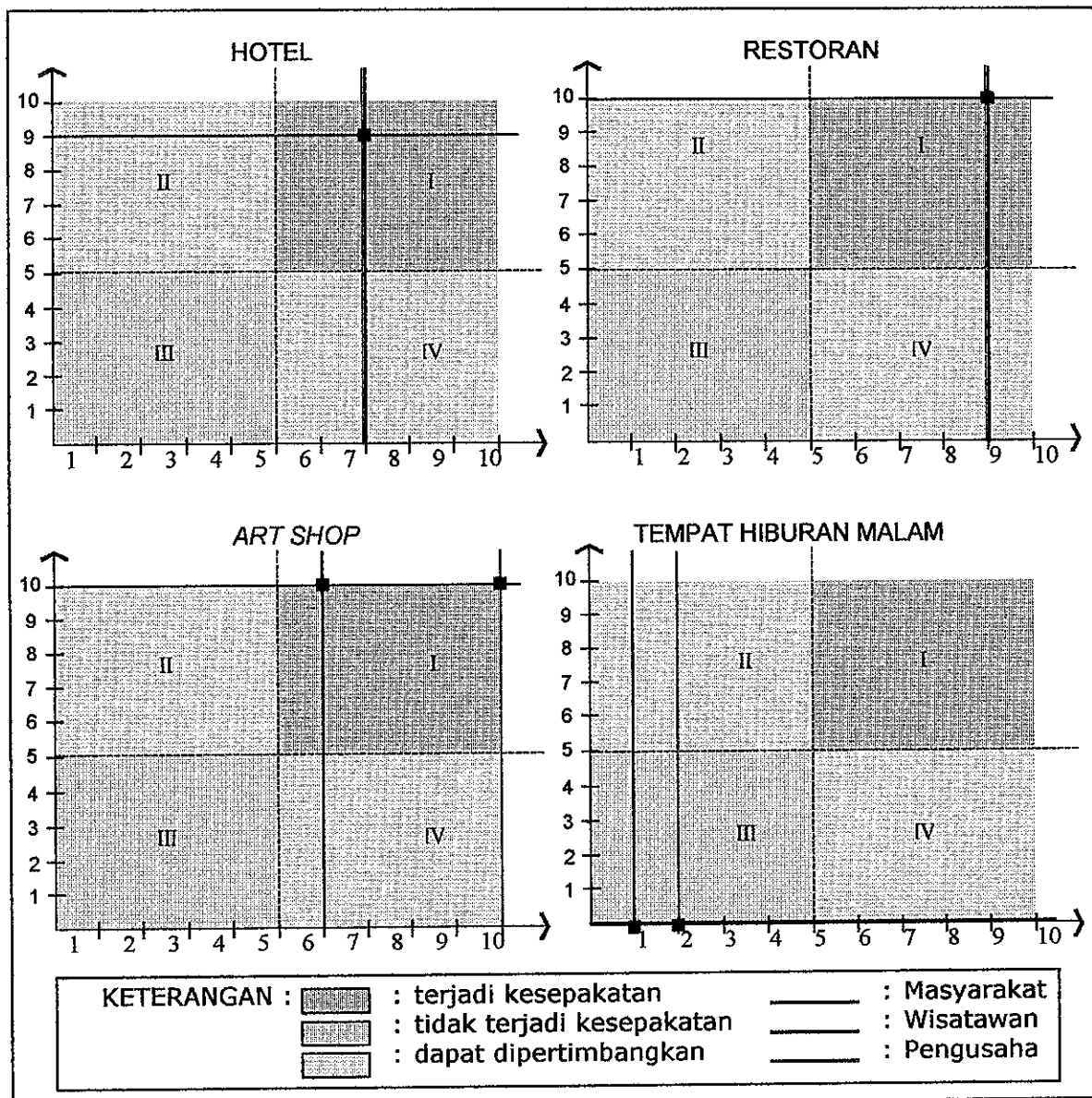
Dari gambar 4.18 dapat disimpulkan bahwa kesepakatan dari masyarakat, wisatawan dan pengusaha pada zona utama tidak ada fasilitas akomodasi pariwisata berupa hotel, art shop dan tempat hiburan malam karena titik temu pendapat responden terjadi

pada kuadran III. Sedangkan untuk restoran masih memungkinkan di bangun pada zona utama dengan persetujuan dari desa adat dan memperhatikan radius kesucian pura.

– Zona Madya

GAMBAR 4.19

GRAFIK KESEPAKATAN MASYARAKAT, WISATAWAN DAN PENGUSAHA
PADA ZONA MADYA



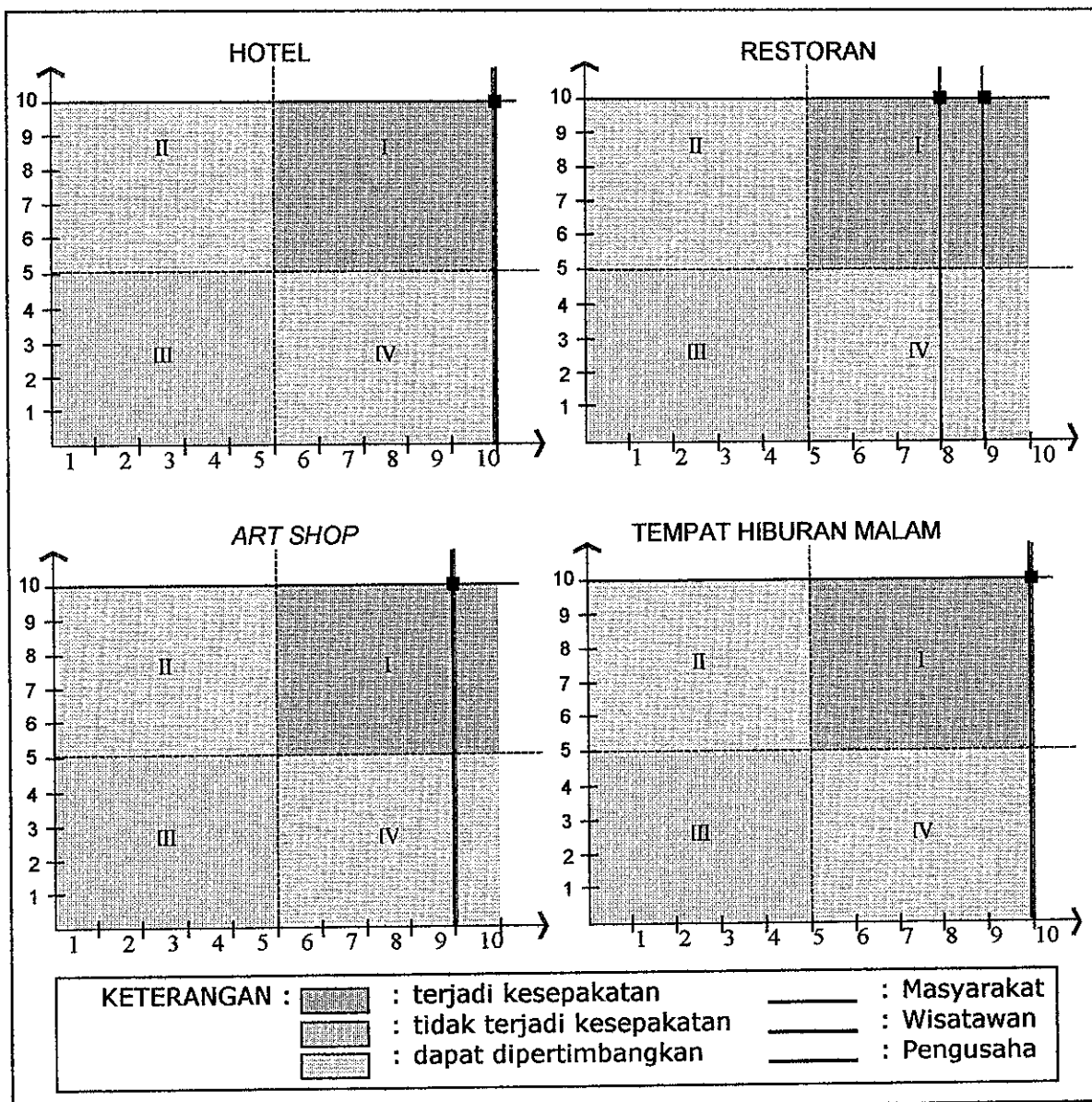
Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambar 4.19 dapat disimpulkan bahwa kesepakatan pada zona madya, fasilitas akomodasi pariwisata yang boleh ada berupa hotel, restoran dan *art shop* (kuadran I), sedangkan tempat hiburan malam tidak boleh ada pada zona madya (kuadran III).

— Zona Nista

GAMBAR 4.20

GRAFIK KESEPAKATAN MASYARAKAT, WISATAWAN DAN PENGUSAHA
PADA ZONA NISTA



Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari gambar 4.20 dapat disimpulkan bahwa kesepakatan dari masyarakat, wisatawan dan pengusaha pada zona nista, semua fasilitas akomodasi pariwisata boleh ada baik berupa hotel, restoran *art shop* dan tempat hiburan malam.

Secara keseluruhan kesepakatan antara masyarakat desa adat, wisatawan dan pengusaha adalah :

- Zona Utama : tidak ada fasilitas akomodasi pariwisata berupa hotel, *art shop* dan tempat hiburan malam sedangkan restoran masih dipertimbangkan dengan persetujuan masyarakat desa adat dan memperhatikan ketentuan radius kesucian pura.
- Zona Madya : hotel, restoran dan *art shop*
- Zona Nista : hotel, restoran, *art shop* dan tempat hiburan malam

Untuk pembangunan fasilitas akomodasi pariwisata pada zona nista yang berbatasan dengan zona utama seperti yang terjadi pada Desa Adat Temukus dan Desa Adat Tigawasa, perlu mendapatkan persetujuan dari masyarakat dan tokoh desa adat dari kedua desa adat (Desa Adat Temukus dan Desa Adat Tigawasa) dengan tetap memperhatikan radius kesucian pura yaitu *apenimpug* atau minimal sekitar 20 meter sampai 40 meter.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pihak pemerintah (Bappeda, Dinas Pariwisata dan Dinas PU Kabupaten Buleleng) memang berkeinginan untuk terus mengembangkan pariwisata pada kawasan pariwisata Lovina untuk menunjang pendapatan daerah dan juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan tetap

memperhatikan kebudayaan dan adat istiadat masyarakat setempat, artinya dalam mengembangkan pariwisata di Lovina khususnya dan Kabupaten Buleleng umumnya, Pemerintah Kabupaten Buleleng berkepentingan untuk mengembangkan pariwisata dengan tidak mengorbankan adat istiadat yang sudah ada. Dari persepsi Pemerintah Kabupaten Buleleng tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah akan mendukung segala upaya untuk mengembangkan pariwisata yang tetap memperhatikan dan dilandasi oleh kebudayaan dan adat setempat.

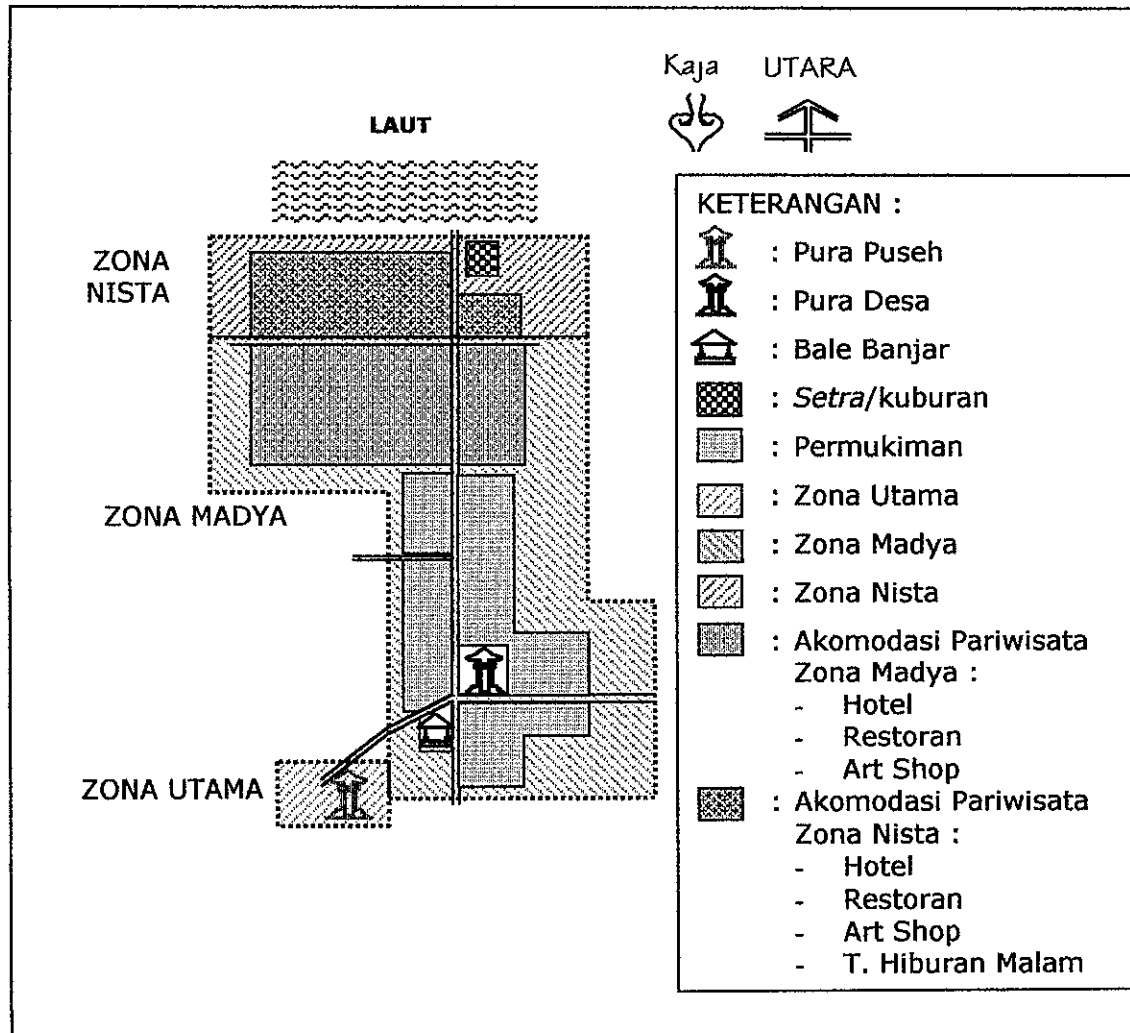
4.5. Analisis Rancang Pola Tata Ruang Vernakular

Setelah diketahui zonasi dari masing – masing desa adat serta batasan – batasan yang dikehendaki oleh masyarakat desa adat, wisatawan dan pengusaha maka dapat digambarkan suatu pola tata ruang vernakular yang dapat diterima oleh masyarakat, wisatawan dan pengusaha pada masing – masing desa adat sebagai berikut :

4.5.1. Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Pamaron

Pola tata ruang vernakular Desa Adat Pamaron dapat digambarkan dengan memperhatikan zonasi desa adat (utama, madya dan nista) dan memperhatikan fasilitas akomodasi pariwisata yang boleh dan tidak boleh pada masing – masing zona. Pola tata ruang vernakular Desa Adat Pamaron adalah seperti pada gambar 4.21 berikut.

GAMBAR 4.21
POLA TATA RUANG VERNAKULAR DESA ADAT PEMARON



Sumber : Hasil Analisis dan Interpretasi Dari Gambar 3.10, 2002

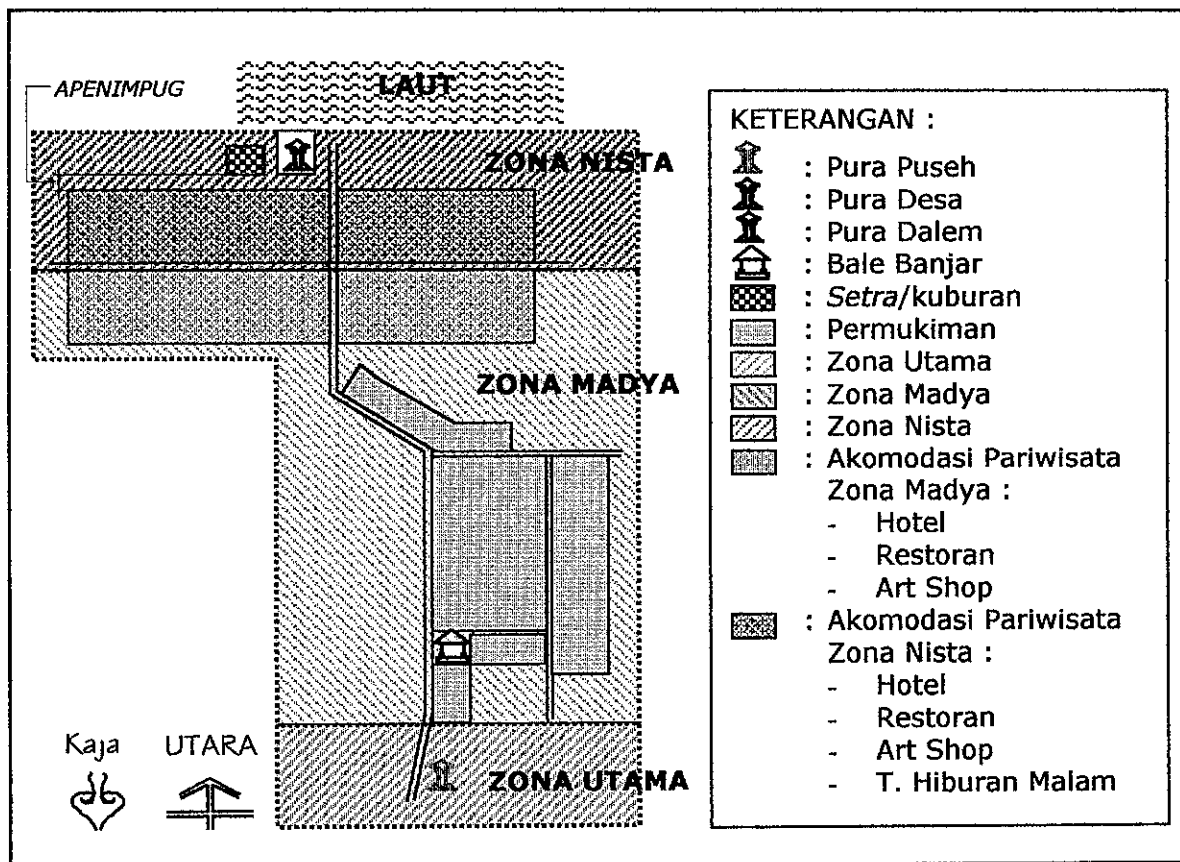
Dari gambar 4.21 terlihat pola tata ruang vernakular Desa Adat Pemaron, zona utama tidak dipergunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata, zona madya sudah bisa dipergunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata kecuali untuk tempat hiburan malam, zona nista bisa digunakan untuk semua fasilitas akomodasi pariwisata.

4.5.2. Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Tukad Mungga

Pola tata ruang vernakular desa adat Tukad Mungga adalah seperti pada gambar 4.22 berikut :

GAMBAR 4.22

POLA TATA RUANG VERNAKULAR DESA ADAT TUKAD MUNGGA



Sumber : Hasil Analisis dan Interpretasi Dari Gambar 3.11, 2002

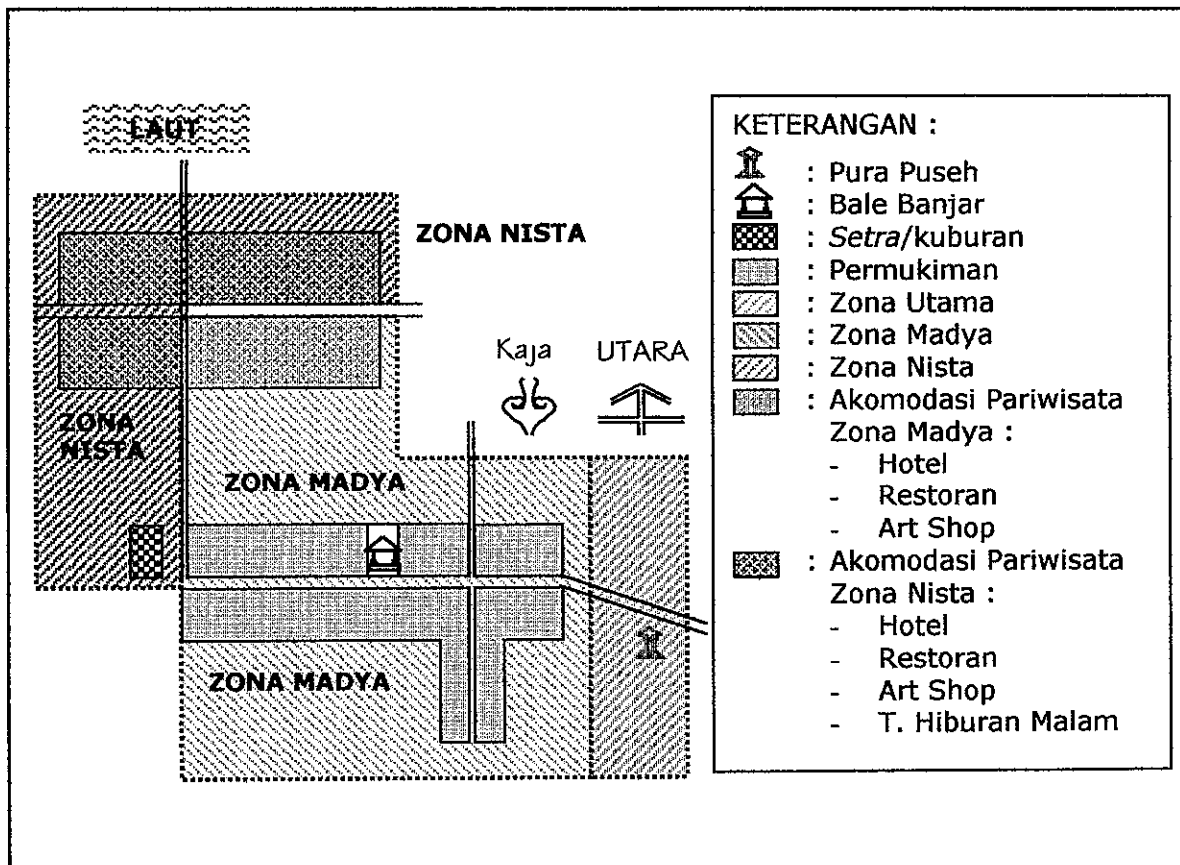
Dari gambar 4.22 terlihat pola tata ruang vernakular Desa Adat Tukad Mungga, zona utama tidak dipergunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata, zona madya sudah bisa dipergunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata kecuali untuk tempat hiburan malam, zona nista bisa digunakan untuk semua fasilitas akomodasi pariwisata.

4.5.3. Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Anturan

Pola tata ruang vernakular desa adat Anturan adalah seperti pada gambar 4.23 berikut :

GAMBAR 4.23

POLA TATA RUANG VERNAKULAR DESA ADAT ANTURAN



Sumber : Hasil Analisis dan Interpretasi Dari Gambar 3.12, 2002

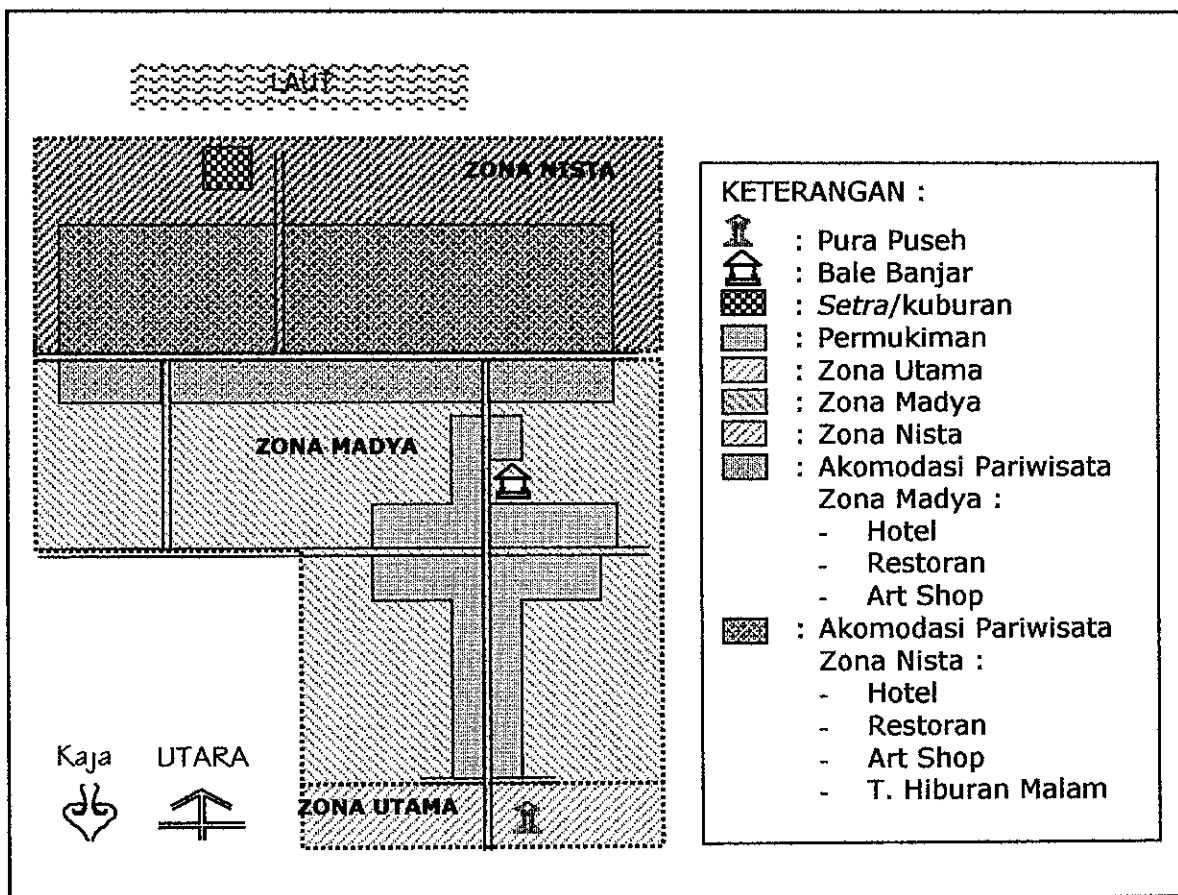
Dari gambar 4.23 terlihat pola tata ruang vernacular Desa Adat Anturan, zona utama tidak dipergunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata, zona madya sudah bisa dipergunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata kecuali untuk tempat hiburan malam, zona nista bisa digunakan untuk semua fasilitas akomodasi pariwisata.

4.5.4. Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Banyualit

Pola tata ruang vernakular desa adat Banyualit adalah seperti pada gambar 4.24 berikut :

GAMBAR 4.24

POLA TATA RUANG VERNAKULAR DESA ADAT BANYUALIT



Sumber : Hasil Analisis dan Interpretasi Dari Gambar 3.13, 2002

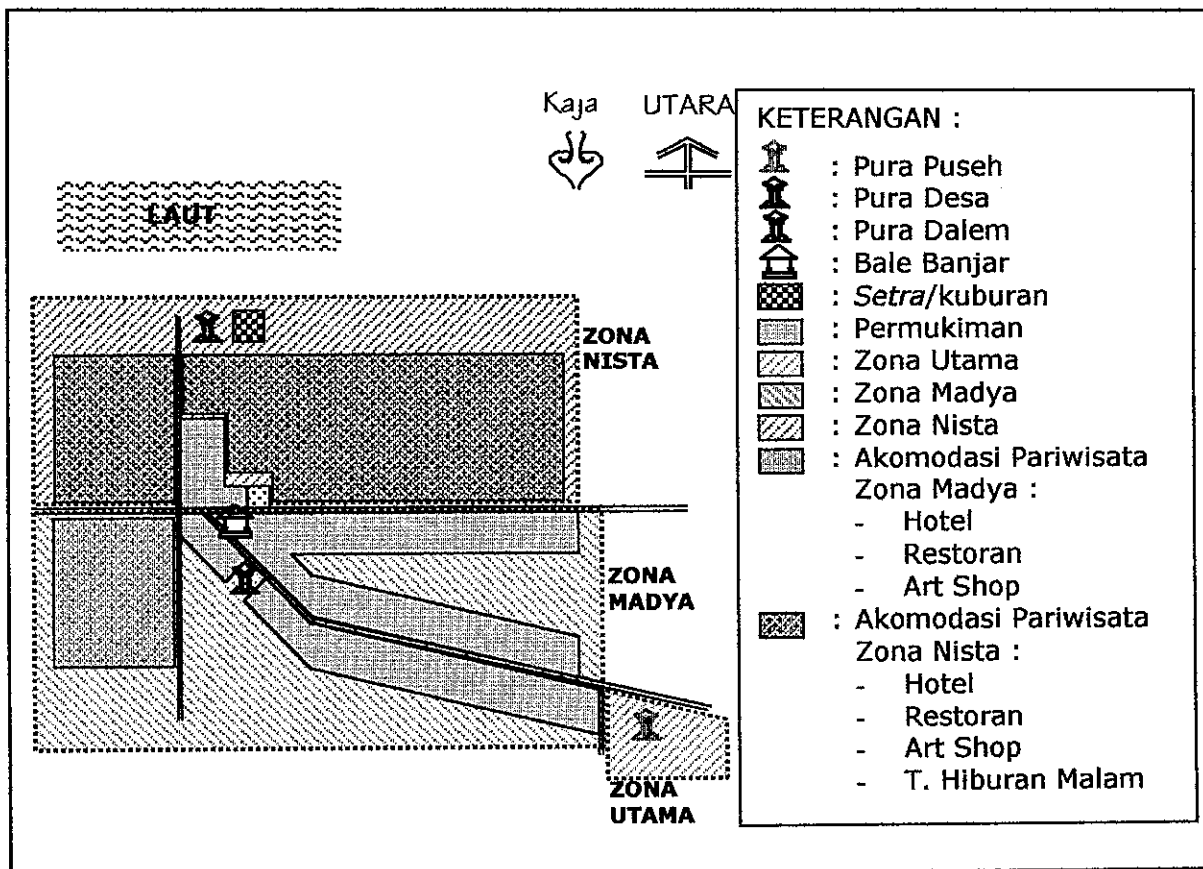
Dari gambar 4.24 terlihat pola tata ruang vernacular Desa Adat Banyualit, zona utama tidak dipergunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata, zona madya sudah bisa dipergunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata kecuali untuk tempat hiburan malam, zona nista bisa digunakan untuk semua fasilitas akomodasi pariwisata.

4.5.5. Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Kalibukbuk

Pola tata ruang vernakular desa adat Kalibukbuk adalah seperti pada gambar 4.25 berikut :

GAMBAR 4.25

POLA TATA RUANG VERNAKULAR DESA ADAT KALIBUKBUK



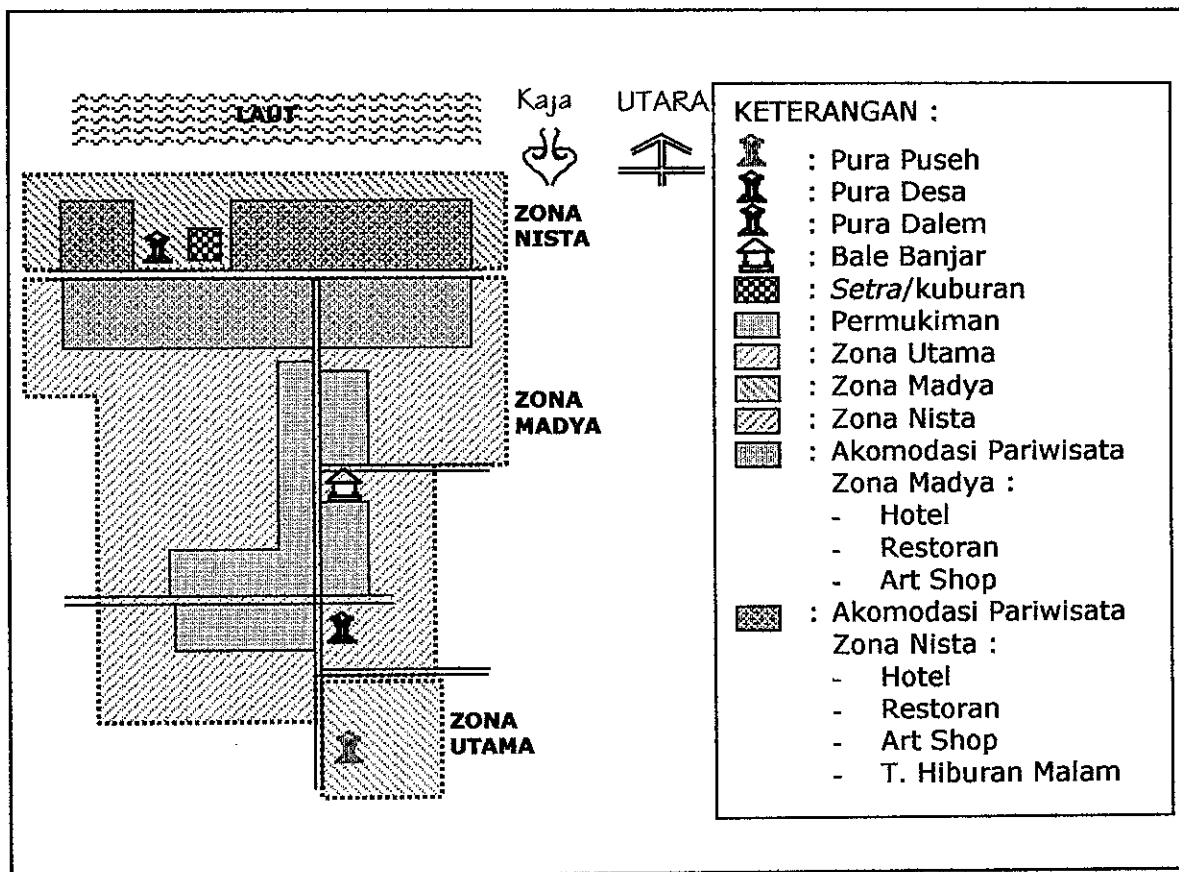
Sumber : Hasil Analisis dan Interpretasi Dari Gambar 3.14, 2002

Dari gambar 4.25 terlihat pola tata ruang vernakular Desa Adat Banyualit, zona utama tidak dipergunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata, zona madya sudah bisa dipergunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata kecuali untuk tempat hiburan malam, zona nista bisa digunakan untuk semua fasilitas akomodasi pariwisata.

4.5.6. Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Kaliasem

Pola tata ruang vernakular desa adat Kaliasem adalah seperti pada gambar 4.26 berikut :

GAMBAR 4.26
POLA TATA RUANG VERNAKULAR DESA ADAT KALIASEM



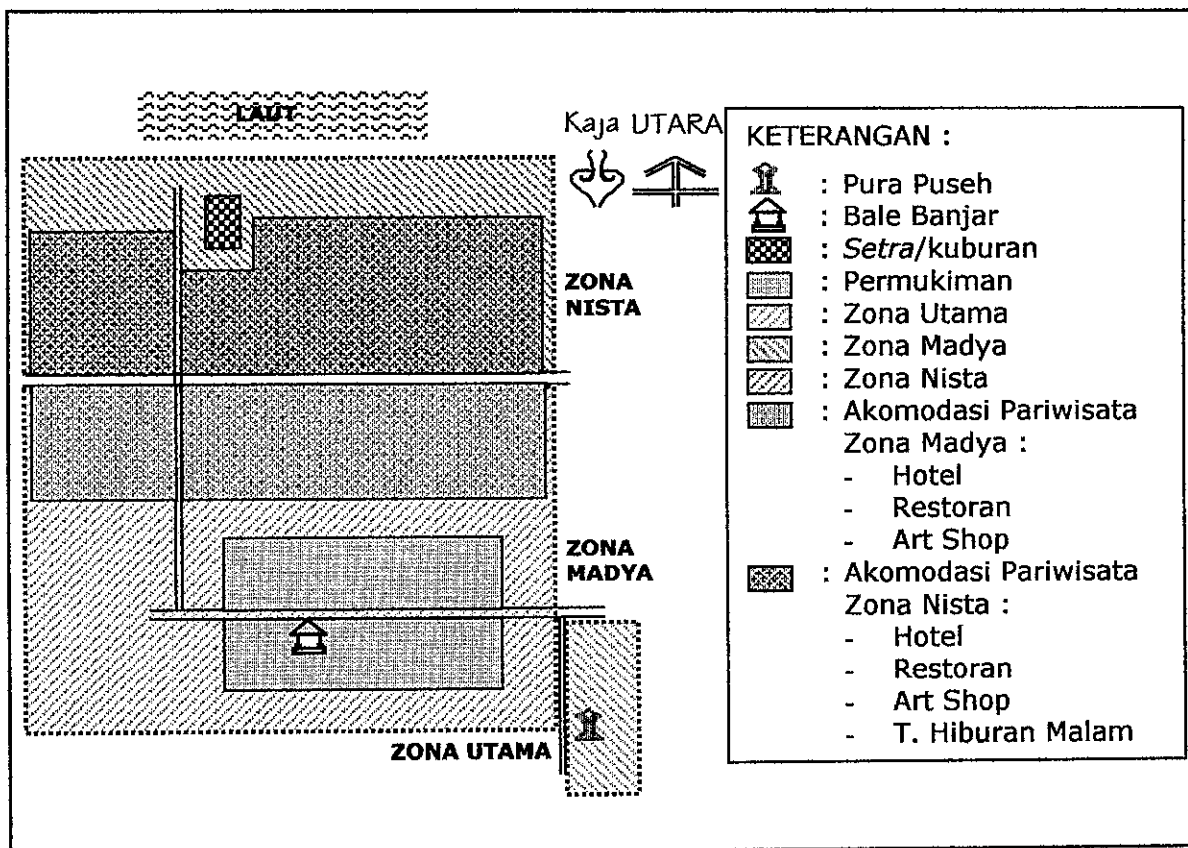
Sumber : Hasil Analisis dan Interpretasi Dari Gambar 3.15, 2002

Dari gambar 4.26 terlihat pola tata ruang vernakular Desa Adat Kaliasem, zona utama tidak dipergunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata, zona madya sudah bisa dipergunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata kecuali untuk tempat hiburan malam, zona nista bisa digunakan untuk semua fasilitas akomodasi pariwisata.

4.5.7. Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Temukus

Pola tata ruang vernakular desa adat Temukus adalah seperti pada gambar 4.27 berikut :

GAMBAR 4.27
POLA TATA RUANG VERNAKULAR DESA ADAT TEMUKUS



Sumber : Hasil Analisis dan Interpretasi Dari Gambar 3.16, 2002

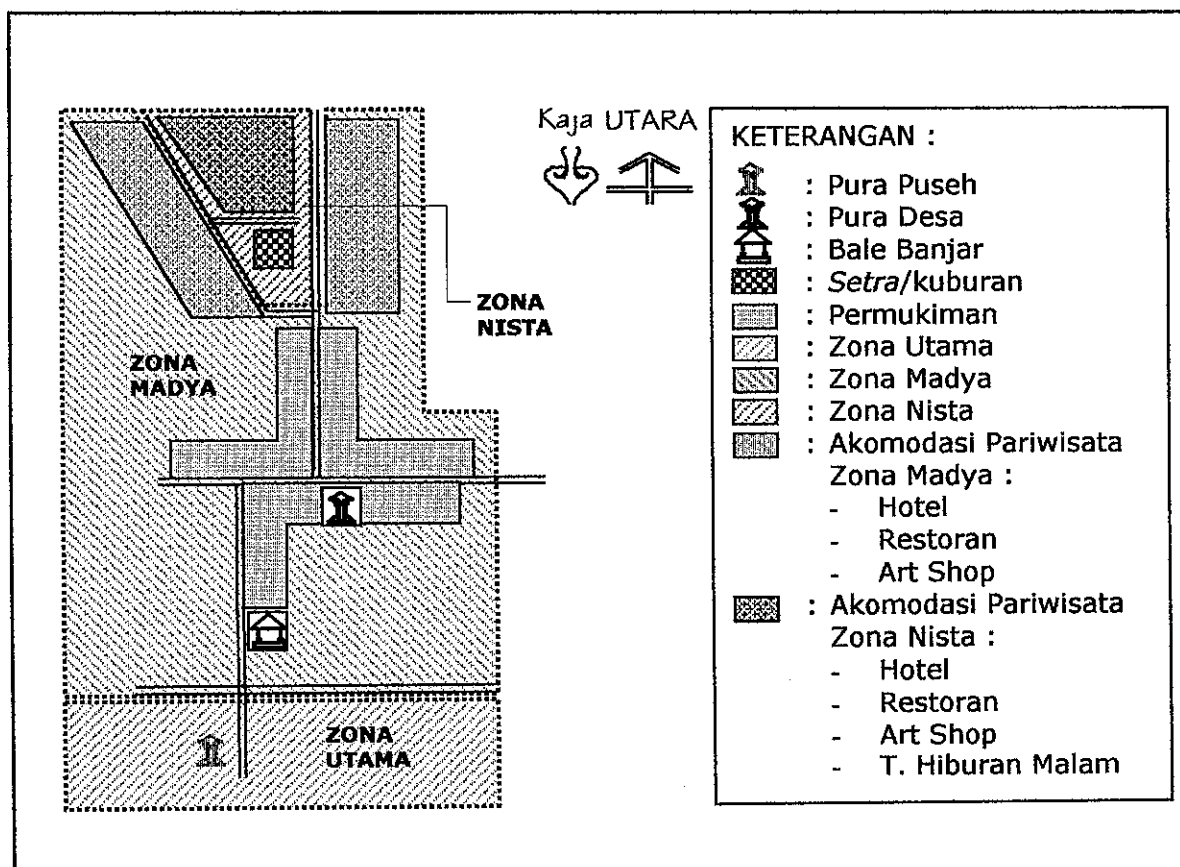
Dari gambar 4.27 terlihat pola tata ruang vernacular Desa Adat Temukus, zona utama tidak dipergunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata, zona madya sudah bisa dipergunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata kecuali untuk tempat hiburan malam, zona nista bisa digunakan untuk semua fasilitas akomodasi pariwisata.

4.5.8. Pola Tata Ruang Vernakular Desa Adat Tigawasa

Pola tata ruang vernakular desa adat Tigawasa adalah seperti pada gambar 4.28 berikut :

GAMBAR 4.28

POLA TATA RUANG VERNAKULAR DESA ADAT TIGAWASA

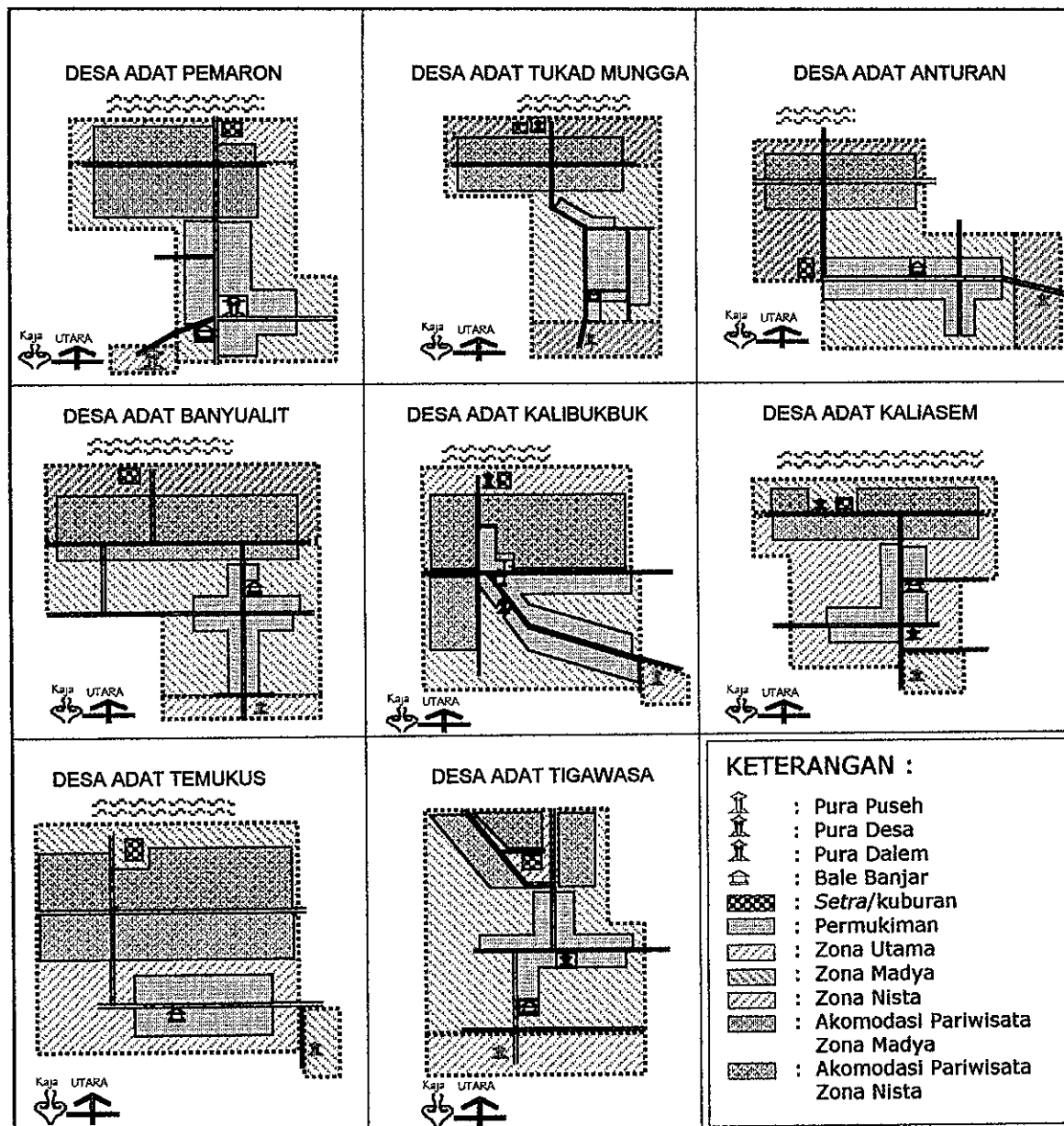


Sumber : Hasil Analisis dan Interpretasi Dari Gambar 3.17, 2002

Dari gambar 4.28 terlihat pola tata ruang vernacular Desa Adat Tigawasa, zona utama tidak dipergunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata, zona madya sudah bisa dipergunakan untuk pembangunan akomodasi pariwisata kecuali untuk tempat hiburan malam, zona nista bisa digunakan untuk semua fasilitas akomodasi pariwisata.

Pola tata ruang vernakular secara keseluruhan dari masing – masing desa adat pada kawasan pariwisata Lovina adalah seperti pada gambar 4.29 berikut.

GAMBAR 4. 29
POLA TATA RUANG VERNAKULAR DESA ADAT PADA KAWASAN
PARIWISATA LOVINA



Sumber : Hasil Analisis dan Dirangkum dari Gambar 4.21 – 4.28, 2002

Dari gambar 4.29 terlihat pola tata ruang vernacular Desa – Desa Adat pada kawasan pariwisata Lovina, dari semua pola tata ruang vernakular tersebut zona utama utama terletak pada arah *kaja* (arah ke gunung), zona nista di sepanjang pantai (arah *kelod*) sampai batas jalan, kecuali untuk zona nista Desa Adat Tigawasa yang memang tidak berbatasan dengan pantai. Sedangkan zona madya terletak diantara zona utama dan zona nista.

Untuk mengantisipasi perubahan *built up area* akibat perkembangan pembangunan pada kawasan pariwisata Lovina, tetap memperhatikan pola tata ruang vernakular pada masing – masing desa adat dengan zona utama adalah untuk kawasan lindung yang hanya dipergunakan untuk kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan agama (kegiatan yang bersifat sakral) kecuali untuk pembangunan restoran masih bisa dipertimbangkan dengan persetujuan pemuka/tokoh dan masyarakat desa adat dengan tetap memperhatikan radius kesucian pura (*apenimpug*), sedangkan untuk pembangunan fasilitas akomodasi pariwisata lainnya diarahkan pada zona nista dan zona madya kecuali untuk pembangunan tempat hiburan malam hanya pada zona nista dan tetap memperhatikan radius kesucian pura.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan pada bab IV dan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Zonasi masing – masing desa adat

Zonasi dari masing – masing desa adat terbagi kedalam 3 zona yaitu zona utama, madya dan nista dicirikan dengan arah orientasi kosmologi yaitu arah *kaja* (arah ke gunung) dan arah *kelod* (arah ke laut). Selain dicirikan oleh arah orientasi kosmologi juga dicirikan dengan lokasi dari atribut desa adat pada masing – masing desa adat. Zonasi dari masing – masing desa adat pada kawasan pariwisata Lovina adalah sebagai berikut :

- Utama : – pada arah kaja (arah ke gunung)
 - terdapat pura puseh
- Madya : – pada daerah permukiman warga desa adat (arah di tengah desa adat)
 - terdapat pura desa
 - terdapat bale banjar
- Nista : – pada arah kelod (arah ke laut)
 - terdapat pura dalem
 - terdapat *setra* (kuburan desa)

2. Akomodasi pariwisata pada tiap – tiap zona

Fasilitas akomodasi pariwisata yang bisa diterima oleh semua pihak baik masyarakat desa adat, wisatawan dan pengusaha pada masing – masing zona adalah sebagai berikut :

- Zona Utama : tidak bisa dipergunakan untuk pembangunan fasilitas akomodasi pariwisata
- Zona Madya : sudah bisa dipergunakan untuk pembangunan fasilitas akomodasi pariwisata yaitu untuk fasilitas berupa hotel, restoran dan *art shop*.
- Zona Nista : bisa digunakan untuk pembangunan semua fasilitas akomodasi pariwisata baik berupa hotel, restoran, *art shop* maupun tempat hiburan malam.

3. Faktor penentu bagi masyarakat terhadap suatu ruang vernakular

- Keberadaan nilai ruang vernakular agar tidak menjadikan penurunan terhadap nilai ruang tradisional Bali.
- Keberadaan ruang vernakular agar tidak menjadi gangguan terhadap kegiatan ritual dari masyarakat.

5.2. Rekomendasi

Dari kesimpulan yang telah didapat maka, penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng pada khususnya dan Pemerintah Propinsi Bali umumnya, serta rekomendasi pada penelitian – penelitian yang akan datang sebagai berikut :

a. Rekomendasi Kepada Pemerintah

Beberapa masukan yang dapat direkomendasikan kepada Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buleleng dan pemerintah Propinsi Bali adalah antara lain :

- Didalam mengembangkan pariwisata pada kawasan pariwisata Lovina, terutama didalam pembangunan fasilitas akomodasi pendukung pariwisata agar tetap memperhatikan lokasi yang bisa diterima oleh semua pihak baik masyarakat setempat, wisatawan dan tidak merugikan pengusaha yang akan menanamkan modal.
- Agar disusun suatu rencana detail kawasan pariwisata Lovina yang tetap memperhatikan pola tata ruang tradisional Bali dan diberi kekuatan hukum agar bisa mengikat semua pihak yang berkepentingan.

b. Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Beberapa masukan yang dapat direkomendasikan kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai pariwisata dan pola ruang tradisional Bali adalah antara lain :

- Melakukan penelitian pada kawasan pariwisata yang lain terutama pada kawasan pariwisata yang lokasinya pada daerah daratan dan pegunungan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan daerah pantai.
- Meneliti lebih lanjut mengenai penempatan fasilitas akomodasi pariwisata pada zona utama, madya atau nista yang lebih dijabarkan lagi menjadi *utamaning utama*, *utamaning madya*, *utamaning nista*, *madyaning utama*, *madyaning madya*, *madyaning nista*, *nistaning utama*, *nistaning madya* dan *nistaning nista* serta menurut arah *kaja – kelod* (arah ke gunung – ke laut) dan *kangin – kauh* (arah terbit terbenamnya matahari).

DAFTAR PUSTAKA

- Antonia Hussey. 1986. *Resources For Development : Tourism and Scale Indigenous Enterprise in Bali*. Hawaii : Dissertation University of Hawaii.
- Bagus , I Gusti Ngurah. 1999. "*Kebudayaan Bali*" dalam *Koentjaraningrat (ed), Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Budihardjo, Eko. 1986. *Architectural Conservation in Bali*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Cigdem, Berdi Gokhan. 2002. "*In The Search Consepsts of Vernacular Architecture for the New Millenium*" *Proceeding Vernacular Settlement in The New Millenium*. Jakarta : Department of Architecture Faculty of Engineering University of Indonesia.
- Darmika Ida Bagus. 2000. "*Hubungan Timbal Balik Antara Desa Adat dan Pariwisata.*" *Eksistensi Desa Adat, Budaya dan Pariwisata*. Denpasar : Pusat Pengkajian Pedesaan dan Kawasan.
- Davison, Julian & Bruce Granquist. 1999. *Balinese Architecture*. Singapore : Periplus.
- Fred B. Eiseman, Jr. 1995. *Bali Sekala & Niskala: Volume II*.Singapore : Periplus.
- Gelebet I Nyoman. 1984. *Pengaruh Teknologi Pada Permukiman Tradisional*. Denpasar : Fakultas Teknik Universitas Udayana.
- Gunn, Clare A. 1988. *Tourism Planning Third Edition*. New York – Philadelphia – London : Taylor & Franciss.
- Kusmayadi dan Endar Sugiarto. 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataaan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Marpaung, Happy. 2000. *Pengetahuan Kepariwisataaan*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Mill, Robert Christie and Alastair A. Morrison. 1985. *The Tourism System*. New Jersey : Prentice-Hall Inc.
- Mill, Robert Christie. 2000. *The Tourism International Business, Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Myra, P. Gunawan et al. 2000. *Agenda Pariwisata untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan*. Jakarta : Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Nawawi, Hadani. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Oka, I Gusti Ngurah (ed). 2000. *Himpunan Peraturan tentang Pemberdayaan Desa Pekraman di Bali*. Denpasar : Biro Hukum Setda Bali.
- Parimin, Ardi P. 1986. *Fundamental Study on Spatial Formation of Islan Village, Environmental Hierarchy of Sacred-Profane Concept In Bali*. Japan : Disertasi, Universitas Osaka.
- Parwata, I Wayan. 1996. *Kajian Pola Tata Ruang Tradisional Bali oleh Penetrasi Pariwisata di Desa Tulamben – Bali*. Yogyakarta : Thesis S2 MPKD UGM.
- Paturusi, Samsul Alam. 1988. *Pengaruh Pariwisata Terhadap Pola Tata Ruang Perumahan Tradisional Bali*. Bandung : Thesis S2 Program Perencanaan Wilayah dan Kota ITB.
- Paul, Oliver. 1997. *Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World*. Cambridge University Press
- Pendit, Nyoman S. 1999. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : Penerbit PT Pradnya Paramita.
- Putra, Made Dharma. 1999. *Pengaruh Perkembangan Kepariwisata Terhadap Struktur Ruang Kawasan Sanur*. Yogyakarta : Thesis S2 MPKD UGM.
- Rutz, Werner. 1987. *Cities and Town in Indonesia*. Stuttgart - Berlin : Gredbuder Bomtraeger.
- Sihite, Richard. 2000. *Tourism Industry (Kepariwisataan)*. Surabaya : Penerbit SIC.
- Soefaat (et. Al.). 1997. *Kamus Tata Ruang*. Jakarta : Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.
- Soekadijo, R.G. 2000. *Anatomi Pariwisata, Memahami Pariwisata sebagai Systemic Linkage*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Spillane, James J. 2001. *Ekonomi Pariwisata : Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

- _____. 2001. *Pariwisata Indonesia : Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Suasthawa, Dharmayuda I Made. 2001. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Denpasar : Upada Sastra.
- Sugiantoro, Ronny. 2000. *Pariwisata Antara Obsesi dan Realita*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.
- Surpha I Wayan. 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar : Penerbit Bali Post.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Bumi Aksara.
- Yoeti, H Oka A. 1997. *Perencanaan & Pengembangan Pariwisata*. Jakarta : Penerbit PT Pradnya Paramita.
- _____. 1985. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Penerbit Angkasa.
- Yunus, Hadi Sabari. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.

Artikel :

- Sari, Suzana Katih. 1998. "Tourism Development as Strategy for Regional Development". Tata Loka, Edisi 06, Juni, Hal 17-24.
- Wijaya, IGPS Rama. 1993. " Dampak Fisik Kegiatan Pariwisata : Kasus Pengamatan Bali" Jurnal PWK, No. 7.
- Wiranto. 1999. *Arsitektur Vernakular Indonesia : Perannya dalam Pengembangan Jati Diri*. Surabaya. Majalah Dimensi Volume 27, Nomor 2.